

Kongres Bahasa Indonesia VIII

Jakarta, 14--17 Oktober 2003



PANEL

06
N

Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia

DB

Daftar Isi

MENUJU PENGAJARAN BAHASA DAN
SASTRA YANG BERMAKNA

Suminto A. Sayuti

•
PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM
MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Benyamin Lakitan

•
PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM
MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA

H. Muhammad Adnan Tiro

•
BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI
NEGARA DAN KEGIATAN KENEGARAAN

Anwar Suprijadi

•
BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI
NEGARA DAN KEGIATAN KENEGARAAN

Daulat P. Tampubolon

•
PERAN HARIAN SINGGALANG DALAM MEMELIHARA
BAHASA DAN BUDAYA DAERAH

Haji Darlis Syofyan

•
ADAKAH HARAPAN BAGI PERS BERBAHASA SUNDA

Karno Kartadibrata

•
PERAN SKH WASPADA DALAM MEMELIHARA
BAHASA DAN BUDAYA DAERAH

Sofyan Harahap

•
KEARIFAN BAHASA LOKAL PADA PERS BERBAHASA INDONESIA

Arwan Tuti Artha

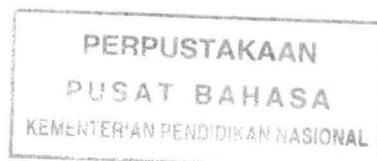
•
HIMPUNAN PEMBINA BAHASA INDONESIA :

Peluang dan Tantangan

Sumardi

•
FUNGSI BAHASA ETNIK UNTUK MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN

Robert Sibarani



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PB
Klasifikasi
499.210 6
K04
u

No. Induk: 679
Tgl: 24-10-11
Tgl: Rub

**BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI
NEGARA DAN KEGIATAN KENEGARAAN**

Anwar Suprijadi
Kepala Lembaga Administrasi Negara

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEGIATAN KENEGARAAN

Anwar Suprijadi

Kepala Lembaga Administrasi Negara

“Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa.”
(Putusan KBI VII 1998)

1. Pendahuluan

Sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Bahasa Indonesia kini bukan hanya berkedudukan sebagai bahasa persatuan melainkan juga sebagai bahasa negara, sebagai sarana komunikasi resmi, baik lisan maupun tulisan, dalam administrasi negara dan kegiatan kenegaraan.

Kesadaran berbahasa Indonesia yang baik, benar, demokratis, dan lugas di kalangan para pejabat, aparatur pemerintah, dan tokoh panutan masyarakat akan mendorong perkembangan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang mencerminkan jati diri dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Karena itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi negara dan kegiatan kenegaraan perlu dibina dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memperkuat ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi. Tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi sekarang ini, justru terletak pada kemauan dan kemampuan para penutur bahasa di kalangan aparatur dan pejabat pemerintahan dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar, demokratis, dan lugas.

Pembahasan mengenai bahasa seringkali dikaitkan dengan budaya karena bahasa memang lahir dalam suatu budaya (*culture*) tertentu. Temuan teoritis yang penting dalam hal bahasa adalah sebagaimana disampaikan Saussure, (Littlejohn, 1996: 340) yang membedakan antara bahasa formal (*langue*) dan penggunaan bahasa aktual dalam komunikasi (*parole*). Dua istilah ini disamakan dengan bahasa dan percakapan. Bahasa (*langue*) adalah suatu sistem formal yang dapat

dianalisis terpisah dari penggunaan aktualnya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan percakapan (*parole*) adalah penggunaan bahasa untuk menyelesaikan berbagai tujuan.

Kedua jenis bahasa tersebut (*langue* dan *parole*) dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Bahasa yang berbentuk tulisan dan lisan tersebut juga terbagi ke dalam dua kelompok: *formal* dan *nonformal*. Peraturan perundangan atau naskah-naskah kebijakan biasanya menggunakan bahasa tertulis-formal, sedangkan surat/nota dinas untuk teman sejawat, misalnya, lebih banyak menggunakan bahasa tulisan-nonformal. Pada penggunaan bahasa lisan-formal, dapat dilihat pada percakapan antara bawahan dengan atasan atau dengan orang yang dihormati, sedangkan percakapan antarteman sejawat atau percakapan antara petugas layanan dengan yang dilayani biasanya menggunakan bahasa lisan-nonformal.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII tanggal 14 – 17 Oktober 2003 ini, salah satu topik yang akan dibahas adalah: “*Bahasa Indonesia sebagai Sarana Administrasi Negara dan Kegiatan Kenegaraan*”. Dengan judul yang sama dengan topik tersebut, makalah ini akan mencoba membahas dan memberikan jawaban terhadap tiga pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu

- 1) Bagaimana mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi negara?
- 2) Bagaimana peran instansi pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia?
- 3) Strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan instansi pemerintah?

2. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara

Penyelenggaraan administrasi negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari lebih dikenal dengan istilah pelayanan umum. Hal ini sesuai dengan kenyataan interaksi antara masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintah pada umumnya dan khususnya di daerah, yang pada umumnya berhubungan dengan pemberian layanan atas berbagai kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat oleh lembaga-lembaga pemerintah yang bersangkutan. Masyarakat mengenal administrasi negara dari berbagai pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, mulai dari pembuatan akta kelahiran, kartu penduduk, surat izin mengemudi, surat keterangan nikah, hingga akta kematian. Selain itu juga melalui penyelenggaraan pendidikan dasar hingga pendidikan

tinggi, pelayanan kesehatan, pembuatan dan pemeliharaan jalan dan prasarana lingkungan permukiman, penyediaan air bersih, listrik, pelayanan telepon, dan sebagainya.

Penyelenggaraan administrasi negara secara konseptual sesungguhnya lebih luas daripada pelayanan umum oleh pemerintah kepada masyarakat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, jilid I (1991:1) mengartikan administrasi negara sebagai berikut:

“...keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara Republik Indonesia seperti ditetapkan dalam UUD 1945.”

Dengan pengertian seperti itu, maka penyelenggaraan administrasi negara mencakup segala jenis kebijakan dan tindakan lembaga-lembaga pemerintah, para pejabat pemerintah, dan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang diarahkan untuk memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak.

Karena penyelenggaraan administrasi negara melibatkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda, khususnya ragam bahasa daerah, maka penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi administrasi negara menjadi penting. Dalam UUD 1945 Pasal 36 ditetapkan bahwa: “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” Artinya, bahasa Indonesia dengan demikian merupakan bahasa resmi yang digunakan sebagai sarana komunikasi lisan maupun tulisan dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan. Hal ini sangat membantu aparatur negara dalam berinteraksi dengan masyarakat dengan berbagai ragam bahasa daerah masing-masing.

Namun, dalam era reformasi terdapat kecenderungan penggunaan bahasa asing (terutama bahasa) Inggris dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan. Sebagai contoh penggunaan kata/istilah *stakeholders* untuk menyebut pihak-pihak yang terkait dengan suatu pelayanan publik. Memang hal ini bukan merupakan sesuatu yang baru karena pada masa orde lama dan awal orde baru, proses penyelenggaraan administrasi negara juga dipengaruhi oleh bahasa asing yakni bahasa Belanda. Hal ini terutama

terlihat pada peraturan-peraturan perundangan atau kebijakan, bahkan dalam pembicaraan sehari-hari di antara para pejabat pemerintahan di masa itu.

Dalam perkembangannya, administrasi negara sering tidak terhidarkan dari penggunaan kata/istilah asing yang belum ada padanannya sehingga terkadang digunakan kata/istilah asingnya karena jika diterjemahkan justru akan terasa janggal. Contohnya penggunaan kata *governance*. Kata ini kadang diterjemahkan dengan pengelolaan, pemerintahan, dan kepemimpinan.

Adapun untuk kata-kata asing yang sudah ada padanannya maka yang digunakan dalam penyelenggaraan administrasi Negara atau pelayanan publik adalah padanan kata tersebut. Misalnya, partisipasi yang berasal dari kata *participation*, administrasi berasal dari kata *administration*, dan sebagainya. Proses pengindonesiaan kata/istilah asing tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang tertuang dalam buku Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD), yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa – Departemen Pendidikan Nasional.

Yang menjadi permasalahan adalah penggunaan kata/istilah asing tersebut kadang dilakukan tidak pada tempatnya. Kata *partisipasi* mungkin akan lebih tepat digunakan dalam bahasa formal dalam laporan, naskah pidato kenegaraan, atau hal lain yang bersifat resmi, terlebih penggunaan kata *participation* akan lebih cocok untuk pembicaraan atau naskah resmi. Namun untuk menghadapi masyarakat dalam melakukan pelayanan umum sehari-hari, penggunaan kata *partisipasi* apalagi *participation* kurang tepat, dan karenanya lebih tepat menggunakan padanan katanya yaitu *ikut serta* atau *peran serta*.

Peminjaman bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, pada umumnya dilatarbelakangi keinginan untuk (1) mengisi kekosongan kosakata bahasa Indonesia, (2) memberikan kecukupan arti semantis, (3) memenuhi keperluan penggunaan kata secara praktis, (4) mengisi register tertentu, (5) memungkinkan kata asing masuk ke sistem bahasa Indonesia. Untuk itu, penggunaan kata/istilah asing yang telah ada padanan katanya – apalagi diucapkan atau dituliskan dengan cara yang kurang tepat – justru akan mengurangi mutu penggunaan bahasa tersebut.

Disamping pengindonesiaan kata/istilah asing, dalam EYD juga diatur pembentukan frasa, kalimat, singkatan (akronim), persamaan (sinonim), dan sebagainya. Kesemuanya itu memberikan pedoman atau panduan kepada kita untuk melakukan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Namun, dalam praktiknya, memang belum

semua aturan yang tertuang dalam EYD dilaksanakan. Sebagai contoh akronim yang digunakan dalam instansi pemerintah, misalnya: Depdagri (Departemen Dalam Negeri), Setda (Sekretariat Daerah), Sekda (Sekretaris Daerah), dan sebagainya.

Jika kita mengikuti pedoman EYD maka akronimnya bukan 'Depdagri' tetapi DDN, yakni huruf pertamanya saja; 'Sekda untuk Sekretaris Daerah, sebagaimana singkatan Seswapres (Sekretaris Wakil Presiden) dan juga Sesneg (Sekretaris Negara), dan seterusnya. Namun, hal tersebut terasa dibenarkan karena telah disetujui oleh semua pihak, padahal jika ditinjau dari pedoman EYD penyingkatan tersebut kurang tepat.

Permasalahan lainnya adalah bahwa penggunaan bahasa Indonesia sering dipengaruhi oleh budaya feodal, yang mengakibatkan perbedaan penggunaan bahasa secara berbeda untuk seseorang yang mempunyai pangkat/derajat tertentu. Hal ini kemudian biasanya melibatkan bahasa daerah tertentu untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang/pihak yang diajak berbicara. Contohnya, *dengan segala hormat kami haturkan (Jw)....*, hal ini menunjukkan budaya feodal yang dilakukan untuk menghormati orang yang lebih tinggi derajat atau kedudukannya. Hal tersebut kurang mendukung penggunaan bahasa Indonesia, terutama di lingkungan instansi pemerintah karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang demokratis dan tidak mengenal tingkatan atau *unda-usuk* seperti dalam bahasa Jawa/Sunda..

Selain itu, salah satu permasalahan penggunaan bahasa Indonesia adalah karena adanya pengaruh mode, yakni orang menggunakan istilah-istilah atau kata-kata asing agar ia kelihatan pandai dan memiliki wawasan luas. Misalnya, *Maaf, pendapat kita tidak significant sehingga permasalahan ini perlu dibahas pada pertemuan berikutnya*. Penggunaan kata *significant* disini dimaksudkan untuk menggantikan kata *sejalan/selaras*. Namun, kemudian malah menjadi tidak kena karena kata *significant* berarti kesesuaian yang didukung oleh data-data statistik tertentu. Hal ini tidak terlalu bermasalah jika seseorang tadi berbicara pada forum ilmiah dan dalam konteks yang tepat dihadapan para cendekiawan bukan masyarakat awam.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi negara dan kegiatan kenegaraan dapat dikatakan belum baik dan masih perlu dikembangkan. Belum terciptanya mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi dan kegiatan kenegaraan juga disebabkan adanya penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah yang tidak tepat, terutama pada kegiatan-

kegiatan kenegaraan seperti pidato pejabat negara, penerimaan tamu negara, dan sebagainya.

3. Peran Instansi Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Bahasa Indonesia

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dalam rangka meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai sarana administrasi negara dan kegiatan kenegaraan. Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia telah dimulai sejak zaman orde baru. Ketika itu, setiap melakukan kegiatan kenegaraan, apakah dalam memberikan sambutan resmi maupun kegiatan menerima tamu negara, mantan Presiden Soeharto selalu menggunakan bahasa Indonesia.

Selanjutnya, menurut informasi yang diperoleh oleh LAN, upaya peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan instansi pemerintah telah dilakukan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional melalui berbagai kegiatan kerja sama maupun penyuluhan yang melibatkan tidak hanya instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, tetapi juga swasta, masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi. Kerja sama dengan instansi pemerintah pusat, antara lain, telah dilakukan dengan Departemen Penerangan (TVRI dan RRI), Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Departemen Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi, Perusahaan Umum Listrik Negara, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan seluruh Pemerintah Daerah Propinsi, yang waktu itu masih mencakup kerja sama dengan 26 propinsi se-Indonesia. Sedangkan kerja sama dengan pihak swasta dilakukan dengan PT Elnusa Yellow Pages dan berbagai perusahaan swasta yang tergabung dalam REI (Real Estate Indonesia), sedangkan kerja sama dengan kalangan perguruan tinggi antara lain dengan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Adapun kerja sama dengan masyarakat dilakukan secara individu/ perseorangan maupun kelompok seperti Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dan Organisasi Profesi Kebahasaan dan Kesastraan.

Selain itu, upaya-upaya peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia juga dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional - Pusat Bahasa melalui berbagai kegiatan penyuluhan baik langsung maupun

tidak langsung. Penyuluhan langsung adalah penyuluhan yang disampaikan secara tatap muka dengan masyarakat pesuluh secara langsung dalam berbagai kesempatan, baik di Pusat Bahasa maupun di instansi lain. Penyuluhan langsung dilakukan berdasarkan permintaan & kunjungan serta penyuluhan dilakukan berdasarkan kerja sama, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan instansi lain, sedangkan penyuluhan tak langsung adalah penyuluhan yang disampaikan melalui media, seperti surat, telepon, dan terbitan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, LAN menyambut dengan baik upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan mutu penggunaan bahasa, khususnya dalam lingkungan instansi pemerintah. LAN sendiri sampai saat ini belum secara optimal melakukan upaya-upaya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan. Untuk itu, forum ini merupakan momentum yang sangat baik bagi para penyelenggara administrasi pada umumnya dan LAN pada khususnya untuk ikut serta dalam mewujudkan mutu penggunaan bahasa Indonesia yang diinginkan. Sehubungan dengan hal inilah, kiranya perlu disusun strategi-strategi yang terencana dan terarah dengan baik untuk menciptakan atau mewujudkan mutu penggunaan bahasa Indonesia di kalangan instansi pemerintah.

4. Strategi Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia

Menurut pandangan kami, ada beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana administrasi negara dan kegiatan kenegaraan, antara lain:

Pertama, melanjutkan berbagai upaya kerja sama serta penyuluhan yang telah dirintis pada masa-masa yang lalu, namun dengan terus mempertimbangkan perkembangan strategis yang berlangsung dari waktu ke waktu. Salah satu perkembangan strategis yang dimaksud adalah terbitnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Perubahan yang terjadi adalah bahwa dengan UU tersebut, Pemerintah Kabupaten dan Kota saat ini memiliki kewenangan yang sangat besar dalam melaksanakan administrasi pemerintah daerahnya, yang pada era sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Oleh karena itu, arah kerja sama dalam peningkatan mutu bahasa Indonesia juga harus berubah, yaitu tidak hanya melakukan kerja sama dengan pemerintah

propinsi, tetapi juga dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Selain menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, juga perlu dipertimbangkan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat lainnya, selain yang telah disebutkan di atas, misalnya menjalin kerja sama dengan Sekretariat Negara, Kantor MENPAN, LAN, dan BKN. Hal ini sangat penting karena instansi-instansi tersebut bertanggung jawab pada penyelenggaraan administrasi negara. Khusus untuk LAN, tugas pokok dan fungsinya adalah pada pengembangan sistem administrasi negara dan pendidikan & pelatihan PNS. Untuk itu, kerja sama Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dengan LAN akan sangat efektif dalam meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana administrasi negara dan kegiatan kenegaraan.

Kedua, dalam rekrutmen pegawai, baik Pusat maupun Daerah, perlu dipertimbangkan masuknya sarjana-sarjana bahasa atau sarjana lain atau calon pegawai yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang cukup baik. Hal ini sangat penting mengingat bahwa setiap instansi pemerintah memerlukan pegawai yang memiliki kemampuan memadai dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan untuk keperluan penyusunan pelaporan, penyusunan naskah pidato dan sebagainya dapat dipenuhi melalui diklat-diklat teknis tentang penggunaan bahasa dalam berbagai keperluan tersebut..

Ketiga, perlu dilakukan kegiatan penelitian atau kajian untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang selama ini dirasakan menghambat pencapaian mutu penggunaan bahasa Indonesia. Dari penelitian atau kajian tersebut (yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak) diharapkan dapat dihasilkan saran rekomendasi yang dapat diterapkan bagi perbaikan langkah/upaya untuk mencapai mutu yang diharapkan.

Keempat, perlu upaya nyata untuk memasukkan kurikulum penggunaan bahasa Indonesia dalam diklat-diklat struktural yang berada di bawah koordinasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan (Diklat), misalnya Diklatpim Tingkat IV, III, II, dan I yang berada di bawah koordinasi Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, jika memungkinkan dapat dilaksanakan diklat-diklat teknis tentang penggunaan bahasa Indonesia atau paling tidak dapat dimasukkan sebagai salah satu mata ajar dalam diklat teknis maupun fungsional tersebut.

Kelima, perlunya sosialisasi secara lebih intensif produk-produk yang dihasilkan oleh Pusat Bahasa, Depdiknas, terutama yang

berkaitan dengan peningkatan mutu bahasa Indonesia di lingkungan instansi pemerintah. Kegiatan ini harus didukung pula oleh sarana teknologi tinggi (*hitech*), seperti penggunaan teknologi komputer-informatika, internet, dan sebagainya.

Keenam, menggalang komitmen dan menciptakan kesadaran bersama dari seluruh instansi pemerintah untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam administrasi negara dan kegiatan kenegaraan akan dapat diwujudkan.

5. Penutup

Penggunaan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi Negara dan kegiatan kenegaraan memiliki legalitas yang sangat kuat karena dijamin dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD 1945. Namun, sangat disayangkan, kekuatan legal formal tersebut ternyata belum menjadi insprasi bagi para penyelenggara administrasi negara dan kegiatan kenegaraan untuk melaksanakan amanat tersebut.

Dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia banyak mengalami permasalahan baik karena pengaruh bahasa asing maupun pengaruh berbagai bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Akibatnya, mutu penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana administrasi negara dan kegiatan kenegaraan belum sesuai dengan harapan, yakni sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD).

Sehubungan dengan hal tersebut, ada berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkup instansi pemerintah. Namun demikian, upaya-upaya tersebut perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan seiring dengan perkembangan strategis yang terjadi dari waktu ke waktu. Salah satu perkembangan strategis yang perlu menjadi pertimbangan adalah terbitnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam kaitan ini kami menawarkan enam (6) strategi bagi peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan. Namun pada intinya, mutu penggunaan bahasa Indonesia tersebut terletak pada komitmen dan kesadaran bersama para penyelenggara administrasi negara dan kegiatan kenegaraan, yang tentu saja didukung oleh kemampuan yang cukup memadai.

**PERAN HARIAN SINGGALANG
DALAM MEMELIHARA BAHASA DAN BUDAYA DAERAH**

Haji Darlis Syofyan



PERAN HARIAN *SINGGALANG* DALAM MEMELIHARA BAHASA DAN BUDAYA DAERAH

Haji Darlis Syofyan

I. Pendahuluan

Sebelum masuk ke topik makalah ini, saya ingin memperkenalkan dulu tentang Harian *Singgalang*. Adalah surat kabar harian yang diterbitkan di Padang, beredar selain di Sumatra Barat dan provinsi tetangga, juga ke seluruh wilayah negara ini, bahkan ke negara jiran Singapura dan Malaysia. Di mana ada warung nasi Padang, di sana ada *Singgalang*.

Kerja sama dengan warung nasi Padang ini sudah semenjak lama dilakukan. Mulai semenjak terbit 18 Desember 1968, yang waktu itu *Singgalang* terbit satu kali seminggu. Kemudian berkembang menjadi dua kali seminggu dan semenjak 18 Desember 1979 menjadi harian terbit delapan halaman. Sehari menjelang HUT Kemerdekaan RI ke 39 (16 Agustus 1984), Surat kabar *Singgalang* terbit 12 halaman setiap hari. Kini telah berkembang terbit 16 sampai 24 halaman setiap hari.

Edisi perdana *Singgalang*, yang terbit di Padang 18 Desember 1958 itu, mampu menarik hati masyarakat Ranah Minang, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Hal itu terjadi karena informasi yang diberikan adalah tentang masyarakat daerah Sumatra Barat baik di kampung halaman maupun di perantauan sehingga *Singgalang* menjadi titian informasi antara kampung halaman dan perantauan.

Selain itu, mottonya juga pas dengan kondisi Sumatra Barat, maupun Ranah Minang waktu itu, yang bertahun-tahun terpukul karena trauma yang ditimbulkan pergolakan daerah dan tekanan pemerintahan Orde Lama. Motto *Singgalang* adalah, "**Membina Harga Diri untuk Kesejahteraan Nusa dan Bangsa**".

- v Haji Darlis Syofyan, adalah Pemimpin Redaksi, Harian Singgalang.
- v Makalah ini disampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia VIII 14 – 17 Oktober 2003 di Hotel Indonesia, Jakarta.

Sifatnya yang khas antara lain, tersaji sebagai bacaan yang penuh senda gurau dan kritik Minang yang sehat, dan sampai kini menempatkan Singgalang menjadi rujukan masyarakat Minang di kampung halaman serta rantau, yang bahkan disebut sebagai satu-satunya Surat kabar urang awak di Indonesia.

Surat kabar yang didirikan oleh empat sekawan, Nasrul Siddik St. Mangkuto, Nazif Basir St.Pamenan, Salius Sutan Sati dan Haji Basril Djabar (kini Pemimpin Umum Harian *Singgalang*), dikenal sebagai surat kabar kritis sampai saat ini, sebagai salah satu resep untuk menarik pembaca, ibarat kesukaan urang awak terhadap makanan yang pedas-pedas.

II. Peranan Memelihara Bahasa dan Budaya Daerah

Komitmen, memelihara bahasa daerah, bagi harian *Singgalang*, masuk dalam paket misi surat kabar. Karenanya di waktu surat kabar ini mingguan, bahasa Minangnya dominan, terutama dalam pemakaian judul, tulisan-tulisan tentang budaya, adat serta cerita maupun kebiasaan masyarakat Minang.

Redaksi *Singgalang* menyadari betul, menyajikan bahasa Minang itulah sebagai upaya membangun segmen pembaca yang kuat. Pengelola surat kabar ini mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan tersebut, sekaligus memperjuangkan idealisme.

Untuk memenuhi target bisnis, memanfaatkan lima juta warga Minang di kampung halaman dan jumlah yang sama di perantauan, inilah yang membuat *Singgalang* besar, yang di lain pihak mempertahankan bahasa dan budaya Minangkabau adalah suatu pilihan idealisme untuk membangun masyarakat Minang yang kuat sebagai salah satu pilar persatuan bangsa ini.

Memang adakalanya misi yang merupakan perwujudan idealisme itu muncul lebih kuat dibanding semangat dan dorongan bisnis. Rasa tanggung jawab untuk memelihara bahasa dan budaya daerah sebagai aset nasional adalah identitas *Singgalang* yang lebih menonjol dibanding dengan kehadirannya sebagai barang dagangan.

Semua itu dilaksanakan dengan mengemban fungsi bahasa secara umum, sebagai alat komunikasi. Inilah keunggulan yang dibangun *Singgalang*, ketika masyarakat Minang di kampung dan rantau merindukan media komunikasi, hadirilah surat kabar ini dengan bahasa Minangnya yang sekaligus adalah melaksanakan fungsi budaya.

Dengan tampilan beberapa rubrik dan cerita berbahasa Minangkabau itu, harapan redaksi terpenuhi tuntutan untuk pengembangan kebudayaan, pewarisan kebudayaan kepada generasi muda serta membuktikan kepada masyarakat pembaca bahwa kebudayaan Minang itu benar-benar suatu kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya.

Dalam perjalanan surat kabar ini kita juga telah memetik beberapa mutiara, antara lain, dengan penyajian bahasa Minang itu muncul makin banyak peminat untuk memperdalam pemahaman terhadap budaya Minangkabau melalui surat kabar *Harian Singgalang*.

Tanpa disadari, *Singgalang* dengan menerbitkan rubrik yang memakai bahasa daerah itu, telah melakukan pembudayaan terhadap seseorang ataupun telah pula memberikan kesempatan kepada masyarakat dari etnis lainnya untuk mengenal budaya Minangkabau. Misalnya, dengan menyajikan petatah petitih yang dilengkapi dengan urai papar tentang pesan budaya yang dibawanya.

Suatu ungkapan dalam bahasa Minang itu, kami sajikan dengan utuh, dan mengupayakan membuat terjemahannya ke bahasa Indonesia, untuk dikenal oleh mereka yang tidak bisa berbahasa Minang.

Sampai saat ini *Harian Singgalang* masih tetap beranggapan bahwa jika ingin membicarakan serta mengungkapkan suatu konsep dalam kebudayaan Minang, karena selalu ada petatah-petitihnya, istilahnya kita hidangkan ke pembaca dengan bahasa aslinya, sebab kalau kita pakai padanannya dalam bahasa lain, tidak masuk atau tidak pas dengan arti yang ingin kita ungkapkan.

III. Kondisi penggunaan bahasa daerah saat ini di Singgalang

Semenjak surat kabar *Singgalang* terbit harian, porsi penggunaan bahasa daerah di surat kabar ini hanya ada di edisi Minggu. Hal itu ditampung dalam beberapa rubrik, antara lain,

1. *Raso jo pareso*

Rubrik yang menampung cerita tentang anak manusia, dalam berbuat itu haruslah mengukur dari semua aspek. Begitu mengambil keputusan, harus di pertimbangkan apakah sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau. Harus diukur dengan norma seperti disebutkan dalam pepatah, 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah' (adat bersendikan agama–Islam- dan agama itu bersendikan Kitabullah –Alquran).

2. *Umbuik mudo*

Rubrik yang menampung bagaimana anak muda-mudi Minangkabau itu harus bersikap menghadapi orang tua, mamak maupun penghulu? Bagaimana seharusnya mereka berpakaian, bergaul dengan teman sebaya dan sebagainya.

3. *Rantau Batuah*

Cerita rantau, penekanannya terhadap kegiatan orang rantau dalam beradat istiadat, misalnya dalam mempertunangkan anak, pesta perkawinan, acara turun mandi anak, dan sebagainya.

4. *Ranah Bundo*

Cerita tentang kampung halaman. Terutama dalam kegiatan budaya, pesta perkawinan, mengangkat datuk maupun penghulu dan sebagainya.

5. Cerita klasik Minang

Cerita-cerita klasik Minang ini dikemas dalam rubrik 'Senggang'. Ditulis dalam bahasa Minang. Umumnya cerita itu menyangkut soal kehidupan bermasyarakat yang seharusnya dilakukan oleh orang Minang.

IV. Visi dan Misi Singgalang, Memelihara Bahasa dan Budaya Daerah.

A. Visi

Harian Singgalang harus tampil sebagai penyelamat bahasa dan budaya khususnya Minangkabau, walaupun arus globalisasi masuk semakin deras.

Visi ini harus diperkuat dengan tetap menyajikan rubrik-rubrik yang mendukung untuk itu. Selama ini bahasa dan budaya bagi etnis Minangkabau telah memberikan arti kepada semua kegiatan serta perilaku manusia dan memberikan makna yang tinggi untuk menjadi masyarakat yang berbudaya.

B. Misi

Sedangkan Misi yang di emban Singgalang adalah, dengan komunikasi yang interaktif, baik bagi masyarakat di kampung halaman

maupun di perantauan atau antara kampung halaman dan rantau, sehingga terpelihara dan lestari bahasa dan budaya Minangkabau.

V. Penutup

Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan oleh media massa dalam pengembangan bahasa serta budaya daerah adalah;

1. Media harus tetap menampilkan rubrik-rubrik khusus serta artikel, tentang peranan bahasa daerah sebagai sine qua non (yang mesti ada) bagi kebudayaan dan masyarakat.
2. Media memberi tempat terhadap bahasa daerah untuk tetap membangun sistem komunikasi sehingga memberi makna terhadap budaya, khususnya Minangkabau.
3. Menempatkan posisi bahasa dan budaya daerah, sebagai kekayaan bangsa Indonesia sangat majemuk, yang terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa, menyumbang pada kekayaan bahasa daerah (sekitar 300) dan dialek yang masih aktif dipergunakan sebagai bahasa percakapan di masing- masing daerah. Bahasa-bahasa daerah yang utama adalah Bahasa Aceh, Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Media harus mendorong kemajemukan bahasa di Indonesia memperkaya dan memperkuat bahasa persatuan yang dapat dipergunakan di seluruh pelosok Indonesia. Media harus membangun opini bahwa, kebutuhan akan adanya bahasa persatuan ini mendorong masyarakat menjunjung tinggi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional yang telah ditetapkan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.***

PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA¹

Benyamin Lakitan²

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan keragaman bahasa dan sastra daerah. Sebagai contoh, di dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan saja paling tidak dikenal beberapa bahasa daerah yang berbeda, yakni bahasa Palembang, Musi, Ogan, Kayuagung, Komering, Ranau, Panesalc, Belide, Enim, Besemah, Semende, Rawas, Rambang, Sindang, dan Aji. Bahasa-bahasa daerah ini masih secara intensif digunakan sebagai media komunikasi pada masing-masing daerah yang menjadi lokasi bermukim bagi masing-masing suku yang bersangkutan.

Walaupun bahasa daerah masih digunakan sebagai media komunikasi dalam lingkungan masyarakatnya, namun sastra daerah yang menggunakan media bahasa daerah dirasakan semakin menurun, baik kuantitas, kualitas, dan intensitas penyajiannya. Sesungguhnya bukan hanya sastra daerah yang disinyalir telah mengalami penurunan, tetapi juga hampir semua jenis kesenian daerah telah sangat berkurang peminatnya. Jarang ada seniman saat ini yang mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan kesenian daerah, termasuk sastra daerah. Apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan sastra daerah juga dirasakan menurun.

Pada saat ini pertanyaan yang lebih relevan untuk dijawab bukanlah: "Bagaimana kita meningkatkan peran bahasa dan sastra daerah dalam memperkokoh ketahanan budaya bangsa?", tetapi mungkin lebih tepat kalau kita mulai dengan menjawab pertanyaan "Bagaimana kita dapat menjaga agar bahasa dan sastra daerah tidak punah dan upaya untuk menggalakkan kembali pengembangannya serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra daerah? Baru kemudian kita dapat berharap bahwa bahasa dan sastra daerah tersebut dapat diperankan untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa. Setujukah Anda?

Untuk dapat berperan, sesuatu itu harus ada (atau tetap ada)

¹ Makalah diasajikan pada Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta tanggal 14—17 Oktober 2003

² Asisten Ekonomi, Keuangan, dan Kesejahteraan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan dan Guru Besar Universitas Sriwijaya.

terlebih dahulu sedangkan untuk memperkokoh, sesuatu tersebut harus juga memiliki kekuatan. Bahasa dan sastra daerah baru dapat diharapkan berperan dalam memperkokoh ketahanan budaya bangsa jika bahasa dan sastra daerah tersebut dapat dipelihara eksistensinya dan dikembangkan ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH Mendukung KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Bahasa daerah merupakan unsur kebudayaan nasional dan sastra daerah merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa daerah sebagai medianya. Dengan demikian, maka bahasa dan sastra daerah secara tangsung merupakan bagian dan budaya bangsa Indonesia.

Sebagai bagian dan budaya bangsa Indonesia, bahasa dan sastra daerah dapat berperan mendukung ketahanan budaya bangsa melalui kontribusinya dalam: (1) memperkaya keragaman budaya bangsa, di mana hal ini hanya dapat terjadi jika identitas/keunikannya tetap dipertahankan; (2) mensosialisasikan nilai-nilai budaya bangsa kepada masyarakat penutur/pengguna bahasa daerah yang bersangkutan, di mana dalam hal ini bahasa daerah lebih berfungsi sebagai alat komunikasi; dan (3) memperkuat dan memperkaya nilai-nilai budaya bangsa, di mana peran ini akan menjadi penting jika bahasa dan sastra daerah tersebut selain dipertahankan eksistensinya, difungsikan sebagai alat komunikasi, juga dikembangkan oleh masyarakat penggunaannya.

Peran sebagaimana yang disebutkan pada butir (1) dapat tercapai jika dan hanya jika eksistensi bahasa dan sastra daerah dapat dipertahankan. Jika bahasa dan sastra daerah menjadi punah maka tentu saja konsekuensinya tidak hanya peran pada butir (1) yang hilang, tetapi juga sernua peran, termasuk (2) dan (3) akan pula hilang bersama punahnya bahasa dan sastra daerah tersebut.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa besaran (*magnitude*) peran bahasa dan sastra daerah tergantung pada status keberadaannya, mulai dari eksistensinya, intensitas penggunaannya dan tingkat pengembangannya.



NILAI-NILAI BUDAYA DALAM SASTRA DAERAH

Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam semua sastra daerah adalah nilai-nilai yang berpihak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, terutama terkait dengan anjuran untuk berperilaku baik. Nilai-nilai tersebut sering dicerminkan melalui karakter dan tokoh utama dalam prosa rakyat atau melalui ungkapan yang diekspresikan dalam puisi-puisi rakyat. Nilai-nilai tersebut antara lain: (a) tingkah laku dan tutur kata yang baik; (b) kesetiaan; (c) semangat kebersamaan; (d) anti kekerasan; (e) keberanian untuk melakukan pembaharuan; (f) tidak mudah putus asa; (g) keberanian membela kebenaran; (h) bertanggung jawab; (i) kasih sayang; dan (j) pandai bersyukur.

Tingkah laku dan tutur kata yang baik hampir selalu merupakan ciri karakter dan setiap tokoh utama dalam cerita rakyat. Memang sering diberi warna dengan sifat-sifat tertentu yang sedikit agak keluar dari figur tokoh ideal, hal ini sering dilakukan hanya untuk mengingatkan bahwa tokoh utama tersebut tetaplah manusia biasa. Citra tokoh utama yang baik (sering nyaris sempurna) ini sering dikontraskan dengan tokoh jahat yang mempunyai karakter 180 derajat berlawanan dengan tokoh utama tersebut.

Nilai-nilai kesetiaan sering pula menjadi tema sentral dalam cerita rakyat/sastra daerah, misalnya: kesetiaan hewan peliharaan terhadap tuannya, kesetiaan bawahan terhadap majikannya, atau kesetiaan individu terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Pada dasarnya, kesetiaan yang dimaksud dalam cerita rakyat adalah kesetiaan terhadap nilai-nilai yang luhur/mulia/baik, walaupun nilai-nilai tersebut dipersonifikasikan dalam bentuk tokoh-tokoh panutan dalam cerita tersebut. Tokoh-tokoh jahat sering juga memiliki pengikut-pengikutnya, tetapi kepatuhan pengikut-pengikut tersebut lebih dilandasi oleh rasa takut yang mendalam, hutang budi, atau karena pamrih.

Semangat kebersamaan atau kesetiakawanan sosial sering menjadi pesan yang terkandung dalam cerita rakyat atau sastra daerah. Diingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, perlu berinteraksi satu dengan yang lain, dan tokoh dalam cerita yang suka menyendiri dianggap aneh. Untuk menyampaikan pesan kesetiakawanan sosial ini, dalam cerita sering dimunculkan suatu bentuk 'musuh-bersama' (*common enemy*), misalnya figur seorang penguasa yang zalim, dukun aliran hitam yang sesat, makhluk jadi-jadian yang buas dan kejam, bencana alam, atau bentuk-bentuk musuh bersama lainnya.

Nilai lain yang sering terkandung dalam sastra daerah adalah sifat anti kekerasan. Sering digambarkan bahwa tokoh utama dalam cerita tersebut walaupun sakti mandraguna tetapi selalu mengalah

walaupun diperlakukan semena-mena oleh tokoh-tokoh jahat sampai ke batas toleransi yang kadang membuat pembaca cerita tersebut geram. Tokoh baik ini biasanya baru melakukan pembalasan jika telah tersinggung harga dirinya atau jika telah menyentuh kehormatan keluarganya atau jika orang-orang yang sangat dicintainya ikut teraniaya.

Cerita rakyat atau sastra daerah umumnya sangat kental nuansa permainan perasaan dan emosi, baik berupa cerita yang diniatkan pengarangnya untuk menguras air mata pembacanya maupun yang diniatkan untuk menghibur pembaca hingga tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi, jika disimak secara cermat, maka akan diternukan pesan nilai-nilai untuk melakukan pembaharuan terhadap suatu sistem yang telah dianggap mapan. Misalnya dengan menampilkan tokoh raja (atau penguasa lainnya) yang mau menerima dan mengimplementasikan masukan atau saran dari bawahan atau rakyatnya; sedangkan pada masa itu raja berkuasa mutlak dan titah raja selalu dianggap benar. Nilai-nilai pembaharuan ini jejas dilandasi dengan logika atau pemikiran yang rasional.

Tidak mudah putus asa merupakan nilai yang sering terkandung dalam cerita rakyat atau sastra daerah. Sifat tidak mudah putus asa ini sering menjadi salah satu sifat yang dimiliki oleh tokoh utama dalam cerita rakyat. Tokoh utama tersebut di awal cerita sering ditampilkan sebagai seorang hamba sahaya yang kemudian sepanjang perjalanan hidupnya selalu dihadapkan dengan berbagai aral rintangan, tetapi kemudian di akhir cerita ditutup dengan keberhasilan tohon tersebut mencapai suatu kedudukan atau status sosial yang tinggi, misalnya menjadi menantu raja yang kemudian mewarisi tahta kerajaan.

Cerita rakyat atau sastra daerah yang bersifat religius sering dimulai dengan nilai-nilai keberanian membela kebenaran walaupun berbagai bentuk konsekuensi yang berat (secara fisik dan perasaan) harus diterima; bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan walaupun dihadapkan oleh berbagai macam bentuk godaan dan ancaman; kasih sayang sesama umat terutama dari individu atau kelompok yang secara material lebih beruntung kepada kelompok umat yang kurang beruntung; dan sifat pandai bersyukur atas segala nikmat yang kurang beruntung; dan sifat pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Esa.

Nilai-nilai baik yang dicuplik dalam tulisan ini hanyalah sebagian dari nilai-nilai baik yang terkandung dalam cerita rakyat atau sastra daerah.

STRATEGI DAN UPAYA PENINGKATAN PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Langkah paling awal yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan peran bahasa dan sastra daerah dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa adalah dengan memelihara eksistensi dari bahasa dan sastra daerah tersebut. Upaya ini tampaknya tidak akan semakin ringan di masa yang akan datang, terutama dengan semakin baiknya kualitas dan jangkauan infrastruktur telekomunikasi yang akan lebih memacu penggunaan Bahasa nasional dan bahkan Bahasa global. Interaksi social antardaerah, lintas etnis, atau antarbangsa tidak akan menggunakan bahasa daerah sebagai media komunikasinya.

Mobilitas penduduk yang semakin tinggi, baik frekuensi maupun ruang jangkauannya, menyebabkan semakin banyak individu yang secara faktual harus berinteraksi dengan individu lain dan etnis, ras, atau bangsa yang berbeda. Bahasa yang digunakan dalam proses interaksi ini tentu bukan bahasa daerah masing-masing. Dengan demikian, maka penggunaan bahasa daerah akan semakin berkurang frekuensinya.

Peran bahasa dan sastra daerah untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa hanya akan menjadi signifikan jika dilandasi dengan suatu rasa kebanggaan atas bahasa dan sastra daerah tersebut. Rasa bangga tersebut sesungguhnya tidak akan diperoleh hanya dan bahasa dan sastranya sendiri, karena bahasa dan sastra merupakan suatu media komunikasi. Rasa bangga akan lebih ditentukan oleh substansi dan nilai-nilai yang terkandung yang dikomunikasikan melalui media bahasa dan sastra daerah tersebut.

Upaya peningkatan peran bahasa dan sastra daerah dengan cara memperkenalkan atau mensosialisasikan bahasa dan sastra daerah tersebut kepada masyarakat luas di luar kelompok masyarakat penuturnya rasanya tidak akan membuahkan hasil yang berarti. Ambil contoh yang sederhana, banyak orang yang menyukai lagu-lagu berbahasa asing (dan daerah!) tetapi yang bersangkutan sesungguhnya tidak mengerti bahasa yang digunakan. Hal ini berarti orang tersebut hanya menyukai irama dari lagu tersebut bukan bahasanya. Oleh sebab itu, strategi yang lebih baik adalah menggunakan bahasa dan sastra daerah sebagai media komunikasi untuk mensosialisasikan nilai-nilai positif dan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat dan diminati masyarakat. Peran fungsional bahasa dan sastra daerah sepatutnya lebih dikedepankan dibandingkan dengan upaya sosialisasi materialnya.

PENUTUP

Tulisan ringkas ini lebih merupakan opini pribadi dan diharapkan tidak diposisikan sebagai sebuah makalah ilmiah karena penulisan makalah ini tidak dibekali dengan pemahaman yang komprehensif tentang bahasa dan sastra daerah serta tidak didasarkan atas referensi-referensi yang relevan dengan topik ini sebagaimana lazimnya *academic paper*.

**BAHASA INDONESIA
SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI
NEGARA DAN KEGIATAN KENEGARAAN**

Daulat P. Tampubolon
Lembaga Konsultasi Pendidikan Bermutu Indonesia
(LKPBI) Medan

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEGIATAN KENEGARAAN

Daulat P. Tampubolon
Lembaga Konsultasi Pendidikan Bermutu Indonesia
(LKPBI) Medan

1. PENDAHULUAN

Tanggal 28 Oktober 1928 adalah suatu tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena tanggal itu adalah hari lahirnya tiga unsur dasar eksistensi bangsa ini, yaitu: Kebangsaan Indonesia yang satu, Tanah Air Indonesia yang satu, dan bahasa Indonesia (BI) sebagai bahasa kebangsaan. Ketiganya dinyatakan dalam bentuk Sumpah Pemuda oleh para pemuda yang mewakili seluruh daerah Indonesia dalam Kongres Pemuda pada tanggal itu. Dengan demikian, pada tanggal 28 Oktober 2003 mendatang ini kita akan memperingati **Ulang Tahun Intan BI sebagai bahasa kebangsaan**. Dengan kata lain, BI sudah tiga perempat abad (75 tahun) sebagai bahasa kebangsaan dan 58 tahun sebagai **bahasa negara**. Karena itu, sudah pantas Kongres Bahasa Indonesia VIII ini diadakan secara istimewa.

Keistimewaan Kongres Bahasa Indonesia VIII ini hendaknya tidak terutama terletak pada ritus, tetapi pada substansi. Bukan seremoni yang utama, melainkan evaluasi diri (*self-assessment*). Bagaimana mutu penggunaan BI baik sebagai bahasa kebangsaan maupun bahasa negara selama ini? Pertanyaan inilah yang perlu dijawab dalam evaluasi diri. Jawaban pertanyaan ini hendaklah dijadikan dasar untuk peningkatan mutu penggunaan BI di masa selanjutnya.

Dalam kaitan evaluasi diri dimaksud, kiranya sudah tepat **Bahasa Indonesia sebagai Sarana Administrasi Negara dan Kegiatan Kenegaraan** menjadi salah satu topik Diskusi Panel dalam kongres ini, sebagaimana ditetapkan oleh Panitia. Ketepatan pilihan itu diperkuat lagi dengan tiga pertanyaan pokok yang perlu dijawab berkenaan dengan topik itu, yaitu: (1) Bagaimana mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan?

(2) Bagaimana peran instansi pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia? (3) Strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan instansi pemerintah?

Dalam makalah ini penulis akan memusatkan pembahasan pada ketiga pertanyaan di atas, setelah lebih dahulu mengemukakan beberapa pandangan teoritis sebagai dasar. Karena keterbatasan waktu, dan luasnya cakupan topik, penulis tidak berkesempatan melakukan penelitian khusus untuk makalah ini. Pengalaman dan pengamatan penulis sehari-hari adalah sumber data utama untuk pembahasan.

2. PENGGUNAAN BAHASA DAN MUTU PENGGUNAAN BAHASA

2.1 Penggunaan Bahasa

Bahasa dapat didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh organ-organ artikulasi manusia yang bersifat arbitrari dan konvensional, serta dapat diterjemahkan menjadi lambang tulisan, dan yang dipergunakan sebagai alat berpikir dan merasa, memahami pikiran dan perasaan, serta menyatakan pikiran dan perasaan dalam masyarakat (Tampubolon, 1994 ; 1996). Dengan demikian, bahasa tidak terlepas dari pikiran dan perasaan manusia. Karena itu, dari sudut pandang teori kecerdasan emosional (KE) dan kecerdasan intelektual (KI), dapat juga dikatakan bahwa bahasa, KE, dan KI manusia saling mempengaruhi (Goleman, 1997; Shapiro, 1997; Segal, 1997; Patton, 1997).

Penggunaan bahasa (*Language usage*) dapat diartikan sebagai cara-cara mempergunakan unsur-unsur dan kaidah-kaidah bahasa sesuai dengan konteks komunikasi dalam masyarakat. Dalam linguistik, penggunaan bahasa berada dalam daerah (domain) pragmatik, yang mencakup pragmalinguistik dan sosiopragmatik. Dalam sosiopragmatik umumnya ada lima faktor utama yang selalu dipertimbangkan dalam penggunaan bahasa. Dalam bahasa Inggris, kelima faktor itu disebut "**The 5 Wh's**", yaitu: **Who** (siapa pembicara), **What** (apa isi pembicaraan), **Whom** (kepada siapa atau dengan siapa berbicara), **When** (kapan berbicara), dan **Where** (di mana berbicara). Walaupun kelima faktor itu dikaitkan hanya dengan bahasa lisan dalam penjelasan di atas, kelimanya berlaku juga

pada bahasa tertulis. Pemilihan unsur-unsur bahasa, gaya bahasa, tindak tutur (*speech act*), dan penggunaannya dengan kaidah-kaidah bahasa dilakukan dengan memperhatikan kelima faktor itu. Kelimanya adalah faktor-faktor yang membentuk konteks komunikasi. Pada dasarnya, kelima faktor itulah yang menyebabkan timbulnya dan berkembangnya ragam-ragam bahasa.

Salah satu ragam bahasa yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah **bahasa politik**. Lasswell *et al* (1949 : 8) mendefinisikan bahasa politik dengan singkat, tapi jelas: "*The language of politics is the language of power. Power is decision-making*". (Bahasa politik adalah bahasa kekuasaan. Kekuasaan adalah pengambilan keputusan). Selanjutnya, dikatakan bahwa bahasa politik mencakup, antara lain, slogan politik, hukum dan perundang-undangan, sumpah atau janji jabatan, dan berbagai wacana politik serta administrasi negara. Dengan demikian, apabila kita berbicara tentang Bahasa Indonesia sebagai Sarana Administrasi Negara dan Kegiatan Kenegaraan, sebagaimana topik Diskusi Panel ini, maka kita akan membicarakan penggunaan BI sebagai bahasa politik. Dalam kaitannya dengan kelima faktor tersebut terdahulu, dalam bahasa politik, yang merupakan *What* ialah berkenaan dengan kekuasaan negara dan pengambilan keputusan dengan berbagai aspek kenegaraan terkait dan yang merupakan *Who* dan *Whom* ialah pihak pemegang kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan pemberi kekuasaan (rakyat) secara bergiliran.

Pada Pendahuluan telah disinggung tentang bahasa kebangsaan dan bahasa negara. Samakah makna kedua istilah ini dengan bahasa politik? Pada dasarnya, bahasa kebangsaan dan bahasa negara adalah sama. Namun, dalam konteks Indonesia terdapat perbedaan dari segi historis. Bahasa kebangsaan, dalam hal ini BI, jauh lebih dahulu ada (28 Oktober 1928) dari pada bahasa negara (17 Agustus 1945). Dengan kata lain, timbulnya bahasa kebangsaan, sejalan dengan mantapnya konsep kebangsaan sedangkan bahasa negara ada setelah adanya undang-undang dasar di mana bahasa bersangkutan telah diundangkan. Perbedaan antara bahasa negara dan bahasa politik terutama terletak pada faktor *What*. Bahasa negara mempunyai *What* yang lebih luas dari pada

bahasa politik. Dapat juga dikatakan bahwa bahasa politik adalah bagian dari bahasa negara.

Perkembangan dan ciri-ciri bahasa politik umumnya bergantung pada kecenderungan atau dominasi ideologi tokoh-tokoh politisi yang berkuasa dalam setiap zaman atau periode. Dalam konteks perkembangan di Indonesia sejak permulaan kemerdekaan, kita sudah mengalami tiga periode politik penting, yaitu: **Periode Soekarno** (disebut juga Periode Orde Lama), **Periode Suharto** (disebut juga Periode Orde Baru), dan **Periode Reformasi** (setelah jatuhnya Suharto). Bahasa politik dalam masing-masing periode itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda.

2.2 Mutu Penggunaan Bahasa

Mutu dapat diartikan sebagai paduan atribut-atribut produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (Rinehart 1993 ; Tampubolon 1999 : 9; 2001 : 108). Dalam hal bahasa, produk ialah bahasa (ragam bahasa) yang dipergunakan oleh seseorang atau lembaga (*institution*) dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis. Pelanggan ialah *Whom*, yaitu, pendengar dan pembaca. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa pelanggan, dalam hal ini, terutama pendengar, dapat juga memproduksi bahasa (pembicara) sendiri. Hal ini terjadi dalam apa yang disebut oleh Vigotsky (1981) sebagai *inner speech* (berbicara pada diri sendiri terutama dalam hati). Dengan demikian, **mutu penggunaan bahasa dapat diartikan sebagai paduan ciri-ciri bahasa yang dipergunakan yang sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pembaca.**

Apa ciri-ciri bahasa yang dipergunakan, yang sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pembaca? Kebutuhan di sini mencakup terutama ide atau makna yang terkandung dalam bahasa itu, gaya, dan tingkat kesulitan memahami bahasa itu. Dalam menentukan ciri-ciri dimaksud, kebutuhan tersebut yang terutama harus diperhatikan, dan ini tentu juga berkaitan erat dengan *The 5 Wh's* yang dikemukakan terdahulu. Berdasarkan semua hal tersebut, secara umum ciri-ciri pokok bahasa yang dipergunakan adalah yang berikut.

a. Relevansi Semantik

Secara esensial, relevansi semantik ialah kesesuaian dan signifikansi ide atau makna yang terkandung dalam bahasa yang dipergunakan. Apakah ide (informasi) itu sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pembaca? Apakah ide itu perlu baginya? Seberapa signifikan ide itu? Dalam hubungan ini, sudah tentu tercakup pertimbangan usia, tingkat pendidikan, latarbelakang, dan bidang kehidupan pendengar atau pembaca bersangkutan.

Faktor-faktor lain yang terimplikasi dalam relevansi semantik ialah apa yang disebut gejala-gejala kematian bahasa (Tampubolon 1999), terutama **represi linguistik** dan **monopoli semantik**. Di samping itu, juga terimplikasi faktor-faktor positif seperti **situasi menang-menang, demokrasi, dan keseimbangan KE dan KI**. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa relevansi semantik merupakan ciri utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan mutu penggunaan bahasa.

b. Akuntabilitas Gramatikal

Akuntabilitas gramatikal pada dasarnya adalah ketepatan penggunaan kaidah-kaidah tata bahasa, termasuk kaidah-kaidah pengujaran dalam bahasa lisan, dan kaidah-kaidah ejaan dalam bahasa tertulis untuk menyatakan ide. Pertanyaan pokok ialah: Apakah bahasa yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan (terpercaya) dari segi tata bahasa? Karena tata bahasa mengandung unsur-unsur logika seperti proposisi (subjek-predikat-objek atau argumen predikat), ketunggalan—kejamakan, dan diterangkan—menerangkan, maka akuntabilitas gramatikal juga mengimplikasikan **logika-logika bahasa**.

Berkaitan dengan logika bahasa, khususnya dalam bahasa tertulis, ada dua jenis struktur logika yang perlu diperhatikan, yaitu: **struktur deduktif**, dan **struktur induktif**. Keduanya didasarkan pada dua cara (metode) berpikir, yaitu: cara berpikir deduktif dan induktif. Cara berpikir deduktif ialah prosedur berpikir yang mulai dari hal yang umum dan mendasar, diikuti oleh uraian atau penjelasan. Sebaliknya, cara berpikir induktif adalah prosedur berpikir

6

yang dimulai dengan uraian atau deskripsi dan diakhiri dengan kesimpulan (hal yang umum dan mendasar). Kedua jenis struktur logika tersebut perlu diperhatikan dalam bahasa tertulis, khususnya dalam bentuk paragraf. Ada paragraf yang berstruktur deduktif dan ada yang berstruktur induktif jika penulis mempergunakan logika bahasa yang benar. Perlu diperhatikan bahwa logika bahasa berkaitan erat dengan **pengendalian rasio** (KI).

c. Efisiensi Leksikal

Efisiensi leksikal ialah ketepatan seleksi dan kehematan penggunaan kata-kata. Pertanyaan pokok dalam hal ini ialah kata atau kata-kata mana yang paling tepat, tapi tidak boros, dipergunakan untuk menyatakan ide bersangkutan agar cepat dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca? Apakah perlu dengan sebanyak mungkin kata? Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan bahwa dalam era informasi dan globalisasi yang sedang dan akan terus berkembang, kecenderungan untuk **simplifikasi** dan **spesialisasi** bahasa juga berkembang. (Tampubolon 1996). Kalau dapat dinyatakan dengan satu kata, mengapa harus dengan banyak kata? Inilah kecenderungan yang semakin berkembang, terlebih-lebih di bawah pengaruh teknologi komputer. Dalam arti simplifikasi juga termasuk struktur ejaan.

d. Efektivitas Ekspresi

Efektivitas ekspresi ialah ketepatan penggunaan gaya bahasa, tindak tutur (*speech act*), dan intonasi (lagu suara), serta bahasa tubuh (*body language*) untuk menyatakan ide bersangkutan sehingga dengan cepat dan tepat mempengaruhi pikiran dan perasaan pendengar atau pembaca. Intonasi dan bahasa tubuh tentu hanya dipergunakan dalam bahasa lisan. Gaya bahasa, tindak tutur, intonasi, dan bahasa tubuh manakah yang paling tepat dipergunakan agar ide bersangkutan mudah dipahami dan dirasakan oleh pendengar atau pembaca? Dengan demikian, efektivitas ekspresi mengimplikasikan **adanya pengendalian rasio** (KI) dan **emosi** (KE).

Keempat ciri pokok di atas dapat juga disebut ciri-ciri (atribut-atribut) mutu penggunaan bahasa. Ciri-ciri itu dapat dipergunakan sebagai tolok ukur, atau setidaknya sebagai indikator, mutu penggunaan bahasa. Paduan keempat ciri itu, dengan tingkat tertentu, ada pada setiap bahasa (ragam bahasa) yang dipergunakan. Jika paduan keempat ciri itu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pembaca, maka bahasa yang dipergunakan dikatakan bermutu.

Akhirnya, perlu digarisbawahi betapa pentingnya pemahaman yang tepat tentang konsep “pelanggan” dalam berkomunikasi dengan bahasa. Pelanggan pada dasarnya adalah pihak yang dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Pada kesesuaian itulah terdapat paduan keempat ciri di atas. Sering terjadi bahwa pembicara tidak memperhatikan kebutuhan pendengarnya (pelanggannya), sehingga pendengarnya bosan. Penulis juga sering demikian sehingga pembacanya (pelanggannya) bosan, bahkan tak mau, membaca tulisan itu. Penonjolan diri dalam berbicara atau dalam tulisan pada umumnya tidak sesuai dengan paduan keempat ciri di atas, karena itu bahasa yang dipergunakan dengan kecenderungan yang demikian umumnya tidak bermutu.

3. MUTU PENGGUNAAN BI SEBAGAI BAHASA POLITIK

Pada bagian 2.1 terdahulu telah dijelaskan bahwa bahasa politik adalah bahasa kekuasaan yang mencakup berbagai aspek pengambilan keputusan kenegaraan, termasuk antara lain hukum dan perundang-undangan, administrasi negara, dan wacana politik. Pembahasan berikut adalah berkenaan dengan penggunaan BI sebagai bahasa politik, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan umumnya.

3.1 Dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara

Administrasi negara meliputi berbagai aspek penyelenggaraan negara yang pada pokoknya terdiri dari: (1) hukum dan perundang-undangan, dan (2) korespondensi atau

surat-menyurat. Jelas bahwa bahasa yang dipergunakan dalam kedua aspek pokok itu terutama adalah bahasa yang tertulis formal.

Dilihat dari keempat ciri mutu penggunaan bahasa yang dikemukakan pada bagian 2.2, secara umum dapat dikatakan bahwa mutu penggunaan BI dalam penyelenggaraan administrasi negara sejak permulaan kemerdekaan meningkatkan secara berkelanjutan. Sekadar ilustrasi, berikut adalah kutipan dari BI dalam hukum dan perundang-undangan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.

Tabel 1
Bahasa Politik Orde Lama,
Orde Baru, dan Orde Reformasi
dalam Hukum dan Perundang-undangan

| Orde Lama | Orde Baru | Orde Reformasi |
|---|--|--|
| 1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan . | 1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perike-manusiaan dan perikeadilan . | 1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan . |
| 2. Présid n memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. | 3. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. | 2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. |

| | | |
|---|---|---|
| <p>3. Présid n dan Wakil Présid n memegang djabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.</p> | <p>3. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.</p> | <p>3. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat di-pilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.</p> |
| <p>4. Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dipahamkan, kalau hanya dibatja tekstnja saja. Untuk dapat mengerti sungguh-sungguh maksudnja Undang-undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempeladjar djuga terdjadinja tekst itu, harus diketahui keterangan-keterangan dan djuga harus diketahui dalam suasana apa tekst itu dibikin.</p> | <p>4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu dituangkan dalam rumusan yang sederhana dan jelas, yang mencerminkan suara hati nurani manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan mampu secara terus menerus menggelorakan semangat serta memberikan keyakinan dan harapan akan hari depan yang lebih baik, sehingga Pedoman itu dapat mudah diresapi, dihayati, dan diamalkan.</p> | <p>4. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.</p> |
| <p>No. 1 s/d 4 dari Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, oleh Prof. M. Yamin, SH).</p> | <p>(No. 1 s/d 3 UUD 1945; No. 4 dari TAP-TAP MPR 1978).</p> | <p>(No. 1 s/d 3 dari Amanden UUD 1945, Tahun 1999; No. 4 TAP-TAP MPR 1998).</p> |

Dari kutipan-kutipan di atas dapat dilihat hal-hal berikut :

a. Dari Segi Relevansi Semantik

Dari segi relevansi semantik secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan BI dalam kutipan-kutipan di atas cukup baik. Di samping itu, terlihat juga adanya peningkatan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya sistem politik. Semasa Orde Lama, kekuasaan Presiden terasa sangat besar (No. 2), dan dapat dipilih berulang-ulang lebih dua periode (No. 3). Hal ini dipertahankan pada masa Orde Baru. Malah dalam praksis, keanggotaan dan penentuan anggota-anggota MPR diatur sedemikian rupa sehingga pasti memenangkan Presiden yang sedang menjabat. Tetapi, pada Orde Reformasi, keadaan itu diubah ke arah yang lebih demokratis dan terbuka (No. 2 dan 3).

b. Dari Segi Akuntabilitas Gramatikal

Ada tiga perkembangan yang menarik berkenaan dengan akuntabilitas gramatikal dalam kutipan-kutipan di atas, yaitu: penggunaan kaidah-kaidah ejaan, afiksasi, dan logika bahasa. Pada Orde Lama, terlihat kecenderungan mempergunakan ejaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah fonetis. Hal ini terlihat, antara lain, dari ejaan pada **Présid n** dan **Déwan**. Pada Orde Baru, hal itu diubah menjadi ejaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah fonemis, sehingga lebih efisien. Pada Orde Reformasi, kaidah-kaidah fonemis itu dipertahankan.

Dalam hal penggunaan afiksasi pada Orde Lama, ada dua gejala yang perlu diperhatikan, yaitu : penggunaan **-kan** pada **dipahamkan** dan **-nja** pada **maksudnja Undang-undang Dasar**. Penggunaan akhiran **-kan** tak tepat; yang tepat ialah akhiran **-i**. Penggunaan **-nja** pada frase itu tak perlu. Penggunaan **-nja** tersebut mungkin karena pengaruh bahasa Belanda. Pada Orde Baru Penggunaan kedua afiks itu sudah diperbaiki sebagaimana dapat dilihat pada kata yang digarisbawahi (No. 4). Pada Orde Reformasi erbaikan itu dipertahankan (No. 4).

Berkenaan dengan logika bahasa, yang menarik ialah tentang kejelasan proposisi yang terkandung dalam kalimat. Pada masa Orde Lama, kutipan No. 4 terdiri dari 42 kata, semuanya dalam dua kalimat. Proposisi masing-masing kalimat itu mudah ditentukan. Kutipan No. 4 pada Orde Baru terdiri dari 51 kata, semuanya dalam satu kalimat. Di samping itu, kalimat yang terdiri dari 51 kata itu adalah merupakan suatu paragraf. Dan, struktur paragraf ini tidak sesuai dengan struktur paragraf yang dikemukakan pada 2.2 b. Akibatnya, tidak mudah menemukan proposisi kalimat itu dengan tepat. Pada Orde Reformasi, kutipan No. 4 terdiri dari 45 kata, dan terdapat dalam tiga kalimat. Karena itu, proposisi setiap kalimat mudah ditemukan dengan tepat. Ketepatan dan kecepatan menemukan proposisi berpengaruh signifikan pada relevansi semantik. Dalam bahasa politik Orde Baru ada gejala-gejala perekeyasaan semantik sebagaimana telah disinggung pada bagian 2.2a.

c. Dari Segi Efisiensi Leksikal

Dalam hal efisiensi leksikal, ada dua aspek yang perlu diperhatikan pada kutipan-kutipan di atas, yaitu : struktur ejaan dan jumlah kata dalam satu kalimat. Pada Orde Lama, struktur ejaan kurang efisien karena didasarkan pada kaidah-kaidah fonetis. Hal ini telah diperbaiki pada orde Baru dengan adanya Ejaan Baru yang ditetapkan oleh Pusat Bahasa, dan yang didasarkan pada kaidah-kaidah fonemis. Pada Orde Reformasi, perbaikan itu dipertahankan.

Berkenaan dengan jumlah kata dalam satu kalimat, terlihat kecenderungan meningkat pada Orde Baru, sebagaimana disebut di atas. Namun, karena kutipan di atas masih terbatas, belum dapat diambil sebagai kesimpulan umum.

d. Dari Segi Efektivitas Ekspresi

Dari segi efektivitas ekspresi, penggunaan BI dalam kutipan-kutipan di atas dapat dikatakan cukup baik secara umum. Namun, dalam hal gaya bahasa, khususnya berkenaan dengan nuansa demokrasi dan keterbukaan, perlu diperhatikan bahwa pada Orde Reformasi lebih terasa.

Hal ini akan lebih jelas dalam pembicaraan tentang wacana politik pada bagian berikut.

Sebagaimana disebut pada permulaan, kutipan-kutipan di atas adalah sekadar gambaran tentang perkembangan penggunaan BI dalam penyelenggaraan administrasi negara sejak permulaan kemerdekaan (Orde Lama). Perkembangan itu menunjukkan peningkatan mutu yang berkelanjutan meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan pada keempat ciri mutu yang telah dikemukakan. Kutipan-kutipan di atas adalah berkenaan dengan hukum dan perundang-undangan. Pengalaman dan pengamatan penulis sejak tahun 1946 sewaktu masih belajar di Sekolah Guru B (SGB), terutama sejak tahun 1952 sewaktu mulai menjadi guru, juga sesuai dengan perkembangan tersebut. Dan, perkembangan demikian juga terdapat pada penggunaan BI dalam surat-menyurat. Mutu penggunaan BI dalam surat-menyurat umumnya bahkan lebih baik, karena sudah ada struktur-struktur standar, berkaitan dengan keempat ciri mutu tersebut terdahulu.

3.2 Dalam Wacana Politik

Wacana politik (*political discourse*) ialah percakapan dalam berbagai bentuk berkenaan dengan penyelenggaraan negara (pemerintahan). Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa politik baik lisan maupun tertulis. Sebagaimana halnya dengan penggunaan BI dalam penyelenggaraan administrasi negara, mutu penggunaan BI dalam wacana politik umumnya juga meningkat secara berkelanjutan sejak permulaan kemerdekaan. Dalam membicarakan bahasa politik umumnya, ada lima kategori politik yang perlu diperhatikan, yaitu, **mitos politik**, **doktrin politik**, **miranda**, **rumus politik**, dan **semboyan politik** (Tampubolon 1999). Kelima kategori inilah yang diamati dari segi keempat ciri mutu terdahulu dalam membicarakan mutu penggunaan BI dalam wacana politik.

Mitos politik ialah suatu ide politik yang sepenuhnya diyakini oleh suatu rezim politik sebagai kebenaran, walaupun belum tentu benar. Pada masa Orde Lama, misalnya, **nasionalisme** atau **kebangsaan** dan **demokrasi terpimpin** adalah mitos politik. Pada masa Orde Baru, mitos politik antara

lain ialah ***Demokrasi Pancasila, keamanan nasional, dan pembangunan nasional***. Dan pada Orde Reformasi, mitos politik antara lain ialah ***reformasi, demokrasi, transparansi, dan desentralisasi***.

Doktrin politik pada dasarnya adalah visi dan misi suatu bangsa dan negara. Doktrin politik dapat tetap dan dapat juga berubah apabila orde atau rezim berganti. Doktrin politik umumnya tersusun dalam bentuk proklamasi dan pendahuluan suatu konstitusi. Doktrin politik bangsa dan negara Indonesia ialah **Proklamasi Kemerdekaan Indonesia** yang diucapkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditandatangani oleh Soekarno – Hatta, dan juga **Pembukaan UUD 1945**, di mana terdapat visi dan misi bangsa dan negara Indonesia. Doktrin politik tersebut belum berubah hingga Orde Reformasi sekarang ini.

Miranda adalah pernyataan politik yang membangkitkan semangat, emosi, rasa bangga, dan keyakinan serta loyalitas tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kategori politik ini biasanya sering dipergunakan dalam pidato-pidato politik, terutama oleh seorang orator seperti Bung Karno. Ucapan beliau seperti **“Ini dadaku, mana dadamu”**, **“To hell with your aids”**, dan **“Dengan Proklamasi dan Konstitusi Proklamasi, maka berputarlah roda-djantera Revolusi merebahkan kolonialisme dan imperialisme, dan bangunlah kedaulatan Indonesia”** adalah miranda. Pada masa Orde Baru, miranda yang biasa terdengar antara lain ialah **“Demi Persatuan dan kesatuan bangsa”**, **“Tinggal landas pembangunan”**, **“Demi keamanan dan ketertiban masyarakat”**, dan **“Kesetiakawanan Sosial”**. Dalam Orde Reformasi yang sedang berkembang, miranda yang sering terdengar antara lain ialah **“Rakyat berhak menyatakan pendapatnya dengan bebas”**, **“Masyarakat ikut serta mengawasi pemerintah”**, **“Hak azasi manusia harus dihormati”**.

Rumus politik adalah ketentuan-ketentuan politik yang biasanya tersusun dalam bentuk undang-undang, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan penyelenggaraan negara. UUD 1945 dan berbagai rumusan hukum dan perundang-undangan sebagaimana dibicarakan pada bagian 3.1 adalah rumusan politik.

Semboyan politik atau slogan politik adalah pernyataan yang terdiri dari kata, frase, atau kalimat pendek tentang cita-cita, pandangan atau filosofi hidup, atau aspirasi, yang bernuansa agak keras dan tegas. Pada masa Orde Lama, khususnya di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, di antara semboyan-semboyan politik yang populer ialah **“Merdeka atau mati”**, **“Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh”**, dan **“Patah tumbuh hilang berganti”**. Di antara semboyan-semboyan politik yang biasa dipergunakan semasa Orde Baru ialah **“Memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila”**, **“Ganyang Komunis”**, **“Memasyarakatkan Pancasila dan mem-Pancasilakan masyarakat”**, dan **“Kebebasan yang bertanggung-jawab”**. Pada masa Orde Baru Reformasi, di antara semboyan-semboyan politik yang biasa dipergunakan ialah **“Meperbaharui tatanan politik”**, **“Peningkatan mutu kehidupan”**, **“Menegakkan hak asasi manusia”**, **“Menghapuskan KKN”**. Dan **“Menuju masyarakat madani (*civil society*)”**.

Dari data-data bahasa politik di atas dan bedasarkan pengalaman dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya bahasa politik berubah sesuai dengan pergantian orde atau rezim politik. Namun, doktrin politik tidak berubah. Rumus politik, khususnya UUD 1945, hingga taraf tertentu juga berubah sebagaimana dapat dilihat dalam Amandemen UUD 1945 yang dibuat oleh Orde Reformasi pada tahun 1999. Perubahan yang paling menarik ialah dalam miranda dan semboyan politik. Pada masa Orde Lama, kedua kategori ini secara semantik pada umumnya membawa pesan utama memperkokoh **nasionalisme** serta **kesatuan dan persatuan bangsa**. Pada masa Orde Baru pesan utama yang dibawa oleh kedua kategori itu ialah **keamanan dan ketertiban** serta **pembangunan nasional**. Dan pada Orde Reformasi pesan utama yang dibawa oleh keduanya ialah **demokrasi, transparansi, dan hak asasi manusia**.

Perubahan-perubahan dalam penggunaan kategori-kategori politik di atas jelas menunjukkan situasi yang dihadapi dan sistem politik yang dianut oleh orde politik bersangkutan. Perubahan-perubahan demikian umumnya terjadi di negara-negara sedang berkembang. Tetapi, di negara-negara yang sudah maju, jarang, bahkan dapat dikatakan tak terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Di Amerika Serikat, misalnya,

walaupun kekuasaan politik berpindah dari tangan Partai Republik ke tangan Partai Demokrat, perubahan dalam penggunaan kategori-kategori politik seperti di atas tidak banyak terjadi. Bahasa politik tak banyak berubah. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa kedewasaan (kematangan) suatu bangsa dapat juga dilihat dari kemantapan (stabilitas) bahasa politik yang dipergunakan oleh bangsa itu.

Jika dilihat dari segi keempat ciri mutu penggunaan bahasa yang dikemukakan terdahulu, mutu penggunaan BI dalam wacana politik secara umum dapat dikatakan baik. Namun, perlu diperhatikan beberapa kelemahan mendasar yang terjadi pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi.

Dalam bahasa politik Orde Baru, ada tiga kelemahan mendasar, yaitu, **represi linguistik**, **monopoli semantik**, dan **gaya topeng** (Tampubolon, 1999: 6, 21, 24). Represi linguistik ialah penekanan dan pembatasan atas kebebasan rakyat menyatakan pikiran dan perasaannya dengan bahasa yang dilakukan oleh penguasa dengan memperlambat bahasa. Dengan kata lain, bahasa politik yang dipergunakan oleh penguasa sering mengandung makna yang “menyebabkan rasa takut” pada rakyat. Sekedar contoh adalah kalimat-kalimat berikut :

- (1) Ada kelompok yang **dicurigai** menginginkan terciptanya kekacauan, dengan tujuan dan kepentingan politik tertentu.
- (2) Unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat akhir-akhir ini dapat dikategorikan tindakan **subversif**.

Kata **dicurigai** dan **subversif** pada masing-masing kalimat itu mengandung makna yang menimbulkan rasa takut pada masyarakat untuk menyatakan pikiran dan perasaannya baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

Monopoli semantik ialah penguasaan atas pemaknaan (pemberian arti atau penafsiran) kosa kata, kalimat, dan wacana yang mengandung ide-ide politik hanya oleh penguasa (elit kekuasaan) saja, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh rakyat. Sebagai contoh, kata **membina** pada dasarnya mengandung komponen-semantik (makna) **AKSI**, **PENGALAMAN**, **PENINGKATAN**. Ketiga komponen itu juga mengandung konotasi **PENGENDALIAN**. Dalam kata **pembinaan**, yang sangat sering dipergunakan semasa Orde Baru, ketiga komponen semantik itu juga terkandung, tetapi dalam praksis yang paling

diutamakan oleh penguasa adalah PENGENDALIAN. Dan, ini dipatuhi oleh masyarakat.

Gaya topeng ialah gaya bahasa yang mengutamakan penghalusan semantik secara berlebihan sehingga semua kedengaran dan terasa baik, tetapi kebenaran yang sesungguhnya tertutupi. Mungkin gaya topeng dapat juga diartikan sebagai "eufieisme berlebihan". Kalimat-kalimat berikut adalah sebagai contoh penggunaan gaya topeng semasa Orde Baru :

- (1) Pemerintah terus mengusahakan **anggaran berimbang**.
- (2) Berbagai tarif terpaksa **disesuaikan** sehubungan dengan krisis moneter yang berkepanjangan.

Frase *anggaran berimbang* terasa menyenangkan pikiran dan perasaan, karena pendapatan sesuai dengan belanja. Tetapi kebenaran yang tersembunyi di balik frase yang indah itu ialah *utang luar negeri* yang jumlahnya hampir 60% dari seluruh anggaran. Demikian juga **disesuaikan** terasa baik. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya ialah *tarif dinaikkan*.

Represi linguistik dan monopoli semantik tidak sesuai dengan relevansi semantik. Dan, gaya topeng, selain bertentangan dengan relevansi semantik, juga tak sesuai dengan efektivitas ekspresi. Berdasarkan kenyataan-kenyataan ini dapat dikatakan bahwa mutu penggunaan BI sebagai bahasa politik dalam masa Orde Baru kurang baik.

Pada masa Orde Reformasi yang sedang belangsung dewasa ini, ketiga kelemahan dasar tersebut di atas umunya tidak tampak lagi. Kenyataan ini adalah suatu peningkatan mutu penggunaan BI dalam wacana politik. Hasil utamanya ialah bahwa rakyat juga, baik secara individu maupun kelompok, sudah berani menyatakan pikiran dan perasaannya secara terbuka. Namun, kelemahan mendasar yang masih sering terlihat dalam bahasa politik Orde Reformasi ialah dalam logika bahasa. Kalimat-kalimat berikut adalah sekedar contoh 1) :

- (1) **Dengan** selesainya irigasi itu **meningkatkan** produksi padi di daerah itu.
- (2) **Akibat** ledakan tersebut **menyebabkan** banyak korban.
- (3) **Beberapa bagian-bagian** dari bom ditemukan.

¹⁾ Kalima-kalimat ini diucapkan oleh pejabat-pejabat negara dalam wawancara diberbagai televisi.

- (4) Pemerintah akan berterima kasih bila ada **suatu pemikiran-pemikiran** yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pada (1), kelemahan logika bahasa ialah tidak adanya **proposisi** (subjek, predikat) yang jelas. Pada (2), kelemahan logika bahasa ialah **kontroversi makna** karena penggunaan kata *akibat* dan *menyebabkan*. Dan pada (3) dan (4), kelemahan logika bahasa ialah **miskonsepsi tentang singularitas-pluralitas**. Pada (3) terjadi **pluralitas berlebihan** karena penggunaan kata *beberapa* yang diikuti oleh *bagian-bagian*. Pada (4), terjadi **kontradiksi singularitas-pluralitas** karena penggunaan kata "suatu" yang diikuti oleh *pemikiran-pemikiran*. Kelemahan dalam logika bahasa adalah kelemahan dalam akuntabilitas gramatikal. Karena itu, jika dilihat dari data-data kelemahan di atas, mutu penggunaan BI dalam wacana politik Orde Reformasi masih belum cukup baik.

Berdasarkan pembahasan pada 3.1 dan 3.2 di atas dapat diambil kesimpulan berikut.

- a. BI sudah memiliki unsur-unsur linguistik yang cukup dan mantap sebagai bahasa modern sehingga mampu dipergunakan sebagai bahasa politik, baik dalam penyelenggaraan administrasi negara maupun dalam berbagai wacana politik.
- b. Bahasa politik, dalam arti tingkat intensitas dan ekstensitas penggunaan masing-masing kategori politik, selalu berubah apabila orde politik berganti. Perubahan demikian umumnya terjadi di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Di negara-negara maju, perubahan demikian hampir tak terjadi. Dengan demikian, sifat sistem kekuasaan dan tingkat kedewasaan perpolitikan dalam suatu negara dapat dilihat dari bahasa politiknya.
- c. Mutu penggunaan BI sebagai bahasa politik, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi negara dan kegiatan kenegaraan, secara umum dapat dikatakan baik dan terus meningkat sejak permulaan kemerdekaan. Namun, dalam setiap orde politik masih terdapat kelemahan-kelemahan mendasar tertentu, baik dari segi relevansi semantik dan akuntabilitas gramatikal maupun efisiensi leksikal dan efektivitas ekspresi.

- d. Sebab akar dari kelemahan-kelemahan mendasar dalam penggunaan BI tersebut ialah: (1) rendahnya mutu pendidikan nasional, termasuk mutu pengajaran BI; (2) belum meratanya penggunaan BI di seluruh daerah sehingga masih banyak terjadi interferensi bahasa daerah; dan (3) belum tersedianya buku-buku referensi yang cukup kaya dan terpercaya, khususnya kamus BI.

4. STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN BI

Dalam setiap usaha peningkatan mutu, yang pertama harus dilakukan ialah menemukan masalah pokok dan sebab akar (akar) masalah itu. Sesudah masalah pokok dan sebab akarnya ditemukan, maka diusahakanlah cara mengatasinya yang paling tepat. Yang sering terjadi ialah bahwa bukan sebab akar yang diatasi sehingga masalah yang sama akan timbul lagi. Dalam usaha peningkatan mutu penggunaan BI, demikian juga strateginya.

4.1 Peningkatan Mutu Pendidikan

Masyarakat umumnya sudah mengetahui bahwa **masalah pokok** pendidikan nasional ialah mutunya yang sangat rendah. Dalam pendidikan dimaksud sudah tentu termasuk pendidikan BI (dalam arti pengajaran BI), yang masih belum diketahui dengan jelas ialah jawaban atas pertanyaan : **Apa akar** (sebab akar) masalah pokok pendidikan nasional itu? Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis, ada lima akar masalah pendidikan nasional kita, dan kelimanya belum diatasi secara sungguh-sungguh hingga sekarang. Jika ingin meningkatkan mutu pendidikan nasional, kelima akar masalah itu harus diatasi dengan serius. Secara garis besar kelimanya diuraikan di bawah ini.

a. Komitmen Nasional untuk Pendidikan Sangat Lemah

Kata komitmen mengandung arti: (1) paham dan sadar akan sesuatu yang terbaik sebagai kebutuhan utama; (2) berani mengambil keputusan untuk mencapainya; (3) berjanji kepada diri sendiri, masyarakat dan Tuhan untuk melakukan

keputusan itu, dan (4) berani melaksanakan keputusan itu dengan jujur serta sepenuh dan setulus hati.

Komitmen nasional dalam arti di ataslah yang sangat lemah selama ini, terutama di pihak legislatif dan eksekutif. Dalam praksis selama ini, kelihatannya arti komitmen hanya No. (1) dan (2). Hal ini dapat dilihat, misalnya, dari kenyataan bahwa sudah diputuskan oleh legislatif bahwa anggaran pendidikan harus 20 %, bahkan dicantumkan dalam Amandemen UUD 1945, tetapi dalam kenyataannya anggaran pendidikan tak sampai 5 %. Dan yang paling tak terlaksana ialah arti No. (4).

Benarkah tidak cukup dana negara untuk pendidikan? Jawaban pertanyaan ini ialah ada tidaknya komitmen nasional yang kuat. Jika ada komitmen nasional yang kuat, pasti ada dana yang cukup. Dengan komitmen nasional yang kuat, para pejabat negara, **terutama pejabat tinggi** baik legislatif maupun eksekutif dari pusat hingga daerah, harus mampu menunjukkan **keteladanan dalam kejujuran pelaksanaan tugas, penghematan penyelenggaraan negara, dan kesederhanaan hidup** sehari-hari. Rakyat sungguh rindu melihat dan akan sangat menghargai, pejabat tinggi, terutama yang sudah mempunyai, menyumbangkan gajinya dan berbagai fasilitas dinasnya untuk pendidikan. Alangkah agungnya para pejabat tinggi yang bersedia hanya memakai mobil kijang yang sederhana sebagai mobil dinasnya agar dana untuk mobil mewah itu dapat menjadi dana untuk pendidikan. Keteladanan seperti itu dari pusat hingga daerah di semua departemen, lembaga, dan BUMN, akan menghemat dana yang jumlahnya sangat besar dan akan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan. Di samping itu, kejujuran dalam pengelolaan pajak negara dan sumber-sumber dana negara lainnya akan meningkatkan pendapatan negara. Itulah komitmen nasional yang kuat!

b. Pandangan Filosofis Pendidikan Ketinggalan

Apa pendidikan? Apa produk pendidikan? Apa mutu pendidikan? Itulah tiga pertanyaan filosofis pokok yang perlu dijawab tentang pendidikan.

Selama ini pendidikan diartikan dengan berbagai cara. Dikatakan, misalnya, pendidikan adalah proses

pendewasaan manusia. Pemahaman seperti itu tentu tidak salah. Tapi untuk menghadapi abad ke 21 atau era globalisasi dan informasi, pemahaman itu perlu direformasi agar lebih membumi. Dalam paradigma baru, pendidikan diartikan sebagai jasa atau pelayanan, yang berupa proses-proses bersifat sekuler (Rinehart 1993; Tampubolon 2001; 2003). Produk pendidikan (dalam arti lembaga pendidikan atau sekolah) selama ini diartikan sebagai lulusan. Tapi, apakah hanya sekolah yang membuat peserta didik lulus, terlebih-lebih dalam era informasi? Jika jujur, jawabannya tentu tidak. Karena itu, dalam paradigma baru, produk pendidikan adalah jasa pendidikan yang umumnya berupa proses-proses pelayanan. Mutu pendidikan selama ini diartikan sebagai daya serap peserta didik atas materi ajar, yang diindikasikan dengan nilai-nilai ujian. Tapi ternyata sangat sering para lulusan tak diterima di dunia kerja karena kemampuannya tak sesuai. Dalam paradigma baru, mutu diartikan sebagai kesesuaian paduan atribut-atribut mutu produk (jasa) pendidikan dengan kebutuhan para pelanggan pendidikan, terutama para peserta didik dan dunia kerja. Pengertian mutu inilah yang menjadi dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang belakangan ini diperkenalkan, tapi banyak orang bingung karena tak tahu dasar filosofisnya.

c. Sistem Pemberdayaan Guru Sangat Lemah

Sistem pemberdayaan guru mempunyai tiga subsistem: (1) sub-sistem pendidikan/pelatihan pra-jabatan; (2) sub-sistem pendidikan/pelatihan dalam--jabatan; dan (3) subsistem kesejahteraan.

Ketiga subsistem itu sangat lemah dalam sistem pendidikan nasional. Lembaga Pendidikan Guru (LPG) sangat kecau (goyah) belakangan ini. Ada "Mantan IKIP", tapi masih ada IKIP, FKIP, dan STKIP. Di samping itu, masih ada PGSD dan PGSM. Mana lembaga yang standar untuk menghasilkan guru, untuk tiap jenjang pendidikan termasuk guru BI? Dapat dikatakan tak ada. Tapi, yang paling lemah lagi ialah sub-sistem kesejahteraan. Gaji guru di Indonesia termasuk terendah di dunia.

d. Sistem Manajemen Pendidikan yang Sentralistis dan Birokratis

Pada zaman Orde Baru, hampir semua kegiatan kenegaraan, termasuk pendidikan, dikelola di pusat. Setelah UU Otonomi daerah pengelolaan ini pada dasarnya sudah berubah. Tetapi, menurut pengalaman dan pengamatan penulis sifat dan sikap para pejabat masih seperti pada masa Orde Baru. Dengan kata lain, sentralisasi dan birokrasi pada umumnya hanya berpindah dari pusat ke kabupaten dan kota. Para kepala sekolah dan guru di sekolah masih tetap bersifat menunggu keputusan atasan, belum mampu dan berani berprakarsa sesuai dengan prinsip-prinsip MBS.

e. Sistem Pengajaran yang Paternalistik

Sejalan dengan pandangan pendidikan tradisional dan prinsip manajemen sentralistik – birokratis, sistem pengajaran umumnya masih bersifat paternalistik. Guru yang menentukan. Yang terjadi ialah arus informasi satu arah. Jarang terjadi dialog. Hal ini tentu juga berlaku dalam pengajaran BI. Yang memperburuk keadaan lagi ialah bahwa para guru jarang membuat persiapan (rencana) mengajar yang cukup matang dan jarang melakukan pengendalian mutu pengajarannya melalui tugas-tugas rumah peserta didik yang diperiksa, dikembalikan dan dibicarakan. Sebabnya ialah kebanyakan guru telah menjadi “Guru Biasa Di Luar”, dan dosen menjadi “Dosen Biasa Di Luar”, (bukan Dosen Luar Biasa), karena gaji tak cukup untuk kehidupan yang dasar. Sistem pengajaran selama ini mengakibatkan kemandirian peserta didik yang sangat lemah, termasuk dalam BI. Karena itu, sistem pengajaran selama ini perlu direformasi menjadi **sistem pembelajaran** di mana peserta didik dimotivasi untuk mandiri.

4.2 Pemerataan Penggunaan BI secara Bermutu

Cara terbaik untuk pemerataan penggunaan BI secara bermutu ialah melalui pendidikan bermutu sebagaimana dikemukakan di atas. Dalam hubungan ini, perkembangan pelaksanaan otonomi daerah tampaknya mempunyai dampak negatif. Di berbagai kabupaten, terutama kecamatannya yang

penulis kunjungi, ada kecenderungan untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah. Kecenderungan ini dapat memperlemah posisi dan peran BI. Di berbagai sekolah (di luar kelas) dan kantor pemerintah, penggunaan bahasa daerah sudah lebih sering. Agaknya, perlu ada ketentuan pemerintah yang jelas tentang perkembangan ini. Sebaiknya, perkembangan penggunaan bahasa di Indonesia, khususnya di daerah-daerah, diarahkan pada kedwibahasaan yang seimbang (*compound bilingualism*), di mana kompetensi dalam BI dan bahasa daerah adalah sama (seimbang). Kedua bahasa itu dikuasai dengan baik.

Cara lain yang tak kurang pentingnya untuk pemerataan penggunaan BI secara bermutu ialah melalui berbagai media massa dan pengembangan perpustakaan-perpustakaan desa. Dalam hubungan peranan media massa, perlu diperhatikan agar BI yang dipergunakan adalah BI yang bermutu dan yang tidak bercampur dengan berbagai unsur bahasa daerah. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan bahwa BI yang dipergunakan oleh para artis dalam berbagai film sinetron banyak mempengaruhi generasi muda, termasuk berbagai unsur bahasa Betawi (Jakarta) yang dipergunakan. Tetapi, bagaimanapun, media massa berperan penting dalam usaha pemerataan penggunaan BI secara bermutu.

4.3 Pengadaan Referensi yang Bermutu

Pemerintah, dalam hal ini Depdiknas melalui Pusat Bahasa, telah banyak berusaha dalam peningkatan mutu penggunaan BI, terutama pada masa Orde Baru. Di antara hasil-hasil yang telah dicapai ialah diterbitkannya Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang keduanya dimaksudkan sebagai referensi. Namun, kedua referensi itu perlu direvisi dan dibuat lebih komprehensif. Tata bahasa BI itu harus memuat semua unsur-unsur kebahasaan sesuai dengan perkembangan teori linguistik, khususnya teori tata bahasa. Kamus Besar BI perlu diperkaya secara komprehensif sehingga memuat semua unsur leksikal yang mutakhir, dan dapat menyamai Webster's atau Oxford Dictionary yang besar dan edisi terakhir. Dengan demikian, Kamus Besar BI dimaksud dapat menjadi referensi yang sangat terpercaya dan bermanfaat.

Banyaknya bahasa daerah di Indonesia yang mempengaruhi ujaran (*pronunciation*) BI menjadi alasan yang kuat untuk menyusun buku fonetik dan ujaran (termasuk intonasi) standar BI. Buku ini juga merupakan referensipenting. Tanda ujaran (*pronunciation symbols*) perlu ada, dan termasuk dalam Kamus Besar BI.

Akhirnya perlu diusahakan agar semua buku referensi ada di setiap perpustakaan sekolah, daerah, dan desa.

5. PENUTUP

BI adalah bahasa negara dan bahasa kebangsaan yang sudah berusia 58 tahun. Dalam makalah ini telah dikemukakan beberapa pikiran tentang mutu penggunaan BI sebagai bahasa politik, dalam arti BI sebagai sarana administrasi negara dan kegiatan kenegaraan. Telah dikemukakan bahwa BI sudah mampu berperan sebagai bahasa modern mengemban peran itu. Mutu penggunaan BI sebagai bahasa politik terus meningkat meskipun terdapat berbagai kelemahan mendasar pada setiap orde politik.

Karena yang mempergunakan BI adalah manusia Indonesia terutama, maka untuk meningkatkan mutu penggunaan itu, mutu kemampuan SDM Indonesia yang terutama harus ditingkatkan. Karena itu, yang harus diusahakan ialah peningkatan mutu pendidikan nasional dengan mengatasi lima akar masalah pokok pendidikan. Dalam pemerataan penggunaan BI secara bermutu, selain pendidikan, media massa dan perpustakaan-perpustakaan di pedesaan juga sangat berperan.

Data-data yang menjadi dasar pembahasan dalam makalah ini sangat terbatas. Karena itu, penelitian yang lebih lengkap sangat dibutuhkan. Namun, penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat dalam dikusi ini setidaknya sebagai perangsang.

KEPUSTAKAAN

1. Aitchison, Jean, (1981). *Language Change: Progress or Decay?* Bungay, Suffolk : The Chancer Press.
2. Benjamin, Robert L. (1970). *Semantics and Language Analysis*, New York: The Boobs – Merrill Company, Inc.
3. Bobrow, Daniel G. (1975). *Dimensions of Representation*. Dalam "Representation and Understanding ; Studies in Cognitive Science", ed. Daniel G. Bobrow et.al. New York : Academic Press, Inc.
4. Bresman, Joan and Kaplan, Ronald M. (1982). *Grammars as Mental Representations of Language: Introduction*. Dalam "The Mental Representation of Grammatical Relation", ed. Joan Bresman, Cambridge, Mass : The MIT Press.
5. Chafe, Wallace, L. (1971). *Eaning and The Structure of Language*, Chicago : The University of Chicago Press.
6. Clark, Herbert H. and Clark, Live V. (1977). *Psychology and Language: And Introduction to Psycholinguistics*. New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
7. Coulthard, Malcolm. (1979). *And Introduction to Discourse Analysis*. London: Longman.
8. Dhakidae, Daniel. (1996). *Bahasa dan Kekasaan: Bahasa Jurnalis dan Politik Orde Baru*. Dalam "Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru", ed. Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim. Bandung : Penerbit Mizan.
9. Giles, Howard. (1979). *Sociolinguistics and Social Psychology: And Introductory Essay*. Dalam "Language and Social Psychology", ed. Howard Giles and Robert N. St. Clair. Oxford: Basil Blackwell.
10. Goleman, Daniel. (1995). *Emotional Intelligence*. Diterjemahkan: Kecerdasan Emosional, T. Hermaya. Jakarta : Gramedia.
11. Lasswell, Harold D. et.al. (1965). *Studies in Quantitative Sementics: Language of Politics*. Cambridge, Mass : The MIT Press.
12. Levinson, Stephen C. (1983). *Pragmatics*. London: Cambridge Univer-sity Press.
13. Paivio, Allen & Begs, Ian. (1981). *Psychology of Language*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

14. Patton, Patricia. (1997). *Emotional Intelligence in The Workplace*. Diterjemahkan: *Emotional Intelligence di Tempat Kerja*, (1998), oleh Ir. Julia Tahitoe, MM. Jakarta, PT. Gramedia.
15. Rinehart, Gray. (1993). *Quality Education*. Milwaukee: ASQC Quality Press.
16. Shapiro, Lawrence E. (1997). *How to Raise a Child With a High EQ: A Parent's Guide to Emotional Intelligence*. Diterjemahkan: *Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak*, oleh Alex Tri Kuntoro. Jakarta : PT. Gramedia.
17. Segal, Jeanme. (1997). *Raising Your Emotional Intelligence*. Diterjemahkan: *Meningkatkan Kecerdasan Emosional: Program Emosi Anda*, oleh Dian Paramesti Bahar. Jakarta: Citra Angkasa Publishing.
18. Tampubolon, Daulat P. (1997). *Bahasa dan Tanggung Jawab Kemanusiaan*. Dalam "Bahasawan Cendekia", ed. Liberty Sihombing dkk. Jakarta: PT Internusa.
19. ----- (1996). *Bahasa Indonesia Abad Ke-21; Spesialisasi, Simplifikasi, dan Efektuasi*. Dalam "Bahas", No.24, Tahun XXII, FPBS – IKIP Medan.
20. ----- (1999). *Gejala-gejala Kematian Bahasa: Suatu Observasi Ragam Politik Orde Baru*. Dalam PELBBA No.12, Tahun 1999. Jakarta ; Atmajaya.
21. ----- (1999). *Peran Bahasa Dalam Memajukan Bangsa*. Makalah disajikan dalam Kongres Linguistik 1999 di Jakarta.
22. ----- (2001). *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
23. ----- (1993). *Mengembangkan Minat dan Kebiasaan Membaca Pada Anak*. Bandung: Penerbit Angkasa.
24. ----- (2003). *Pendidikan Bermutu*. Medan: LKPBI.

**MENUJU PENGAJARAN BAHSA DAN SASTRA
YANG BERMAKNA**

Suminto A. Sayuti

MENUJU PENGAJARAN BAHSA DAN SASTRA YANG BERMAKNA

Suminto A. Sayuti

1/

"Bangsa kita menderita sakit rabun membaca dan lumpuh menulis". Kalimat itu sering disampaikan oleh Taufiq Ismail dalam berbagai forum.¹⁾ Sindiran kritis tersebut ujung-ujungnya dialamatkan pada kegagalan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di sekolah. Artinya, pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang selama ini dilaksanakan melalui sistem persekolahan belum mampu memenuhi harapan sebagian besar masyarakat. Pengajaran bahasa dan sastra Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam menunaikan imperatif luhur yang diembannya, baik dalam perspektif edukatif maupun kultural.

Dalam perspektif yang pertama, sesungguhnya pelaksanaan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia diharapkan mampu mencapai tingkatan yang terkait dengan upaya "mencerdaskan kehidupan bangsa," menuju kehidupan yang lebih modern dan beradab. Sementara itu, dalam perspektif yang kedua, pengajaran di bidang itu seharusnya mampu mencapai tingkatan kontributif sebagai unsur pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa.

Kedua persepektif tersebut kini akan begitu terasa pentingnya. Era kesejagatan hampir selalu berimplikasi pada persoalan kontak bahasa dan kontak budaya. Tegur-sapa budaya lokal dengan budaya nasional,

¹⁾ Bahkan, menurut pengakuannya, ia merasa "gregetan" terhadap pengajaran sastra lebih dari 30 tahun. Sejak akhir tahun 1960-an Taufiq Ismail merenungkan apa yang sering disebut sebagai keterpencilan sastra kita di masyarakat, posisi sastra Indonesia yang cuma di trotoar peradaban bangsa, dan masalah petikan puisi dan novel kita yang tidak berada di dalam hati dan tidak terucapkan dalam pidato para pemuka negara, serta minimnya jumlah doktor sastra. Ia pun membuat identifikasi gejala dan kemungkinan penyebabnya: (1) merosotnya minat masyarakat dalam membaca karya sastra; (2) rendahnya tiras buku sastra; (3) merosotnya mutu karya sastra; (4) sepihnya ulasan dan kritik sastra; (5) kurang menaikinya jumlah pengulas dan kritikus sastra, (6) seretnya pertambahan S-3 ilmu sastra dibandingkan dengan S-3 ilmu eksakta/sains dan ilmu ekonomi/sosial; (7) hanya terdapat satu-satunya majalah bulanan sastra; (8) masih adanya pelarangan karya sastra; (9) lambatnya proses desentralisasi kegiatan sastra; (10) sangat kurangnya diadakan sayembara-sayembara sastra; (11) kurangnya penghargaan pada karya sastra dan sastrawannya; (12) kurang dikenalnya sastra Indonesia di luar negeri melalui terjemahan bahasa asing; (13) tidak adanya acara sastra dan pembicaraan buku sastra di televisi, dan (14) merosotnya baca buku sastra dan pelajaran mengarang di sekolah.

budaya nasional dengan budaya regional dan global, merupakan suatu hal yang makin tak terhindarkan. Kita menjadi pejalan budaya pulang-balik: lokal-nasional-global. Untuk itu, di dalam merembahnya, kita perlu berpikir dan bertindak secara sadar dan mandiri. Dengan cara demikian, tegur-sapa kultural yang salah satunya akan berpengaruh besar terhadap masalah kebahasaan dan kesastraan itu berlangsung sewajarnya. Kedua perspektif yang sudah disebutkan di atas itulah yang seharusnya menjadi pangkal etos kerja tatkala bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi.

Kegagalan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia juga menunjukkan bahwa kedudukan BI sebagai bahasa negara belum sepenuhnya terimplementasikan. Padahal, kedudukan semacam itu mengandung imperatif yang mengikat. Artinya, BI harus berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu implikasi konkretnya, BI dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan,²⁾ di samping sebagai substansi yang diajarkan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang muara akhirnya adalah menempatkan fungsi strategis BI dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, terutama dalam dua perspektif yang sudah dikemukakan di atas: edukatif dan kultural.

Pada hakikatnya tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah adalah untuk mengembangkan keterampilan berbahasa, baik secara lisan maupun tertulis, serta menumbuhkan apresiasi sastra. Pelaksanaan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dinyatakan bermakna apabila tujuan tersebut tercapai, yakni berkembangnya keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, serta tumbuhnya apresiasi sastra secara baik di kalangan siswa. Dengan kata lain, untuk mencapai kebermaknaannya, pembelajaran bahasa dan sastra sudah seharusnya lebih diarahkan pada pembinaan keterampilan berkomunikasi dalam berbagai situasi, serta pembinaan sikap kritis dan menghargai teks-teks susastra.

Tentu dapat dimaklumi mengapa persoalan apresiasi sastra menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam dan lewat pengajaran sastra. Tercapainya tujuan tersebut juga akan berpengaruh besar pada

²⁾ Implikasi lainnya, BI dipergunakan sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan, dan sebagai sarana penguasaan dan pengembangan berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, perdagangan, industri, kebudayaan, pariwisata, politik, dan ipteks.

kehidupan sastra suatu bangsa, misalnya saja: (1) karya-karya sastra tidak lagi terpendil dari masyarakatnya; (2) para sastrawan tidak menjadi "makhluk marginal" yang perlu "diwaspadai"; (3) masyarakat dapat memetik hikmah dari karya-karya sastra yang berupa nilai-nilai kemanusiaan, yang pada gilirannya dapat mempertinggi derajat budi pekerti. Akan tetapi, idealisasi semacam itu hingga kini masih belum sepenuhnya menjadi kenyataan.

2/.

Dalam hubungannya dengan masalah tersebut, sejumlah hal dapat diidentifikasi, misalnya saja penyampaian materi teoretis yang berlebihan. Akibatnya, kemampuan berbahasa siswa kurang mendapat perhatian. Hal ini diperparah oleh adanya anggapan yang mengedepan bahwa metode ceramah di depan kelas merupakan metode terbaik.³⁾

Contoh lain secara nyata terjadi dalam pembelajaran menulis. Pembelajaran keterampilan ini masih dilakukan secara tradisional dengan menekankan pada hasil tulisan siswa, bukan pada proses yang seharusnya dilakukan.⁴⁾ Pendekatan tradisional dalam pembelajaran menulis ditekankan pada hasil berupa tulisan yang telah jadi, tidak pada yang dikerjakan siswa ketika menulis. Para siswa langsung berpraktik menulis tanpa belajar bagaimana caranya menulis. Guru biasanya menyediakan beberapa macam judul/topik karangan dan meminta siswa untuk memilih salah satunya. Para siswa kemudian diminta untuk secara langsung menulis. Setelah selesai, hasil kerja siswa dikumpulkan, dikoreksi, dan dinilai oleh guru. Kegiatan-kegiatan ini terus-menerus terjadi yang mengakibatkan para siswa merasa jenuh dan kurang menyenangkan pembelajaran menulis. Mereka akhirnya berpendapat bahwa kegiatan pembelajaran menulis merupakan suatu beban yang memberatkan. Akhirnya, keterampilan menulis para siswa sangat rendah.

Hal yang serupa juga terjadi dalam pembelajaran membaca.⁵⁾ Siswa diminta untuk membaca (nyaring atau dalam hati), guru memberi penjelasan kata-kata sulit yang terdapat dalam bacaan. Pada fase akhir kegiatan pembelajaran, siswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang isi bacaan atau menceritakan isi bacaan secara

³⁾ Herman J. Waluyo, *Suara Merdeka*, 19 Oktober 2002

⁴⁾ Syamsi, 2000, lihat juga : Zuchdi, 1995

⁵⁾ Syamsi, 2000

lisan/tulisan. Secara terus-menerus kegiatan macam itu dilakukan. Para siswa pun menuai kejenuhan dalam kegiatan membaca.

Jika pembelajaran membaca dan menulis saja masih dilakukan secara tradisional (sedikit sekali ada upaya inovasi pembelajaran), apalagi keterampilan mendengarkan dan berbicara. Guru jarang sekali melakukan kegiatan pembelajaran menyimak. Keterampilan menyimak dianggap keterampilan pasif yang semua siswa bisa melakukannya. Demikian pula halnya dengan keterampilan berbicara. Pembelajaran keterampilan berbicara hanya dilakukan sepintas lalu. Melatih siswa untuk berpidato, berceramah, atau bercerita umumnya dianggap sebagai kegiatan yang mubazir. Apalagi dalam evaluasi pembelajaran (tes sumatif, epta, ebtanas, uan) tidak pernah ada evaluasi keterampilan berbicara siswa.

Pendek kata, dalam pengajaran bahasa aspek gramatik cenderung diajarkan secara terpisah; pengajaran dipusatkan pada upaya membantu siswa membuat kalimat yang benar strukturnya tanpa mempertimbangkan konteks; sebagian besar waktu belajar dipergunakan untuk menghafalkan kaidah bahasa; dan kesempatan praktik berbahasa menjadi begitu terbatas.

3/.

Pembelajaran apresiasi sastra dapat dikatakan lebih parah lagi.⁶⁾ Siswa lebih banyak diberikan nama-nama pengarang dan karyanya tanpa pernah mendapat kesempatan untuk mengenal, menikmati, dan menghayati karya sastra. Mereka cukup diperkenalkan dengan ringkasan isi novel. Oleh karena itu, wajarlah jika sastra benar-benar sangat asing bagi siswa.

Pada sisi lain, secara lebih spesifik, diduga terdapat tiga

⁶⁾ Sudah sejak tahun lima puluhan persoalan ini, paling tidak menurut catatan Ajip Rosidi, menjadi pembicaraan dan perdebatan yang tak putus-putusnya dalam berbagai forum seminar, simposium, dan upaya lain yang sejenis. Hingga kini sudah tak terhitung lagi, berapa jumlah kertas kerja, makalah, yang membicarakan persoalan itu. Sekedar menyebut contoh, tahun 1991 Umar Kayam, dalam Pilnas HISKI di Yogya, sudah mengusulkan agar pengajaran sastra dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tahun 1998, baik dalam Pilnas HISKI IX (Bandungan, Semarang, 22--24 Oktober 1998) maupun dalam Kongres Bahasa Indonesia VII (Jakarta, 26--30 Oktober 1998), usulan serupa masih juga mengemuka. Pandangan-pandangan yang ada itu pada prinsipnya menghendaki adanya pembaharuan pengajaran sastra dari berbagai seginya, misalnya dari sudut pandang teori yang dijadikan pijakan berikut implikasinya dalam pembelajaran.

kecenderungan utama yang sering terjadi dalam pengajaran sastra di sekolah. Pertama, apabila berkenaan dengan makna teks, para guru lebih mengistimewakan intensi pengarang secara berlebihan sebagai sesuatu yang "terbaik". Kedua, teks seringkali disikapi sebagai sebuah dunia yang tertutup bagi siswa. Guru-guru cenderung menyarankan bahwa sejumlah tafsiran terhadap teks tertentu tidak bisa dilakukan secara sederhana. Ketiga, guru seringkali mendevaluasi latar belakang dan pengalaman siswa dalam kaitannya dengan membaca teks.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut, di satu sisi, disebabkan oleh begitu kuat dan mengakarnya pandangan realisme ekspresif.⁷⁾ Di samping itu, pandangan yang berkeyakinan bahwa "hanya terdapat satu tafsir teks yang secara objektif benar", merupakan penyebab lain timbulnya kecenderungan yang terjadi dalam proses pengajaran sastra.

4/.

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai berikut kenyataan yang dihadapi pengajaran bahasa, orientasi metodologis yang selama ini dipakai dan ternyata kurang bermakna, harus disesuaikan. Pendekatan pengajaran yang dipergunakan hendaknya pendekatan yang mampu menciptakan situasi yang berpotensi mengeleminir kerisauan para siswa. Misalnya saja pendekatan yang melibatkan para siswa secara personal (dan kontekstual) dalam kegiatan belajar. Dengan pendekatan ini, minat dan interes siswa pada pendapat, perasaan, dan minat siswa lain dapat ditumbuhkan secara wajar, di samping mereka juga diharapkan tidak akan merasa tertekan tatkala mengekspresikan suatu hal dalam topik-topik yang didiskusikan di kelas. Untuk itu, hal-hal berikut ini harus menjadi perhatian utama dalam menyiapkan strategi dan melaksanakan proses pengajaran bahasa di kelas; (a) Fokus awal pelajaran bahasa adalah pemerolehan kompetensi komunikatif, bukan ketepatan gramatik; (b) Perubahan dan peningkatan siswa dalam menemukan kaidah bahasa lewat dan dalam

⁷⁾ Menurut Catherine Belsey (lewat Thomson, 1992), realisme ekspresif merupakan ajaran yang mempertimbangkan sastra sebagai teks yang ditulis oleh individu yang secara persoalan begitu berbakat dan memperoleh dorongan ilahiah, yang secara langsung mengkomunikasikan beberapa aspek kondisi manusia. Sementara itu, pembaca dipertimbangkan sebagai individu bebas, ahitoris, bercitarasa baik, dan secara takzim mengakui adanya suatu kebenaran abadi. Bagi ajaran ini, semua ditulis berdasarkan pengalaman personal dan merefleksikan kehidupan dengan suatu implikasi bahwa terdapat suatu hubungan langsung antara bahasa dan realitas.

kegiatan berbahasa menjadi arahnya; (c) Guru tidak boleh memaksa siswa untuk mempelajari bahasa, sebaliknya, siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh bahasa.

Seiring dengan diberlakukannya KBK yang jelas-jelas menuntut agar pelaksanaan pengajaran lebih ditekankan pada pengembangan keterampilan berbahasa dan bersastra siswa, perlu segera dicari alternatif model pengajaran bahasa dan sastra yang sesuai.

Dalam kaitannya dengan strategi pembelajaran berbicara, terdapat beberapa model yang bisa dilakukan, antara lain percakapan (seperti analisis propaganda iklan, membandingkan dua pelaku dalam dua cerita, atau topik-topik lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah), berbicara estetik, berbicara bertujuan, dan aktivitas drama. Untuk memulai percakapan dapat meminta seorang siswa sebagai sukarelawan atau guru mengajukan pertanyaan. Agar percakapan tetap berlangsung, siswa diminta secara bergantian memberi komentar atau mengajukan pertanyaan atau mendukung pendapat orang lain. Untuk menutup percakapan dapat dilakukan dengan pencapaian konsensus atau kesimpulan yang disepakati bersama.

Berbicara estetik dapat berupa percakapan tentang sastra, bercerita, dan teater pembaca. Percakapan tentang sastra dapat dilakukan setelah siswa membaca atau mendengarkan karya sastra. Siswa dapat menyampaikan pendapat dan komentar mereka tentang karya sastra yang baru mereka baca/dengar. Bercerita (mendongeng) adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Kegiatan ini sangat menyenangkan dan sekaligus merangsang imajinasi anak. Langkah-langkah dapat bercerita adalah memilih cerita, mempersiapkan diri untuk bercerita, menambah peraga, dan menyampaikan cerita. Teater pembaca adalah presentasi pembacaan naskah drama oleh sekelompok siswa. Langkah-langkah kegiatannya, memilih naskah, latihan, dan presentasi.

Kegiatan berbicara bertujuan dapat berupa laporan lisan, wawancara, atau debat. Dalam laporan lisan, siswa dapat diminta untuk memberikan informasi topik tertentu atau melaporkan hasil membaca buku.⁸⁾ Wawancara juga dapat dilakukan oleh para siswa.⁹⁾ Debat juga

⁸⁾ Langkah-langkah pembelajarannya adalah memilih topik, mencari dan menyusun informasi, membuat peraga, dan mempresentasikan.

⁹⁾ Langkah-langkahnya perencanaan, melakukan wawancara, dan berbagai pengalaman hasil wawancara.

dapat dilakukan jika ada isu kontraditif yang menarik. Sebagian siswa mungkin setuju atau tidak setuju terhadap isu tersebut.¹⁰⁾

Dalam kaitannya dengan pembelajaran membaca dapat digunakan pendekatan proses, yakni proses membaca. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan keterampilan membaca siswa.¹¹⁾ Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk juga menyimpulkan bahwa pembelajaran menulis.¹²⁾ Sementara itu, pembelajaran menyimak dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pembelajaran berbicara atau membaca. Hal penting yang perlu dilakukan adalah perlunya perhatian terhadap proses menyimak itu sendiri.¹³⁾

Akhirnya, pembelajaran tata bahasa¹⁴⁾ akan sangat tepat jika dilakukan secara terpadu dan kontekstual dengan pembelajaran keterampilan berbahasa baik menyimak, membaca, menulis, maupun

¹⁰⁾ Langkah-langkah pembelajarannya adalah tentukan isu/usul, mengelompokkan siswa yang setuju dan yang tidak setuju, dan melakukan debat. Untuk melaksanakannya dapat dilakukan prosedur: (1) pertanyaan pertama dan ketiga mendukung usul, (2) pertanyaan kedua dan keempat menolak, (3) pertanyaan sanggahan pertama dan ketiga disampaikan kelompok siswa setuju, dan (4) pertanyaan sanggahan kedua dan keempat dilakukan kelompok siswa tak setuju.

¹¹⁾ Syamsi, 2000. Menurut hasil penelitian Palmer et.al (1994), siswa akan mendapatkan keuntungan jika proses, seperti proses membacanya diperagakan di hadapan siswa. Adapun proses membaca meliputi: persiapan untuk membaca, membaca, merespon, mengeksplorasi teks, dan memperluas interpretasi (Tomkins & Hoskisson, 1995). Selain dengan pendekatan proses, dan pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan berbagai teknik atau strategi, seperti SQ3R, STUDY, PQRST, OK5R, dan EVOKER. Berbagai teknik tersebut dapat dilakukan secara bervariasi sehingga dapat mencegah kejenuhan.

¹²⁾ Syamsi, 2000. Pembelajaran menulis dengan pendekatan proses meliputi lima langkah, yakni pramenulis, menulis draf, merevisi, menyunting, dan mempublikasi (Tomkins & Hoskisson, 1995).

¹³⁾ Proses menyimak meliputi menerima lambang lisan, memberi perhatian, dan menentukan makna. Ada berbagai macam menyimak yang dapat dilakukan, seperti menyimak estetik, menyimak kritis, menyimak komperhensif, dan sebagainya. Dalam menyimak estetik, misalnya, dapat dilakukan langkah-langkah: a) prediksi, b) menyusun imajinasi mental, c) menghubungkan dengan pengalaman pribadi, d) menghubungkan dengan pengalaman literatur, e) memperhatikan keindahan dan kekuatan bahasa, dan f) menggunakan pengetahuan untuk pemahaman lebih lanjut.

¹⁴⁾ yang meliputi tata bunyi, ejaan, tata kata, tata kalimat, paragraf, dan wacana

berbicara. Setelah siswa melakukan kegiatan menyimak, misalnya, kegiatan dapat dilanjutkan dengan diskusi tentang kalimat. Pada kesempatan itu, guru dapat mengambil beberapa contoh kalimat yang ada pada bahan simakan untuk dikaji bersama-sama. Biarkan siswa menganalisis sendiri apa dan bagaimanakah kalimat itu. Yang penting adalah bahwa guru hendaknya tidak memberikan ceramah tentang tata bahasa itu. Demikian pula halnya dengan pembelajaran kosa kata.¹⁵⁾

6/.

Dalam rangka mengupayakan pencapaian tujuan pengajaran sastra yang apresiatif, sudah saatnya kecenderungan yang ada selama ini diimbangi, kalau belum bisa diganti, dari satu segi, dengan perspektif lain. Misalnya saja dengan pandangan yang **tidak hanya** mempertimbangkan "membaca" sastra sebagai proses "*transmission*", pemindahan makna yang dibangun secara menyeluruh oleh pengarang dan dikomunikasikan kepada pembaca, tanpa perubahan, melalui sarana teks. Hal ini perlu diupayakan agar implikasinya dalam praktik pembelajaran tidak hanya menekankan *delivery system* dan terlampaui kognitif.

Salah satu model pembelajaran sastra yang apresiatif adalah pembelajaran sastra dengan pendekatan resepsi sastra.¹⁶⁾ Pembelajaran sastra dengan pendekatan ini menghendaki siswa untuk lebih banyak berinteraksi dengan karya sastra. Tanpa banyak diberikan teori, siswa diminta langsung mengenal (dengan membaca atau mendengarkan), menikmati, dan menghayati karya sastra tertentu.

Perspektif resepsi sastra mengubah fokus perhatian terhadap

¹⁵⁾ Untuk ini dapat digunakan metode langsung atau taklangsung. Dengan metode langsung, guru dapat secara khusus mengajak siswa untuk mengkaji tentang sinonim, antonim, atau yang lain dengan menggunakan berbagai strategi seperti penggunaan kamus, semantik *mapping*, atau diagram pohon. Dengan metode taklangsung, guru dapat mengajak siswa untuk mengkaji penggunaan kosa kata tertentu setelah mereka mengikuti kegiatan keterampilan berbahasa. Setelah membaca, misalnya, guru bisa mengajak siswa untuk mengkaji homonim atau homograf yang terdapat dalam bacaan. Pada hakikatnya, berbagai pengalaman kegiatan berbahasa dapat meningkatkan dan memperkaya penguasaan kosa kata seseorang. Oleh karena itu, metode taklangsung ini sungguh sangat bermanfaat dalam peningkatan penguasaan kosa kata siswa.

¹⁶⁾ Dalam penelitiannya terhadap siswa SMP, Wiyatmi dan Kastam Syamsi (2002) menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan resepsi sastra dapat meningkatkan apresiasi sastra siswa dan sikap siswa terhadap sastra.

sastra: **dari teks ke** pembaca (dalam kaitan ini, baca: siswa dan guru). Sastra bukanlah sebuah objek, melainkan sebuah pengalaman, dan pembaca bukanlah konsumen, melainkan peraga aktif yang membawa teks ke dalam kehidupan pikirannya.

Aktivitas pembaca sastra tersebut hampir dipastikan selalu tidak bebas hambatan, baik hambatan tekstual maupun kultural. Pembacaan dipandu oleh teks dan dipengaruhi oleh sejarah pembaca, baik yang personal, literer, maupun kultural; di samping juga oleh sistem kepercayaan dan konvensi-konvensi membaca yang telah diinternalisasikan, yakni yang oleh Iser disebut "repertoire" pembaca dan oleh Ian Reid disebut "bingkai ekstratekstual." Apa yang pembaca bawa membentuk cara mereka membuat teks itu bermakna.

Dalam tindakan membaca, pembaca dilibatkan dalam proses penyusunan makna secara berkesinambungan, membangkitkan harapan mengenai apa yang ada dalam teks dalam kaitannya dengan apa yang tampak, membentuk harapan baru, dan secara retrospektif mengubah hipotesis-hipotesis terdahulu. Oleh karena itu, respons merupakan sebuah proses *selfcorrection* yang dinamis.¹⁷⁾

Proses pembuatan teks terutama melibatkan pembentukan imaji-imaji mental (kesan dan perasaan indera) dan mengisi kesenjangan, kekosongan, atau indeterminasi. Pandangan resepsi mengamsumsikan bahwa teks literer membentuk sebuah kesatuan organis: koherensi karya yang datang dari hubungan-hubungan harmonis elemen-elemen (bagian-bagian individual) pembangunannya. Tugas pembaca adalah menetapkan makna di antara indeterminasi yang muncul.

Pokok-pokok pikiran tersebut mengimplikasikan bahwa strategi transaksional merupakan salah satu strategi yang tepat dan perlu dikembangkan dalam pengajaran sastra, apalagi jika dikaitkan dengan pencapaian tujuan utamanya, yakni terbinanya apresiasi sastra. Hal ini dimungkinkan karena pembaca hampir selalu memperhitungkan latar belakang pengalaman dan pengetahuannya tatkala mereka terlibat dalam penyusunan makna teks yang dihadapinya. Caranya, pembaca "memanggil kembali" skema internal yang telah mereka miliki dan mengoperasikannya tatkala berhadapan dengan teks dalam rangka pemahamannya.

Lewat "transaksi-transaksi"-nya dengan teks, pembaca menyusun

¹⁷⁾ Dalam hubungan ini Iser mengatakan bahwa, "*Troughout the reading process there is a continual interplay between modified expectations and tranformed memory.*"

makna dalam rentangan kemungkinan yang disediakan oleh teks tertentu. Terdapat "konstruk baru," makna baru yang disusun berdasarkan atas serpihan teks yang digelutinya.

Transaksi itu pada hakikatnya merupakan konversasi atau dialog terus-menerus antara teks dan pembaca: "sebuah negosiasi antara apa yang diketahui pembaca dan apa yang disajikan teks." Negosiasi itu sendiri, dengan demikian, merupakan suatu proses yang meniscayakan pergeseran **diri** makna yang didasarkan pada teks, *meaning-getting*, ke konseptualisasi membaca sebagai *meaning-making*.

Akan tetapi, membangun negosiasi antara pembaca dan teks tidak pernah bisa dikerjakan dalam satu situasi yang terisolasi dari lingkungan sosial tempat pembacaan dan pembelajaran sastra berlangsung. Itulah sebabnya membangun negosiasi juga meniscayakan adanya perubahan yang sinambung mengenai hal yang sebelumnya telah dihipotesiskan. Makna dalam sastra adalah sebuah opini, dan opini hanya dapat dihampirkan lewat negosiasi yang, antara lain, dikembangkan dalam strategi transaksional. Oleh karena itu, strategi ini mengandaikan seorang pengajar sastra sebagai *fellow builder*, yang dekat, tetapi tidak sama, dengan seorang "arsitek."

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan strategi transaksional dalam pembelajaran sastra tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip berikut.

Transactional Approaches (Teacher as Fellow Builder)

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Goals of Learning</i> | <i>Collaboratively generated between students and teacher</i> |
| <i>Role in Learning</i> | <i>Student negotiated</i> |
| <i>Methods of Learning</i> | <i>Student constructed (negotiated with teacher)</i> |
| <i>Procedures in Group</i> | <i>Student constructed</i> |
| <i>Functioning</i> | |
| <i>Content of Learning</i> | <i>Student and teacher negotiated</i> |

(Straw, 1996)

Dalam hubungan ini, perlu juga diperhatikan prinsip *literature as exploration*, yang mengisyaratkan bahwa peranan pembaca dalam proses yang melaluinya mereka menafsirkan sastra, memungkinkan emosi dan intelektualnya berfungsi kontributif untuk membangkitkan

pengalaman literer.

Membangkitkan harapan, mengubah, memeriksa, dan memperluas kesan serta memecahkan teka-teki (dalam teks) merupakan sesuatu yang bersifat aktif. Aktivitas yang bertahap itu dapat dikembangkan melalui pengajaran. Selama pengajaran berlangsung, guru dapat membawa siswa untuk menduga-duga, merefleksikan dan membuat proses berpikir mereka eksplisit dan karenanya, refleksi dan proses berpikir itu hendaknya dipertimbangkan sebagai sarana yang dapat dipergunakan.

Para siswa dapat dibantu untuk mengajukan pertanyaan secara aktif dan, jika diperlukan, menyanggah teks: mereka dibawa masuk ke dalam situasi "perseteruan" dengan teks yang sedang dibacanya. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui cara-cara: (1) Memformulasikan teka-teki mereka sendiri dan bukannya menjawab pertanyaan pengajarnya; (2) Melakukan spekulasi dan merumuskan hipotesis. Cara ini merupakan aktivitas yang diarahkan melalui metode-metode pengajaran tertentu, yakni metode yang menghindarkan diri dari sifat memberikan hukuman jika siswa melakukan kesalahan (menurut versi guru); (3) Mencocokkan ideologi-ideologi tekstual dengan ideologi yang dimiliki para siswa, misalnya saja dengan mengajukan pertanyaan "Siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, di mana, mengapa?" "Desain apa yang dimiliki teks ini menurut pendapat saya, seharusnya saya menentang dan berseteru dengannya?"

Uraian di atas jelas mengandaikan bahwa karya-karya sastra memang tersedia secara cukup dan dibaca, baik oleh guru maupun siswa, sebagai bagian dari kehidupan sastra suatu bangsa dalam keseluruhannya. Upaya apapun akan menjadi sia-sia tatkala buku-buku sastra memang tidak dibaca sama sekali karena berbagai alasan, termasuk karena tidak tersedianya buku-buku sastra di perpustakaan sekolah.

PUSTAKA Pemandu

- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono (ed.). 2002. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Yayasan Obor Indonesia.
- Alwi, Hasan. 2000. "Pengembangan Kurikulum Bahasa." *Makalah Konaspi*. Jakarta: UNJ.
- Anonim. 19 Februari 2002. "Pengajaran Bahasa Masih Teoritis", *Suara Merdeka*. Selasa 19 Februari 2002.

- Bull, G. 1996. "Using Children's Literature to Support Children's Learning: An Investigation of the Pedagogy of Literature" dalam Sue Clancy. 1996. *Literary Theory and Children's Literature*. Faculty of Education, Charles Sturt University, Australia.
- Calkins, L.M. 1983. *Lesson form a Child: on the Teaching and Learning of Writing*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Cullinan. 1989. "A Transactional View of Reading" Sue Clancy. 1996. *Literary Theory and Children's Literature*. Faculty of Education, Charles Sturt University, Austarlia.
- Djojonegoro, Wardiman. 1998. "Peningkatan Peran Instansi Pemerintah dalam Pembinaan Bahasa Indonesia." *Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Graves, D.H. 1983. *Writing: Teachers and Children at Work*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Holub, Robert C. 1984. *Reception Theory. A Critical Introduction*. London: Methuen.
- [Http://www.pdk.go.id/Journal/32](http://www.pdk.go.id/Journal/32)
- Iser, Wolfgang. 1983. *The Implied Reader. Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett*. Baltimore and London: The Johns Hopkins Press.
- Joyce, Bruce and Weil, Marsha. 1980. *Models of Teaching (2nd)*. New Jerssy: Prentice-Hall, Inc.
- Kasbolah, Kasihani. 1989. "Mengapa Kurikulum Berubah?" Dalam Majalah IKA IKIP Malang. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Norton, D.E. (1989). *The Effective Teaching of Language Arts. Third Edition*. Columbus: Merril Publishing Company.
- Palmer, B.C., et. al. (1994). *Developing Cultural Literacy Troygh the Writing Process*. Boston: Allyn and Bacon.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1985. "Estetika Resepsi dan Teori Penerapannya", dalam *Bahasa dan Sastra, Budaya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwo, Bambang Kaswanti. 1990. *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa, Menyibak Kurikulum 1984*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- . 2002. "Perkembangan Pengajaran Bahasa". Dalam Hasan Alwi dan Dendy Sugono (ed.). 2002. *Telaah Bahasa dan sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Yayasan Obor Indonesia.
- . (ed.). 1991. *Butir-Butir Sastra dan Bahasa, Pembaharuan Pengajaran*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Roe, B.D., Stoodt, B.D., and Burns, P.C. (1995). *Secondary School Instruction: The Content Areas. Fifth Edition*. Boston: The

- Houghton Mifflin Company.
- Sayuti, Suminto A. 1998. "Signifikansi dan Penggunaan Teori Sastra Kontemporer bagi Pengajaran Sastra". *Makalah Ilmiah Pertemuan Ilmiah Daerah I HISKI KOMDA DIY*. Yogyakarta: Hiski Komda DIY dan Universitas Ahmad Dahlan (25 Juli 1998).
- . 1983. Hakikat Teks Sastra dalam Perspektif Semiotik dan Estetika Resepsi" dalam *Al Qalam* (Jurnal Kependidikan). Yogyakarta: IKIP Muhammadiyah.
- . 1997. "Pragmatik Sastra" dalam *Widyaparwa*. Nomor 49. Oktober 1997. hh. 89-105.
- Segers, Rien T. 1978. *The Evaluation of Literary Texts. An Experimental Investigation into the Rationalization of Value Judgments with Reference to Seniotics and Esthetics of Reception*. Lisse: The Peter de Ridder Press.
- Selden, Raman and Widdowson, Peter. 1993. *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*. Great Britain: The University Press of Kentucky.
- Straw, S. 1988. "Reading and Response to Literatur: Transactionalizing Intruction" dalam Sue Clancy. 1996. *Literary Theory and Children's Literature*. Faculty of Education, Charles Sturt University, Australia.
- Sumardi, Muljanto. 1994. "Linguistik dan Pengajaran Bahasa." dalam Liberty P. Sihombing, dkk (ed.). *Bahasa Cendekia: Seuntai Karangan untuk Anton M. Moeliono*. Jakarta: PT Intermedia.
- Suparno. 1998. "Pengajaran bahasa Indonesia di Sekolah." *Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Syamsi, K. (2000). "Peningkatan Keterampilan Siswa Sekolah Dasar dalam Menulis (Penelitian Tindakan)", dalam *Jurnal Kependidikan (Terakreditasi)*, No. 2, Th. XXX, 2000.
- . (2000). "Peningkatan Keterampilan Siswa Sekolah Dasar dalam Membaca (Penelitian Tindakan)", dalam *Cakrawala Pendidikan (Terakreditasi)*, November 2000, Th. XIX, No. 4.
- Thomson, J. 1992. "The Significance and Uses of Contemporary Literary Theory for the Teaching of Literature" dalam Sue Clancy. 1996. *Literary Theory and Children's Literature*. Faculty of Education, Charles Sturt University, Australia.
- Tomkins, G.E., and Hoskisson, K. (1995). *Language Arts: Content and Teaching Strategies. Third Edition*. Englewood Cliffs, New Jersey: Merrill.

- Wiyatmi dan Syamsi, K. (2002). "Peningkatan Apresiasi Sastra Siswa SLTP dengan Pendekatan Resepsi Sastra", dalam *Cakrawala Pendidikan (Terakreditasi)*, Februari 2002, Th. XXI, No. 1.
- Zuchdi, D. (1996). *Pembelajaran Menulis dengan Pendekatan Proses*. Pidato Ilmiah pada Sidang Senat FPBS IKIP Yogyakarta tanggal 15 November 1996.
- (1995) "Pendekatan Komunkatif dalam Pengajaran Bahasa", *Makalah untuk Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat*. Yogyakarta: LPM IKIP Yogyakarta.

**PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM
MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA**

H. Muhammad Adnan Tiro

PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA

H. Muhammad Adnan Tiro

PENDAHULUAN

Bahasa dan sastra daerah di Indonesia beraneka ragam antar etnis dan antar daerah. Demikian banyak ragamnya sampai sementara itu ada penulis yang lebih 670 macam bahasa daerah.

Setiap bahasa daerah pada umumnya mempunyai produk-produk sastra, baik lisan maupun tertulis, dengan berbagai macam bentuknya. Ada berbentuk cerita rakyat, pesan-pesan (paseng dalam bahasa Bugis), dan nyanyian (elong dalam bahasa Bugis) yang termuat dalam lontarak bahasa daerah (Bugis, Makassar, Mandar, dan Tanah Toraja di Sulawesi Selatan). Konsekuensinya akan lebih banyak lagi jumlah sastra daerah yang bertebaran di seluruh nusantara tercinta ini.

Secara yuridis formal ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 32 sebagai berikut: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Dalam Pasal 36 ditegaskan bahwa: "Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia". Dalam perubahan keempat UUD 1945 ditegaskan bahwa (1) "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional". Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 32 ditegaskan bahwa "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Dalam penjelasan Pasal 36 ditegaskan bahwa "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup".

Dari acuan di atas, selanjutnya dapat dikatakan bahwa bahasa dan sastra daerah akan menjadi, sebagai, bagian utama/penting/substansial

dari kebudayaan Indonesia. Yang dimaksudkan ialah bahasa dan sastra daerah yang dipelihara dengan baik oleh rakyat daerah masing-masing. Karena setiap daerah, masyarakat di daerah, adalah bagian terpadu dari negara RI, bangsa Indonesia, maka bahasa dan sastra daerah itu akan dihormati, dipelihara dan dimajukan oleh negara, pemerintah RI. Selanjutnya, bahasa dan sastra suatu daerah akan dihormati dan disenangi oleh daerah, etnis lain di tanah air yang pada gilirannya akan menimbulkan perasaan memiliki, "milik kita" bukan hanya "milikmu", bukan hanya "milik kami".

Di sinilah letak peran dan pentingnya pembahasan tentang cara dan strategi peningkatan dan pemantapan peran bahasa dan sastra daerah dalam mendukung/memperkuat ketahanan budaya bangsa Indonesia yang secara singkat tertera di bawah ini. Untuk kesempurnaannya diharapkan urunan saran dan kritik konstruktif dari peserta, dan atasnya diaturkan terima kasih.

PERANAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH SEBAGAI PENDUKUNG KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Budaya bangsa bertahan bila didukung oleh peran bahasa dan sastra daerah sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah. Tanpa ketahanan bahasa dan sastra daerah, sebagai bagian dari kebudayaan daerah, tidak mungkin mendukung dan menopang ketahanan budaya bangsa. Bahasa dan sastra daerah hanya bisa bertahan kalau dihormati, dipelihara, dan dimajukan atau dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintahnya. Selanjutnya, dapat dipertanyakan apa saja peranan bahasa dan sastra daerah dalam mendukung ketahanan budaya bangsa.

Dalam kesempatan ini, dapat dikemukakan beberapa peran bahasa dan sastra daerah dalam mendukung ketahanan budaya bangsa sebagai berikut.

Peran Pengayaan

Bahasa dan sastra daerah-daerah di Indonesia sebagai bagian dari puncak-puncak kebudayaan akan memperkaya khasanah kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Semakin banyak bahasa dan sastra daerah yang dihormati, dipelihara, dan dimajukan oleh daerah dan atau oleh negara akan semakin kaya dan menariklah budaya bangsa, yang pada gilirannya akan lebih mempertinggi ketahanannya.

Tanpa daya tarik yang semakin menanjak seiring dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan pembangunan, masyarakat akan

lebih mudah lari mencari dan menemukan nilai-nilai budaya dari bangsa lain. Dengan pengayaan dari bahasa dan sastra daerah, budaya bangsa Indonesia akan bisa bertahan dari infiltrasi dan pengaruh-pengaruh negatif budaya bangsa lain pada era global dewasa ini.

Peran Pelengkap (*Complement*)

Bahasa dan sastra daerah yang dipelihara oleh masyarakatnya, apalagi bila dihormati, dipelihara, dan dimajukan oleh negara, akan melengkapi bahasa dan sastra dari daerah lain, bahasa dan sastra Indonesia, dalam rangka pengembangan budaya bangsa Indonesia. Tanpa dilengkapi oleh bahasa dan sastra daerah-daerah di Indonesia akan kurang kuatlah kebudayaan bangsa yang pada gilirannya akan mengganggu ketahanannya.

Peran Penambah (*Supplement*)

Bahasa dan sastra daerah akan menjadi penambah bahasa dan sastra daerah lain dalam lingkup budaya bangsa. Tanpa memelihara, menghormati, memajukan bahasa dan sastra daerah tertentu, akan berkurangnya bobot kebudayaan bangsa. Kalau gejala ini terjadi atau diikuti juga oleh daerah-daerah lain, maka akan semakin lemah/rapuhlah ketahanan budaya bangsa Indonesia. Konsekuensinya, kita akan mudah diintervensi oleh nilai-nilai budaya bangsa lain tanpa kemampuan selektif yang memadai.

Peran Penopang/Penyangga

Budaya bangsa tidak bisa bertahan tanpa tiang-tiang penyangga atau pilar-pilar penopang yang kokoh-kuat. Dikatakan demikian, karena budaya bangsa itu sendiri terdiri atas puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah. Apalah arti puncak-puncak itu tanpa tiang-tiang atau pilar-pilar budaya daerah, yang terwujud antara lain dalam bentuk bahasa dan sastra daerah. Tanpa pilar-pilar itu budaya bangsa akan mudah ambruk, runtuh berkeping-keping tanpa arti dan fungsi bagi bangsa itu sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya perangkai, perekat dan integrator komponen-komponen budaya daerah oleh ketahanan budaya bangsa, bahasa dan sastra Indonesia, yang bersifat "multi kultural" atau "bhinneka tunggal ika".

NILAI-NILAI BUDAYA DALAM SASTRA DAERAH YANG DAPAT MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Bentuk-bentuk sastra daerah yang sering ditemukan dalam

lontarak (di Sulawesi Selatan), antara lain, cerita rakyat, pesan-pesan (*paseng* dalam bahasa Bugis), dan nyanyian-nyanyian (*elong* dalam bahasa Bugis). Nilai-nilai budaya yang dapat ditemukan dalam karya sastra di Sulawesi Selatan, antara lain, sebagai berikut.

Siri

Konsep siri diberi arti yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keahlian para penulis. Sekalipun demikian, dari berbagai sumber dapat ditemukan bahwa konsep siri bermakna:

- (1) Malu, dan harga diri atau martabat sebagai intinya.
- (2) Daya pendorong untuk membinasakan siapa saja yang telah menyinggung rasa kehormatan, harga diri, martabat seseorang, dan
- (3) Daya pendorong untuk bekerja keras dan atau berusaha sebanyak mungkin guna meningkatkan martabat.

(Fachruddin AE. 1991; dan Mattulada dalam Koentjaraningrat 1976)

Bahkan sistem nilai budaya yang paling bernilai di Sulawesi Selatan yang merupakan puncak kebudayaan ialah *triple concept* kebudayaan: *siri*, *pesse* (solidaritas sosial) dan *were* (nasib) (Zainal Abidin Farid A., 1992; Fachruddin A.E., 1991).

Sebagai contoh ungkapan-ungkapan yang diberikan kepada konsep siri dikemukakan sebagai berikut.

Siri' emmi rionrowang ri-lino (Bugis) yang artinya hanya untuk *siri'* itu sajalah kita tinggal di dunia. *Siri'* dalam hal ini memberi identitas sosial dan martabat kepada orang Bugis. Hanya kalau ada martabat itulah maka hidup itu ada arti baginya.

Mate ri siri'na (Bugis) artinya "mati dalam siri" atau mati untuk menegakkan martabat diri, yang dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat.

Mate siri' artinya suatu "mati siri" atau orang yang sudah hilang martabat dirinya, adalah seperti bangkai hidup. Demikian orang Bugis-Makassar yang "mate siri" akan melakukan *jallo* atau *amuk* sampai ia mati sendiri. *Jallo* yang demikian disebut "*napaentengi siri'na*" (bahasa Makassar), artinya ditegakkannya kembali martabat dirinya. Kalau ia mati dalam *jallonya* itu, maka ia disebut "*warowane to-engka siri'na*" artinya jantan yang ada martabat dirinya, demikian Mattulada dalam Koentjaraningrat, 1976.

Salah satu ungkapan yang terkait dengan *pesse* sebagai berikut ini.

Mau teppekkua riasenng'e' seajing (sempurna)
Rekkog tania sirina peresse babuana si, yang artinya:
 Biar bagaimana yang dikatakan keluarga (sekampung)
 Jika bukan karena rasa malunya, tentu akan ada belas kasihannya.

Kerja Keras (Bahasa Bugis *Re-so*)

Nilai budaya *re-so* (kerja keras) ini biasanya dituangkan dalam bentuk *e-long* sebagai berikut.

"Re-so pa natinulu, masero naletei, pammase dewata", yang artinya hanya kerja yang tekun, sering menjadi titian rahmat Ilahi.

Kejujuran (*Lempu* dalam Bahasa Bugis)

Lempu berarti lurus, yang selanjutnya diperluas maknanya menjadi jujur, adil atau bersih. Nilai budaya "*lempu*" dalam bentuk *elong* Bugis dikemukakan sebagai berikut.

Dua l kuala sappo,
Unganna panasae,
Belo kamukue,

yang berarti

Dua kujadikan pagar,
 Kembangnya nangka,
 Hiasan kuku

Kembang nangka dalam bahasa Bugis disebut lampu yang berasosiasi bunyi dengan lempu. Hiasan kuku bahasa Bugisnya pacci, yang berasosiasi bunyi dengan paccing yang berarti kebersihan. Jadi *elong* ini berisi anjuran agar hidup dan kehidupan menggunakan dua pagar untuk diri, yaitu kejujuran dan kebersihan.

Sungguh akan aman dan sentosalah suatu negeri, jika lempu atau kejujuran itu terdapat pada tiga pihak, seperti yang dikatakan oleh Puang Rimaqqalatung (Fachruddin, A.E., 1991) sebagai berikut ini

Allalengeng malempu,
Papallaleng malempu,
Tomallaleng malempu,

yang artinya:

Perjalanan yang jujur,
Yang memperjalankan jujur,
Yang berjalan pun jujur.

Keberanian (Warani dalam Bahasa Bugis)

Jika dalam bahasa Melayu/Indonesia ada perkataan "Jantan atau lelaki anaknya orang", maka dalam bahasa Bugis terdapat ungkapan: "*Woroane' anqna taue*"

Dengan demikian jika seorang lelaki tidak berani melakukan sesuatu perbuatan yang menuntut keberanian, maka ia biasanya disuruh mengganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Ungkapan lainnya sebagai berikut ini.

la mi woroane' maperenng'e' artinya yang lelaki hanya yang dapat menahan diri (untuk menguasai atau meredam perasaan takutnya).

Keteguhan Pendirian (Getteng dalam bahasa Bugis)

Nilai budaya 'getteng' dalam bahasa Bugis antara lain terdapat dalam ungkapan berikut ini.

Pura baqbaraq sompeqku,
Pura tengkisiq gulikku,
Uleqbireng ngi relennge' toallie",

yang artinya:

Layar telah kukembangkan
Kemudi sudah kupasang
Kupilih tenggelam daripada surat kembali.

Kewajaran (Appasitinajang dalam bahasa Bugis)

Nilai budaya "appasitinajang" antara lain dapat dilihat dalam petuah berikut ini,

Ajaq mugaukeng ngi padammu rupa tau ri rauq tessitinajae', yang artinya janganlah engkau perbuat sesuatu yang tidak patut terhadap sesama manusia.

Ripariajang ngi ri ajangge', riparilau' i ri laue', riparimaniang ngi ri maniangye', ripariaseq i ri aseqe', ripariawa i ri awae',

yang artinya

Ditempatkan di Barat yang Barat, ditempatkan di Timur yang Timur, ditempatkan di Selatan yang Selatan, ditempatkan di atas yang atas, ditempatkan di bawah yang bawah.

Ini menunjukkan bahwa seseorang dianggap bijaksana jika ia mampu atau pandai menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan tempatnya yang layak.

Nilai-nilai budaya daerah Sulawesi Selatan, khususnya Bugis-Makassar, tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan dikomunikasikan, dengan kiat yang baik, kepada masyarakat daerah lain yang mempunyai bahasa dan sastra daerah yang berbeda. Pada gilirannya akan menimbulkan pemahaman, kesenangan dan sikap positif terhadap budaya daerah tertentu. Konsekuensinya akan bisa ditransfer oleh daerah-daerah lain dengan menggunakan dan atau menggali nilai-nilai budaya yang relevan, sama atau mirip dengan bahasa dan sastra daerahnya masing-masing. Selanjutnya akan memainkan peran-peran bahasa dan sastra daerah dalam mendukung ketahanan budaya bangsa seperti tertera pada bagian terdahulu.

CARA MENINGKATKAN PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM UPAYA MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Peran bahasa dan sastra daerah yang telah diajukan sebelumnya akan lebih meningkat dalam memperkuat, bukan hanya mendukung, ketahanan budaya bangsa bila ditempuh cara-cara peningkatan berikut ini.

1. Inventarisasi dan penelitian atau kajian seluruh bahasa dan sastra daerah beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing ditinjau dari ketahanan budaya bangsa Indonesia. Untuk lebih menghayati komponen, kekuatan dan kelemahan setiap bahasa dan sastra daerah selanjutnya perlu ditempuh cara berikut ini.
2. Lomba ekspose, lisan dan atau tertulis, dan penulisan bahasa dan sastra daerah. Kegiatan dimulai dari tingkat kecamatan, antar kecamatan, antar-kabupaten/kota, dan terakhir antarpropinsi di tingkat nasional. Kegiatan ini akan lebih menarik kalau disertai dengan hadiah menarik bagi pemenang.

3. Membukukan, diterbitkan, karya bahasa dan sastra daerah yang berhasil menang dalam lomba tersebut dan karya-karya lainnya yang dipandang signifikan kontribusinya terhadap ketahanan budaya bangsa.
4. Meng-Indonesia-kan, menerjemahkan dan menerbitkan dalam bahasa Indonesia, karya-karya bahasa dan sastra daerah yang terangkat pada butir ketiga di atas. Dengan cara demikian, diharapkan akan lebih komunikatif terhadap daerah-daerah lain di tanah air Indonesia tercinta ini.
5. Menginkluskikan bahasa dan sastra daerah dalam berkomunikasi, lisan dan atau tertulis, dalam kehidupan sehari-hari. Cara ini akan lebih berpengaruh kalau ditampilkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin pemerintahan, keorganisasian, dan tokoh agama.

STRATEGI YANG PERLU DITEMPUH UNTUK MEMANTAPKAN PERAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DALAM RANGKA MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Peningkatan peranan bahasa dan sastra daerah yang telah diajukan sebelumnya akan mantap dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa bila ditempuh strategi-strategi berikut ini.

1. Kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, dan sejenisnya, dilakukan secara rutin dan terencana guna memelihara dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah dalam rangka memperkuat ketahanan budaya bangsa Indonesia.
2. Mengembangkan perpustakaan, pusat koleksi informasi dan komunikasi, tentang bahasa dan sastra daerah, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Koleksi bahasa dan sastra daerah minimal ada pada setiap daerah pemakai utama bahasa daerah itu. Koleksi yang sudah di-Indonesia-kan diperlukan pada setiap perpustakaan wilayah/daerah propinsi dan perpustakaan nasional, termasuk di kampus-kampus perguruan tinggi.
3. Bahasa dan sastra daerah dijadikan kurikulum muatan lokal (Kurlok) yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh daerah pengguna bahasa dan sastra daerah masing-masing. Kurikulum demikian minimal diperlukan pada jenjang SLTA ke bawah pada setiap jenis dan satuan pendidikan.
4. Mengajarkan dan mengujikan bahasa dan sastra daerah masing-masing pada setiap jenis, jenjang dan satuan pendidikan. Dengan

demikian tamatan setiap satuan pendidikan diharapkan mempunyai kompetensi minimal, sesuai jenjangnya, dalam memahami, menggunakan dan atau mengembangkan bahasa dan sastra daerah masing-masing.

5. Mengusulkan dan atau mengembangkan peraturan daerah (Perda) yang menopang pemeliharaan dan pengembangan, penulisan dan penerbitan bahasa dan sastra daerah masing-masing. Dalam hal ini tentu saja tidak boleh dilupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna menjaga sinergitas dengan budaya bangsa Indonesia.

PENUTUP

Sesudah diajukan uraian singkat di atas, ada baiknya dikemukakan beberapa simpulan yang langsung dirangkaikan dengan saran terkait seperti tertera di bawah ini.

1. Penggunaan bahasa dan sastra daerah sebagai "sisipan" dalam berkomunikasi bahasa Indonesia di daerah tertentu menimbulkan sentimen, semangat atau perasaan kesamaan, senasib-sepenanggungan, dalam suatu daerah, propinsi dan atau kabupaten/kota. Konsekuensinya, akan memudahkan masyarakat bertindak, berbuat sesuai dengan pesan yang tersurat dan tersirat dalam komunikasi itu. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa di bahasa dan sastra daerah "cukup berarti" perannya dalam menentukan sikap masyarakat di daerah terhadap program-program pembangunan dan pemerintahan yang sedang digalakkan. Untuk itu, disarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan biaya secara terpadu untuk memelihara dan mengembangkan, penulisan dan penerbitan naskah-naskah bahasa dan sastra daerah.
2. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sastra daerah Sulsel yang dapat memperkuat ketahanan budaya bangsa antara lain: *sirik, reso, lempu, warani, getteng* dan *appasitinajang*. Kalau aparat pemerintah, daerah dan pusat, mengamalkan secara konsekuen nilai-nilai ini dalam prilakunya sehari-hari, maka kemungkinan besar negara kita tidak akan mengalami krisis multi dimensi yang begitu lama, utamanya krisis moral yang diwarnai oleh gejala korupsi. Untuk itu, kepada pemerintah pusat agar menganggarkan penerjemahan dan penerbitan sastra daerah yang berisi nilai-nilai tersebut dan nilai-nilai lainnya yang relevan dan menopang atau memperkuat ketahanan budaya bangsa, untuk

- dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan utama di sekolah-sekolah, pada semua jenjang, jenis, dan satuan pendidikan.
3. Karena pengembangan bahasa dan budaya daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah propinsi, sedangkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan pemerintah pusat (PP No. 25/2000), maka seharusnya anggaran pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah oleh pemerintah daerah propinsi bersama kabupaten/kota, dan untuk terjemahan dan penerbitan bahasa Indonesia-nya masing-masing oleh pemerintah pusat.
 4. Semua cara dan strategi, atau upaya yang telah diajukan untuk meningkatkan dan memantapkan peran bahasa dan sastra daerah dalam rangka memperkuat ketahanan budaya bangsa tidak akan terlaksana tanpa dukungan dana yang memadai, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atas peran serta dan partisipasi aktif masyarakat lokal-nasional. Kalau memang kita mempunyai komitmen untuk melaksanakan isi Pasal 32 dan Pasal 36 UUD 1945 beserta penjelasan dan perubahannya, maka disarankan peningkatan secara bertahap anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan sastra yang menopang kekukuhan/ketahanan budaya bangsa Indonesia.

BAHAN BACAAN

- Abu Hamid. 1997. Keterbukaan, Kepribadian dan Integrasi Nasional (Makalah), Makassar; Panitia Peringatan Hari Jadi ke 328 Sulsel.
- Fachruddin, A.E. 1991. Beberapa Nilai Sosial Budaya Dalam Ungkapan dan Sastra Bugis. (Makalah Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar), Makassar: IKIP Ujung Pandang.
- Hasan Alwi dan Dendy Sugono (eds.). 2000. Politik Bahasa (Risalah Seminar Politik Bahasa). Jakarta: Pusat Bahasa, Depdiknas.
- Koentjaraningrat (ed.) 1976. Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Martono, Daniel T. Sparringa (eds.). 2003. Hidup Berbangsa dan Etika Multikultural. Surabaya: Forum Rektor Indonesia Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya.
- Mochtar Husein. 1997. Nilai-Nilai Fundamental Budaya Sulsel Sebagai Unsur Pemeersatu Bangsa (Unsur Etnis Mandar). (Makalah Panitia Hari Jadi Ke 328 Sulsel. Makassar.

- Nuridin Yatim. 1997. Aspek-Aspek Budaya Daerah Yang Menunjang Ketahanan Budaya Nasional (Unsur Etnis Makassar). (Makalah Panitia Hari Jadi Ke 328 Sulsel. Makassar.
- Stanislaus Sandarupa. 1997. Komponen-Komponen Budaya Lokal Dalam Menunjang Integrasi Nasional (Etnis Toraja). (Makalah Panitia Hari Jadi Ke 328 Sulsel. Makassar.
- Zainal Abidin Farid, A. 997. Nilai Budaya Sebagai Faktor Pemantapan Jatidiri Bangsa. (Makalah Panitia Hari Jadi Ke 328 Sulsel. Makassar.

**PERAN SKH WASPADA DALAM MEMELIHARA
BAHASA DAN BUDAYA DAERAH**

Sofyan Harahap

PERAN SKH WASPADA DALAM MEMELIHARA BAHASA DAN BUDAYA DAERAH

Sofyan Harahap

I. PENDAHULUAN

Memelihara bahasa dan budaya daerah tentunya tidak hanya tugas orang-orang pers semata, tetapi tanggung jawab kita--semua elemen bangsa-- yang cinta bahasa dan kebudayaan Indonesia. Adalah benar, kontribusi pers dalam meningkatkan minat baca, memelihara bahasa dan budaya tidak perlu diragukan lagi. Proses kemajuan bahasa Indonesia dan kebudayaan daerah sering kali diketahui masyarakat lewat pemberitaan media massa. Kalaupun ada pihak yang menggugat bahwa sebenarnya pers punya andil dalam merusak bahasa dan pelit dalam memberikan kolom-kolomnya, hal itu hendaknya tidak perlu dibesar-besarkan karena pers punya alasan untuk itu.

Kontroversial mengenai peran media massa dalam memajukan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar kelihatannya tak pernah surut dari dulu hingga saat ini. Masalahnya, karakteristik cara kerja insan pers dituntut harus cepat. Cepat dalam mencari berita di lapangan dan cepat pula dalam menuliskan beritanya di media masing-masing di tempat si wartawan bekerja agar masyarakat luas cepat mendapatkan informasi terbaru.

II. BAHASA JURNALISTIK

Pekerjaan wartawan memang dikejar waktu (*deadline*), sehingga bagi mereka yang bertugas di lapangan dalam melaksanakan tugas mencari berita (*reporting*) maupun bagi redaktur yang memperbaiki dan menilai berita (*editing*) sama-sama dikejar waktu. Mereka bekerja dengan waktu yang terbatas. Jadi, *deadline* merupakan poin penting yang mutlak harus dipatuhi oleh segenap insan pers di mana pun dia berada.

Pekerjaan wartawan yang selalu dikejar-kejar waktu itulah yang membuat komunitas pers seringkali membuat kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia baku. Hal ini bisa terjadi karena insan pers tidak punya banyak waktu untuk berpikir dalam menulis berita yang baik dan benar sesuai keinginan pakar bahasa Indonesia. Tuntutan *deadline* tidak bisa diabaikan oleh insan pers. Konsekuensi

logis dari karakteristik kerja wartawan dan redaktur itulah yang melahirkan fenomena variasi bahasa pers, populer dengan sebutan: **bahasa jurnalistik**.

Pertanyaannya sekarang: Apa dan bagaimana bahasa jurnalistik itu?

Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh insan pers yang bekerja di media cetak maupun elektronik. Sepintas masyarakat awam menilai tidak ada perbedaan bahasa jurnalistik dengan bahasa Indonesia yang dipakai dalam penulisan buku, pidato, seminar dan lain-lain karena sama-sama bisa dimengerti. Namun kalau diamati dengan seksama, masyarakat (pembaca) yang kritis bisa menemukan dan merasakan perbedaannya.

Mengingat fungsi media massa dan karakteristik kerjanya yang selalu diburu-buru oleh waktu guna mengejar *deadline*, maka pemakaian bahasa di kalangan insan pers pun punya ciri khas, yakni: cenderung singkat, padat, sederhana, menarik, jelas, benar dan tentunya harus komunikatif. Tujuan insan pers menggunakan bahasa jurnalistik tentunya agar pesan-pesan berupa informasi dapat dimengerti oleh komunikan tanpa harus mengerutkan kening. Ingat!, pembaca media massa tidak hanya dari kalangan orang-orang berpendidikan tinggi saja, tetapi juga kalangan menengah dan bawah (*wong cilik*).

Sifat bahasa jurnalistik anti dalam penggunaan kalimat panjang seperti halnya dalam penggunaan bahasa buku dan pidato-pidatoan para pejabat pemerintah sehingga bahasa jurnalistik lebih mudah dimengerti oleh masyarakat karena ditulis dalam bentuk berita langsung (*straight news*) sehingga poin yang penting sengaja ditempatkan di bagian atas menjadi teras berita (*lead*) sehingga dengan membaca judul dan *lead*-nya saja pembaca sudah mengerti akan isinya.

Berdasarkan pengalaman kita sehari-hari dalam membaca surat kabar, jarang yang lama, berkisar hanya setengah jam saja. Itu sebabnya berita dibuat seefektif dan seefisien mungkin dengan menggunakan kalimat yang pendek-pendek. Informasinya ditulis dengan menggunakan gaya piramida terbalik. Jadi, para wartawan dan redaktur selalu ingin memuaskan pembacanya, di mana keingintahuan pembaca langsung terjawab.

Bahasa jurnalistik lahir dan berkembang membentuk variasi tersendiri dalam masyarakat sesuai dengan tuntutan pasar di zamannya. Bagaimanapun juga fungsi yang diemban media massa dan karakteristiknya yang mementingkan laporan tercepat dan

keterbatasan halaman dan waktu, membuat komunitas pers tidak bisa divonis merusak kaidah dan perkembangan bahasa Indonesia.

Kalau terkadang para wartawan dan redaktur di media massa membuat kesalahan dalam menulis berita dan membuat judul yang dipotong pada awalnya dan dibuat singkat, tetapi hal itu bukanlah tanpa sebab. Dasar utamanya untuk efisiensi kata mengingat kolomnya terbatas. Dalam media massa cetak ada kiat membuat judul agar menarik perhatian pembacanya, sehingga tentu saja berbeda dengan judul-judul dalam penulisan buku ilmiah.

Sebagaimana bahasa-bahasa lainnya yang berkembang di masyarakat, maka bahasa jurnalistik pun terus berkembang mengikuti zamannya, dan tidak terbantah punya andil yang cukup besar dalam memperkaya--khususnya dalam menambah perbendaharaankata-kata baru--khasanah bahasa Indonesia yang juga terus berkembang sesuai dengan apa yang dialami oleh pemakainya.

III. RUBRIK SENI DAN BUDAYA

Di surat kabar, majalah maupun media elektronik (radio dan televisi) Rubrik Seni & Budaya mendapat tempat khusus. Rubrik ini selalu diprioritaskan. Padahal, segi komersialnya kurang sekali. Pemasang iklan tidak berminat memasang iklan di halaman tersebut. Mengapa? Jawabnya tiada lain karena hanya kalangan tertentu saja yang menyenangkannya.

Pada dasarnya, media massa berkewajiban dalam mengembangkan seni dan budaya di daerahnya masing-masing. Ini terkait dengan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Itu sebabnya media massa membuka rubrik yang berkaitan dengan pendidikan, seni dan budaya. Hal ini membuktikan media massa tidak semata-mata mengejar profit, tetapi juga memiliki idealisme dalam memajukan seni dan budaya khususnya di daerahnya masing-masing.

Sayangnya, kegiatan seni dan budaya berupa karya teater, tarian dan lain-lain dalam bentuk pentas (pegelaran) masih belum memasyarakat. Sulit mencari kegiatan seni dan budaya yang berkualitas tinggi, kebanyakan dilakukan kurang persiapan sehingga kurang menarik perhatian masyarakat pecinta seni dan budaya. Penontonnya sedikit. Begitu juga kegiatan budaya di suatu daerah oleh etnis tertentu terbilang minim. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya keseriusan dari pekerja seni dan para pembina seni dan budaya itu sendiri. Faktor kurangnya dana selalu menghantui pekerja seni karena umumnya pagelaran seni sulit dijual. Kiranya hal ini menjadi perhatian

dari pemerintah daerah sehingga kegiatan seni dan budaya tidak semakin suram di masa mendatang

IV. PERAN SKH WASPADA

SKH *Waspada* terbit sejak 11 Januari 1947 di Medan. Saat ini terbit dengan 16 halaman setiap harinya. Porsi pemuatan berita lebih dari 60 persen, sisanya features, foto, opini, tajuk, agenda, karikatur plus iklan. Mengapa porsi berita dominan? Hal itu sejalan dengan tuntutan pasar, di mana masyarakat ingin mengetahui perkembangan dan informasi seputar kejadian terkini di dalam dan luar negeri.

Namun begitu, SKH *Waspada* membuka berbagai ragam rubrik, di antaranya Rubrik Budaya setiap hari Minggu satu halaman penuh. Selain itu, berbagai kegiatan seni dan budaya selalu diekspose di halaman berita. Sehingga bisa dikatakan hampir setiap hari ada saja kegiatan seni dan budaya dari puluhan etnis di Sumut dan Aceh yang dimuat di berbagai halaman, seperti halaman Sumut, Aceh, Medan Metropolitan, Nusantara dan Nasional.

Halaman Budaya *Waspada* berisi karangan khas (*features*) beraneka kegiatan seni dan budaya masyarakat Sumut dan Aceh, ada juga rubrik puisi, cerita pendek, profil seniman dan karangan bebas berupa kritik dari peminat seni dan budaya.

Sayangnya, karangan bebas dari para seniman dan budayawan yang berkualitas relatif sedikit. Jarang masuk ke redaksi. Hal ini menimbulkan tanda tanya.

Hemat saya, berdasarkan pengamatan dan omong-omong dengan Redaktur Budaya *Waspada* (Sdr. Adi Mujabir) penulis seni dan budaya cenderung malas menulis di media massa. Faktor penyebabnya bisa karena honorinya kecil, kurang mampu menulis dan takut menimbulkan polemik. Faktanya, sesama pekerja seni dan budaya selalu berpolemik, saling menjelekkkan penampilan rekannya dan polemik itu berlangsung cukup lama, berlarut-larut serta tidak mendidik.

SKH *Waspada* berupaya meniadakan polemik. Kalaupun ada tanggapan cukup sekali saja dimuat, setelah itu ditutup karena berdasarkan pengalaman polemik hanya membuang-buang waktu, halaman dan pikiran.

SKH *Waspada* dalam kiprahnya memelihara bahasa yang pertama tentunya dengan cara meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) para wartawan di lapangan, baik yang status koresponden daerah maupun reporter kota dan staf redaksi. Caranya dengan saling melakukan koreksi jika terjadi kesalahan dalam ejaan maupun kalimat.

Selain itu, setiap enam bulan sekali mendatangkan pakar bahasa dari kalangan kampus (USU dan Unimed) untuk ceramah sekaligus tanya jawab (diskusi) seputar pemakaian bahasa di SKH *Waspada* dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan serupa di penerbitan berikutnya.

Mengingat sirkulas SKH *Waspada* sebagian besar di daerah-daerah SKH *Waspada* terkadang memuat istilah dan kata-kata yang populer di daerah (Sumut dan Aceh). Memasukkan kata-kata berbahasa daerah pada awalnya dengan mengartikannya, namun bila sudah populer tidak lagi perlu dijelaskan. Umumnya untuk berita-berita daerah penggunaan bahasa daerah sebagai warna dan daya tarik dibenarkan, namun untuk konsumsi halaman depan hal itu dilakukan secara selektif.). Ungkapan *kombur malotup* (Asahan), *kupak-kapik*, *rorak* (Labuhanbilik), *hanapeng* (Aceh) kini sudah umum dipakai dalam masyarakat di Sumut dan Aceh.

Sedangkan untuk pendidikan masyarakat, SKH *Waspada* membuka rubrik seputar bahasa Indonesia yang benar. Rubrik ini bekerjasama dengan Balai Bahasa Medan sehingga masyarakat luas mengerti bahasa yang baku dan tidak baku serta cara penggunaannya dalam kalimat. Untuk memelihara budaya daerah agar tetap terpelihara dengan baik, SKH *Waspada* selalu aktif dalam meliput event budaya, seperti Pesta Mejuah-juah di Nias, Pesta Danau Toba di Parapat, Pesta Adat Karo, Sibolga, Melayu dan lain-lain. Kontribusi *Waspada* dalam konteks peliputan berita dengan membuka lembaran khusus sejak persiapan sampai event budaya tersebut berlangsung.

Satu hal yang juga dilakukan SKH *Waspada* saat ini adalah memasyarakatkan budaya membaca di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Bagian redaksi dan pemasaran saling bekerjasama mengajak pihak sekolah yang punya majalah dinding dengan memberikan surat kabar gratis untuk dipajangkan di sekolah agar komunitas sekolah dapat membacanya. Memang hanya satu lembar, namun bagi komunitas sekolah yang ingin membeli untuk dibawa pulang disediakan dengan harga khusus hanya Rp1000,00 per eksemplarnya. Diharapkan dari partisipasi peran *Waspada* tersebut dapat memupuk dan menumbuhkembangkan minat membaca di kalangan pelajar dan guru di sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelajar yang tentunya bermanfaat buat masa depan mereka ke depan.

Justru itu, Kongres Bahasa Indonesia VIII 2003 merupakan momentum untuk mendorong semua elemen bangsa peduli pada pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, lewat

kongres ini diharapkan pula semua elemen bangsa memiliki komitmen yang tulus untuk mengatasi kendala yang ada selama ini bagi perkembangan bahasa dan budaya daerah.

V. PENUTUP

Bahasa adalah alat ilmu pengetahuan, dan bahasa seseorang adalah cermin jalan pikirannya. Karenanya, penggunaan bahasa Indonesia haruslah baik, baik lisan maupun tulisan. Peran media massa sangat signifikan dalam meningkatkan dan memajukan bahasa Indonesia. Untuk itu, pengelola media massa haruslah orang-orang yang komitmen dengan perkembangan bahasa Indonesia. Begitu juga dalam memajukan perkembangan budaya daerah yang beraneka ragam media massa hendaknya tidak pilih kasih karena masing-masing etnis punya ciri khas dan kelebihan masing-masing.

SKH *Waspada* merasa berkewajiban untuk memajukan bahasa dan budaya daerah. Hal itu dibuktikan dengan liputan yang berkaitan dengan bahasa, seni dan budaya, termasuk membuka rubrik khusus. Namun begitu, kemajuan bahasa dan budaya daerah tidak lepas dari peran pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, untuk menggairahkan budaya membaca sasaran utama yang harus segera dilakukan adalah mendekati komunitas siswa dan mahasiswa. Caranya dengan menyediakan bahan bacaan yang bermutu dan memotivasi mereka untuk membaca karena manfaatnya sangat besar. Kiranya departemen terkait menaruh perhatian serius akan pentingnya budaya membaca ini dengan terlebih dahulu menyingkirkan hambatan-hambatannya, antara lain mahalnnya harga buku, sedikitnya buku yang berkualitas, mengawasi dan mengurangi menonton televisi (imbauan bagi orang tua), termasuk meningkatkan kemampuan anak didik membaca. Kalau ada anggapan kemampuan membaca dianggap selesai ketika pendidikan dasar telah terlewati, pandangan seperti itu sangatlah keliru. Sebab, sebagaimana perlunya kemampuan menulis diasah, membaca pun memerlukan keahlian. Anak didik harus dibiasakan membaca dengan cepat dan tepat serta mengerti apa yang sedang dibaca dan dapat pula bersikap kritis serta mengambil kesimpulan dan manfaat dari buku yang dibacanya. Dengan penumbuhan budaya membaca maka setiap orang akan merasakan sebagai suatu kebutuhan sehingga apabila tidak membaca sesuatu yang bermutu sehari saja terasa ada yang kurang dalam dirinya.

* Penulis adalah Redaktur Eksekutif SKH *Waspada* di Medan, Sumatera Utara

**KEARIFAN BAHASA LOKAL PADA PERS BERBAHASA
INDONESIA**

Arwan Tuti Artha
Redaktur Bahasa SKH Kedaulatan Rakyat.

KEARIFAN BAHASA LOKAL PADA PERS BERBAHASA INDONESIA

Arwan Tuti Artha

Redaktur Bahasa SKH Kedaulatan Rakyat.

Membaca Masalah

BAHASA, sebagaimana ditunjukkan Leonard Bloomfield (1995) memainkan peranan penting dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bahasa pun berkembang dari waktu ke waktu. Bahasa juga mempunyai pengaruh yang luar biasa, termasuk yang membedakan manusia dari binatang. Apabila dibicarakan dalam forum kongres, memang benar karena bahasa tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Termasuk pers yang memanfaatkannya sebagai alat komunikasi dengan publik.

Oleh sebab itu, bahasa -- terutama dalam pers cetak -- sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat. Apalagi bahasa itulah yang dibaca secara serentak di seluruh wilayah, sehingga diharapkan ada peran spesifik pada bahasa dan pers itu sendiri, yakni bisa sebagai *panutan*, sebagai referensi atau sebagai contoh yang benar. Artinya, bahasa pers tidak bisa membebaskan diri dari aturan kebahasaan. Bahasa pers harus diciptakan dengan kesadaran meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia (terutama pers berbahasa Indonesia) dan bahasa daerah (bagi pers berbahasa daerah). Tentu, bukan sebaliknya untuk merusak dan membinasakan bahasa.

Apabila pers selalu melakukan kesalahan bahasa atau tidak memilih penggunaan bahasa yang cerdas, berkualitas dan sesuai dengan situasinya, kesalahan tersebut akan berpengaruh pula pada kesalahan pemakaian bahasa pada masyarakat, mengingat perannya sebagai *panutan* tadi. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan wartawan dalam menulis berita, antara lain kesalahan ejaan untuk penulisan kata, baik dalam menulis kata dasar, kata imbuhan, kata pinjaman maupun kata serapan. Meskipun, pelan-pelan kesalahan itu kian mengecil, berkat adanya kesadaran kebahasaan di kalangan insan pers. Kesadaran kebahasaan inilah yang kita harapkan mampu menuntun pembaca untuk tidak melakukan kesalahan.

Tulisan ini, setidaknya akan membicarakan masalah yang berkaitan dengan posisi surat kabar daerah, kekuatan bahasa di luar bahasa Indonesia dan peran SKH *Kedaulatan Rakyat* dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Tulisan ini juga dikerjakan dalam kesibukan, sehingga tidak tersedia waktu yang cukup panjang untuk melakukan penelitian yang lebih serius lagi.

Posisi Koran Daerah

Semenjak terjadi perubahan politik pasca Orde Baru, kita melihat pers banyak bertumbuhan. Seiring dengan semakin banyaknya media informasi itu, penggunaan bahasa informasi pun semakin bervariasi. Di samping itu, karena diterapkannya sistem desentralisasi melalui otonomi daerah, kita pun melihat banyak media informasi yang membidik wilayah-wilayah kedaerahan. Sebab, kewenangan yang diberikan secara lebih pada daerah itu sangat memungkinkan terjadinya informasi menarik dari daerah. Oleh sebab itu peran pers (media informasi) daerah menjadi sangat besar. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Sejauh mana peran itu menyangkut pada pemeliharaan bahasa Indonesia, ketika banyak muncul ungkapan dalam bahasa daerah.

Pada masa lalu, pers atau koran daerah hidupnya kembang-kempis, tirasnya kecil dan selalu kalah bersaing dengan pers pusat. Orientasi informasi pada masa lalu itu, memang masih sentralistik sehingga pers daerah belum terlalu memfokuskan pada peristiwa-peristiwa daerah. Boleh dikata, pers daerah pada masa lalu hanya memperoleh sisa-sisa dari informasi yang sudah ditangkap oleh pers pusat.

Setelah terjadi perubahan politik dan kekuasaan, pers daerah mulai bangkit dan mendapat tempat, bersamaan dengan banyak tumbuhnya kebebasan pers. Kehadiran koran daerah menjadi sangat penting sebagai penyampai informasi kepada masyarakat di daerah. Sebab banyak sekali kejadian dan hal yang perlu diinformasikan kepada publik. Peristiwa-peristiwa daerah itu, sebenarnya tak kalah hebat dengan peristiwa di pusat pada masa lalu. Karena pers daerah harus bisa mengakomodasi peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah, selain juga disebabkan adanya sistem otonomi daerah yang diberlakukan dan terjadinya pemberdayaan daerah, pers daerah kemudian menjadi sentral bagi informasi di daerah.

Misalnya, terjadinya peristiwa menggemparkan di Purbalingga karena Sumanto makan mayat. Terjadi penyelewengan dana atau terjadi politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota legislatif, gunung meletus, gedung sekolah dibakar, perampokan ratusan juta rupiah di siang bolong terhadap nasabah bank, dan seterusnya, yang menjadi wacana menarik di daerah-daerah.

Di sisi lain, sangat mungkin pengelola pers daerah memikirkan bagaimana bahasa yang paling tepat disampaikan pada pembaca di daerah. Ungkapan bahasa Indonesia murni kadang tidak terlalu pas

atau belum mewakili pengertian yang sesuai. Pada saat itu tak terhindarkan penggunaan bahasa daerah yang sudah sangat dikenal dan akrab dipakai setiap hari. Dipilihnya ungkapan dalam bahasa daerah yang lebih mengena untuk menunjukkan objek informasi, artinya ada kekuatan bahasa di luar bahasa Indonesia yang perlu diperhatikan. Semakin banyak koran daerah diterbitkan atau banyak dibidiknya terbitan khusus daerah, diharapkan bisa menampung ungkapan-ungkapan dalam bahasa daerah. Ini menguntungkan, karena bahasa daerah akan tetap memperoleh aktualisasinya dan penyalurannya melalui media formal.

Kekuatan Bahasa di Luar Bahasa Indonesia

Masyarakat Indonesia mengenal bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing sebagai alat komunikasi. Pada saat apa kita menggunakan bahasa Indonesia dan pada saat apa kita menggunakan bahasa daerah, kita pahami sebagai penerapan bahasa untuk situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, untuk komunikasi antaretnik, dipergunakanlah bahasa Indonesia. Sedang untuk komunikasi interetnik, digunakan bahasa daerah. Namun dalam praktiknya bisa terjadi percampuradukan bahasa. Di tengah penggunaan bahasa Indonesia, bisa saja muncul bahasa daerah atau bahasa asing.

Kenyataan semacam itu, ternyata juga bisa ditemukan dalam pers Indonesia, sehingga selain digunakan bahasa Indonesia ada bahasa lain yang dipergunakan. Munculnya kekuatan bahasa di luar bahasa Indonesia, bisa kita pandang sangat positif karena pemungutan bahasa daerah itu menunjukkan kuatnya posisi koran daerah dan pendekatan pers pada masyarakat. Pemungutan bahasa daerah juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. Kenyataan ini didukung pula dengan penyediaan rubrik untuk menampung secara khusus informasi kedaerahan pada koran-koran pusat. Surat kabar yang terbit di daerah Jawa Timur, sangat mungkin bila memanfaatkan bahasa Jawa Timur sebagai bahasa informasinya. Apalagi koran tersebut tidak mungkin beredar di wilayah luar Jawa Timur. Begitu pula dengan surat kabar yang terbit di daerah Jawa Barat. Tentunya, akan terjadi pula pada surat kabar yang terbit di daerah Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, atau Papua. Sebab, istilah yang berasal dari bahasa daerah itu diduga lebih pas dan lebih bisa dipahami daripada misalnya kurang tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Koran *Jawa Pos*, misalnya, mempunyai *Radar Solo* yang ditujukan

untuk wilayah pembaca Solo, sedang *Kompas* menyediakan halaman Jawa Tengah dan DIY untuk melayani masyarakat pembaca di wilayah tersebut. Begitu pula dengan *Republika* melayani pembaca di wilayah Jawa Tengah dan DIY melalui rubrik "Kalam". Pada masa lalu, kecenderungan semacam itu tidak tampak. Dengan demikian, digunakannya bahasa daerah menjadi sangat relevan. Artinya, ada kekuatan bahasa di luar bahasa Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi. Kekuatan bahasa di luar bahasa Indonesia itu terutama mengacu pada bahasa daerah.

Sebagai contoh:

1. *Nggilani*, kebudayaan lokal jadi objek turisme.
2. Tawar-menawar masih *alot*.
3. Panwaslu *sambat* kepada Bupati.
4. Pedagang *klitikan* curi motor.
5. Sekarang *nembung*, besok sudah ada.

Contoh-contoh masuknya bahasa daerah dalam penyapaian informasi ini pada hemat kita masih tergolong santun, sopan, atau memang dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan logis. Bagaimana dengan pemilihan bahasa daerah (Jawa) yang kurang santun, sopan dan terkesan vulgar? Barangkali hal tersebut juga fenomena dari adanya kebebasan penggunaan bahasa pada pers daerah.

Sebagai contoh:

1. Keblinger Wedokan Montok, Tekor 18 Juta
2. Ngutil Kaos Dikemplengi di Malioboro
3. Ditembak Bokonge, Gembong Malmot Semarang Njungkel
4. Copet di Bringharjo Soyo Edan
5. Ngembat Duit Majikan Sopir Toko Dipenjara

Peran SKH Kedaulatan Rakyat

Apakah pers daerah tidak terlalu setia menggunakan bahasa Indonesia? Atau, justru memanfaatkan kekayaan bahasa daerah, sehingga penggunaan bahasa komunikasinya lebih diperkaya dengan ungkapan lokal. Dari beberapa pengamatan akhir-akhir ini kecenderungan memanfaatkan kekayaan bahasa daerah memang tampak cukup besar. Begitu pula dengan Surat Kabar Harian (SKH) *Kedaulatan Rakyat* -- selanjutnya ditulis KR -- sebagai surat kabar daerah terbit di Yogyakarta. Tak bisa membebaskan diri dari penggunaan bahasa Jawa, untuk ungkapan-ungkapan tertentu. Kita menyadari bahwa KR adalah surat kabar berbahasa Indonesia, tetapi karena terbit di wilayah kultur Jawa, tak bisa terhindar dari penggunaan

bahasa lokal.

Dalam kaitannya dengan pemeliharaan bahasa daerah, pers yang terbit di daerah, setelah terjadi desentralisasi dan pengaruh globalisasi, tentunya tak bisa ditinggalkan. Munculnya penggunaan bahasa daerah itu, yang menyebabkan terjadinya campur kode, dwibahasa atau multilingual, menjadi sangat kuat. Apalagi hanya dengan bahasa itulah ungkapan yang tepat diberikan kepada publik. Kalau diganti dengan ungkapan lain akan menjadi berbeda pengertiannya. Sehingga, apabila bahasa yang muncul menjadi pengucapan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah alias terdapat dwi bahasa, kita bisa menempatkan di mana posisi pers lokal tersebut.

Secara kebetulan KR mempunyai rubrik *Mekar Sari* yang terbit setiap hari Kamis. Rubrik tersebut menggunakan bahasa Jawa sebagai wahana komunikasinya, memuat cerita pendek (*cerkak*), *pedalangan*, *petung*, puisi (*geguritan*), tembang (*macapat*), laporan, dll. Pemunculan rubrik tersebut ditujukan khususnya pada mereka yang berminat pada bahasa dan budaya Jawa, untuk menampung gagasan, informasi, kreativitas, yang ditulis dalam bahasa Jawa. Dalam pemuatannya di KR, rubrik tersebut berdampingan dengan muatan-muatan dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itulah, ada beban khusus bagi pers lokal semacam KR ini yang dikaitkan dengan proses pemeliharaan bahasa daerah (Jawa).

Rubrik tersebut, karena menggunakan bahasa Jawa, artinya tersedia media pengembangan dan media pembelajaran terhadap bahasa Jawa. Kalau selama ini bahasa Jawa hanya bisa dipahami oleh generasi tua, diharapkan generasi muda pun bisa memahami. Atau, setidaknya ada keinginan bertanya apa arti kata-kata yang dituangkan dalam rubrik tersebut. Rubrik tersebut, dari hari ke hari ternyata memiliki peminat yang tinggi sebagaimana data pengunjung online yang dicetak 5 Agustus 2003, tercatat 12.587 Hits.

Dari sinilah KR ikut serta memelihara pelestarian bahasa Jawa. Keprihatinan kita selama ini adalah kian sedikitnya penutur bahasa Jawa, karena hampir semua informasi disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bahkan dalam menyongsong globalisasi, sudah banyak masuk informasi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Apabila tidak ada kepedulian untuk melestarikan, dikhawatirkan generasi muda kita akan tidak mampu lagi menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi mereka. Dari pembaca yang cukup banyak itu, kita harapkan rubrik *Mekar Sari* ini tidak hanya bermanfaat bagi pembaca kalangan tua tetapi juga dibaca oleh pembaca generasi muda.

Mengakhiri Masalah

Kita menyadari bahwa bahasa mempunyai peran yang sangat luar biasa. Pada masa lalu, peran dan fungsi bahasa yang lebih banyak diatur oleh pemerintah melalui lembaga otoritas kebahasaan, seperti Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sekarang harus diserahkan pada media. Media itulah yang harus berperan sebagai polisi bahasa. Sehingga, ungkapan-ungkapan yang muncul dalam media tersebut bukanlah ungkapan yang tidak gramatikal, bukan ungkapan yang vulger atau kurang sesuai dengan massa pembacanya. Tetapi, ungkapan yang bisa mendukung citra media. Citra media itu sendiri sesungguhnya tercermin dari bahasa yang digunakannya.

Untuk itulah, media sebaiknya juga menjalankan peran tersebut dengan menempatkan redaktur sunting atau redaktur bahasa, yang bertugas menjaga pemakaian bahasa informasi. Beban tersebut sebenarnya tidak perlu semata-mata diberikan secara khusus. Sebab, redaktur masing-masing halaman pada dasarnya juga bisa berfungsi sebagai penjaga penggunaan bahasa.

Pada koran-korannya, umumnya sudah memiliki perangkat tersebut, sehingga relatif pemakaian bahasa informasi lebih terarah, lebih santun, lebih cerdas, lebih elegan. Pemakaian bahasa juga lebih terkendali, tidak terbawa oleh arus emosional atau terbawa pada penggunaan bahasa secara vulger. Kalaupun harus menggunakan kekuatan bahasa di luar bahasa Indonesia, kata-kata tersebut tetap memberi kesan tidak asal comot.

ADAKAH HARAPAN BAGI PERS BERBAHASA SUNDA?

Karno Kartadibrata *)

Pengantar

Sejak koran berbahasa Sunda *Sipatahoenan* terbit pada tahun 1923 di Tasikmalaya, pers berbahasa Sunda sampai sekarang tidak pernah mati. Pada tahun 60-an misalnya, ketika koran *Sipatahoenan* tidak terbit lagi, penerbitan pers berbahasa Sunda justru semakin marak. Seolah-olah berlomba, beberapa majalah seperti *Langensari*, *Sari*, *Cempaka*, *Baranangsiang*, *Sangkuriang* dan sebagainya bermunculan. Sebelumnya, pada tahun 50-an, telah terbit majalah *Warga* dan *Mangle*. Memang beberapa majalah kemudian hilang dari peredaran, tetapi majalah *Mangle*, koran mingguan *Kujang*, *Galura* dan *Giwangkara* tetap terbit sampai sekarang.

Dengan demikian, di saat sekarang pun ketika pers telah masuk ke dunia industri dan informasi menjadi komoditi yang berakibat kompetisi semakin hebat, pers berbahasa Sunda tetap bertahan, meskipun masih banyak kekurangan baik dalam aspek permodalan, teknologi maupun manajemen. Artinya, masih banyak yang perlu dibenahi bila pers berbahasa Sunda ingin tetap hidup dan mencapai kedudukan setara dengan pers lainnya.

Tulisan ini bermaksud memaparkan beberapa permasalahan pokok yang dihadapi pers berbahasa Sunda dewasa ini. Selanjutnya dicoba mengemukakan beberapa gagasan sebagai jalan keluar.

Lima Pijakan

Faktor apakah sebenarnya yang mendorong beberapa pihak di Jawa Barat, baik perorangan maupun lembaga, menerbitkan pers berbahasa Sunda? Dorongan apakah yang paling utama, komersial atau idealisme? Daripada menerbitkan pers berbahasa Sunda bukankah lebih menguntungkan menerbitkan pers berbahasa Indonesia?

Bila kita menengok ke belakang, ketika bangsa kita berupaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan pers menamakan dirinya "pers pejoang", idealismelah yang menjadi dorongan utama. Sebagai contoh, ketika koran "*Sipatahoenan*" terbit, tidak seorang pun pengelolanya mendapat bayaran atau gaji. Mulai dari pimpinan redaksi sampai pesuruh, semuanya membaktikan diri untuk Tanah Air. Uang hasil yang tersisa sesudah pengeluaran biaya, dikumpulkan untuk menambah modal.

Dengan demikian, pers merupakan lembaga sosial-kultural dan bukan lembaga bisnis. Baru pada waktu kemudian, pertimbangan mencari keuntungan masuk perhitungan.

Sampai sekarang pun, pengusaha pers berbahasa Sunda masih sering mengatakan, dorongan utama mereka menerbitkan koran atau majalah semata-mata karena idealisme belaka (terkenal ucapan mereka, "*ngamumule basa jeung budaya Sunda*") yang berarti, "memajukan bahasa dan kebudayaan Sunda". Tetapi, sebagaimana juga berusaha di bidang lainnya, tentu saja bahan baku harus dibeli dan karyawan harus digaji. Oleh karena itu, perhitungan keuntungan pada akhirnya tidak mungkin luput dari pertimbangan. Dengan kata lain, setiap pengusaha pers berbahasa Sunda sebenarnya mempunyai juga pertimbangan bahwa membuka usaha di bidang pers bukan samasekali tidak membawa keuntungan.

Ada beberapa pijakan yang memperkuat pertimbangan seperti itu:

Pertama, penduduk Jawa Barat yang mayoritas orang Sunda makin lama makin bertambah jumlahnya. Taruhlah penduduk Jawa Barat yang bisa berbahasa Sunda mencapai 30 juta. Bukankah jumlah itu merupakan pasar luar biasa? Tidak heran jika dikalangan media massa sering terdengar ucapan "Coba ambil satu persen dari sejumlah itu dan kemudian menjadi langganan koran atau majalah. Bukankah oplag besar sekali"?

Patut pula dicatat, tingkat pendidikan masyarakat Jawa Barat termasuk tinggi. Beberapa perguruan tinggi terkenal seperti ITB dan Universitas Pajajaran berlokasi di Jawa Barat. Begitu pula pendapatan penduduk Jawa Barat semakin lama semakin meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan. Semua itu memperkuat anggapan, berusaha di bidang pers berbahasa Sunda bisa menguntungkan.

Kedua, bahasa Sunda sebagai bahasa ibu bagi masyarakat Jawa Barat lebih komunikatif. Meskipun bangsa kita memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tetapi dalam pergaulan sehari-hari masih memakai bahasa ibu. Demikianlah yang terjadi di masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Batak dan sebagainya. Ternyata bahasa daerah dalam beberapa hal mempunyai kelebihan dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang kehadirannya relatif masih baru. Misalnya saja, bahasa daerah lebih kaya dalam beberapa bentuk ungkapan dan bisa lebih ekspresif karena sangat mengandung perasaan. Oleh karena itu, bahasa daerah bisa efektif dalam menyampaikan pesan tertentu atau menjelaskan suatu permasalahan.

Pers yang di antaranya bisa berfungsi melaksanakan komunikasi dua arah antara pemerintah di satu pihak dengan masyarakat di pihak lain, akan lebih komunikatif bila memakai bahasa daerah. Terlebih lagi, penduduk di beberapa tempat masih lebih mengerti bahasa daerah dari pada bahasa Indonesia.

Pers berbahasa Sunda, dengan demikian, sangat bermanfaat dan efektif sebagai sarana komunikasi sosial.

Ketiga, pers berbahasa daerah mempunyai "ceruk" tersendiri. Banyaknya penerbitan pers, khususnya yang terbit di ibukota, seakan-akan menghabiskan lahan usaha bagi penerbitan pers berbahasa daerah. Terlebih lagi dengan makin banyaknya penerbitan pers yang menghususkan diri menggarap bidang-bidang tertentu seperti pertanian, hukum, otomotif, dan sebagainya.

Dalam keadaan seperti itu, masih adakah lahan yang tersisa bagi penerbitan pers berbahasa Sunda yang bergelut pada oplag 10.000 eksemplar bahkan bisa kurang dari itu? Namun bertolak dari teori atau pandangan bahwa setiap mahluk sebenarnya mempunyai "Ceruk" atau "Niche" tersendiri, maka bisa saja disimpulkan, pers berbahasa Sunda pun bisa berkembang asal mampu menemukan "niche" atau "ceruk"nya. Hal itu bisa berkaitan dengan khalayak pembaca atau muatan isi penerbitannya. Dengan demikian, baik dalam isi maupun sasaran pembaca, pers berbahasa Sunda bisa menetapkan pilihan. Tentu saja semua ini memerlukan pengamatan dan penelitian, bukan hanya berdasarkan keinginan. Survei terhadap keinginan pembaca agar bisa menetapkan muatan isi, dengan demikian selayaknya diadakan secara teratur dan berkala.

Masyarakat Sunda yang sekarang hidup di kota dan telah mencapai kehidupan yang mapan, bisa diduga masih menyimpan kenangan akan budayanya sendiri. Mereka sudah barang tentu ingin menerima informasi mengenai daerahnya sendiri termasuk perkembangan kebudayaannya. Mereka masih mempunyai rasa cinta akan memiliki budaya sendiri dan tidak ingin semuanya itu musnah. Media massa Sunda sebenarnya bisa memanfaatkan keadaan psikologis seperti itu dengan menyajikan tulisan mengenai keadaan daerah di Jawa Barat lengkap dengan kisah manusianya.

Siapakah, golongan manakah yang memenuhi kriteria seperti itu? Di manakah mereka, bagaimanakah caranya untuk meraih mereka agar menjadi pembaca media massa Sunda? Semua ini tentu bisa dilacak bila kebijakan pemasaran telah ditetapkan dengan jelas.

Keempat, arus globalisasi tidak melemahkan tetapi justru memperkuat keinginan masyarakat mencari jati diri. Meluasnya pengaruh globalisasi menimbulkan kecemasan di sementara pihak, bahwa kekhasan setiap bangsa, baik di bidang etika, pergaulan sosial,

maupun ekspresi seni dan bidang lainnya, akan terlindas. Di bidang mode, misalnya, begitu derasnya mode terakhir dari Amerika Serikat, Eropa dan negara maju lainnya masuk ke negara kita. Secara serempak muda-mudi di negara kita meniru model (potongan rambut atau pakaian) yang sedang populer di sana. Begitu Demi Moore memangkas pendek rambutnya seperti dapat di tonton dalam film **Ghost**, maka seperti demam mode rambut seperti itu melanda kaum wanita di negara kita. Dengan derasnya arus globalisasi, bukankah akan terjadi penyeragaman di dunia dan menghilangkan kekhasan budaya di tiap bangsa? Bukankah hal itu merupakan ancaman bagi kekhasan pengucapan bangsa kita di bidang kesenian, perilaku sosial termasuk kreativitas dan selera?

Tetapi, kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Arus globalisasi dalam beberapa hal justru meningkatkan hasrat masyarakat mencari jati diri. Hal ini terjadi baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Di Amerika Serikat, misalnya, hasrat mendalami agama tumbuh dengan kuatnya, demikian pula di negara kita. Mereka yang tadinya acuh tak acuh terhadap agama, sekarang timbul hasratnya untuk mendalami semua itu seperti terlihat di kampus-kampus, khususnya di kota-kota besar.

Hal seperti itu bisa dihubungkan pula dengan tumbuhnya kembali hasrat untuk memajukan budaya etnis. Bahasa daerah yang semula tidak diperhatikan sekarang diangkat ke Kongres Bahasa dan dibuka dengan resmi oleh pejabat negara. Makanan tradisional sekarang telah masuk ke restoran, beberapa jenis kesenian telah masuk ke hotel berbintang dan ditayangkan pula di TV. Semua ini sebenarnya merupakan peluang besar bagi pers berbahasa daerah untuk mengembangkan diri.

Kelima, semangat paguyuban untuk memajukan daerah sendiri sangat kuat. Di daerah Sumatra Barat semangat ini bisa dibuktikan dengan suksesnya Gerakan Minang Seribu. Tiap orang Minang di rantau secara serempak mengirimkan uangnya paling sedikit Rp. 1000,00 untuk dipakai memajukan daerahnya sendiri. Hal yang sama terjadi ketika majalah *Mangle* mengajak tokoh-tokoh tertentu di Jawa Barat menyumbangkan uangnya untuk dipakai membeli majalah *Mangle* yang kemudian disebar di desa-desa terpencil. Sambutan ternyata sangat baik.

Semangat paguyuban seperti itu sebenarnya sangat baik bila selamanya ditimbulkan dan diperkuat. Media massa berbahasa Sunda bisa mengajak tokoh-tokoh di Jawa Barat untuk memajukan daerahnya termasuk memajukan kehidupan pers.

Manajemen, Redaksional, dan Finansial

Tetapi kelima pijakan itu tidak akan berarti apa-apa bila tidak diikuti dengan persyaratan berupa kesiapan di bidang manajemen, redaksional dan finansial. Kesiapan manajemen akan mampu menggerakkan semua sumber daya baik yang ada di perusahaan maupun di masyarakat untuk mencapai tujuan. Sedangkan kesiapan redaksional akan mampu menyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pembaca, artinya sesuai dengan syarat-syarat jurnalistik yang diharapkan. Kesiapan finansial menjamin persediaan dana agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan setiap waktu.

Kesiapan Manajemen

Perusahaan pers hanya bisa hidup dengan baik bila cukup sumber daya dan mampu memanfaatkannya. Sumber daya itu, manusia, dana, sarana lainnya, bisa berada di perusahaan maupun di luar perusahaan. Manajemen pers yang sangat diharapkan adalah manajemen yang bisa mendayagunakan sumber daya di perusahaan (manusia, dana dan sebagainya) dan sumber daya di luar perusahaan sehingga semua potensi dapat dikerahkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ciri utama manajemen demikian adalah terbuka dan mendorong semua pihak berperan serta (partisipatif). Dengan terciptanya kondisi terbuka di perusahaan maka akan memudahkan pengawasan dari satu komponen terhadap komponen lainnya. Direksi, misalnya, tidak akan berbuat semaunya karena mendapat pengawasan dari komisaris, pemegang saham dan serikat karyawan. Akibat dari pengawasan itu maka aturan main di perusahaan bisa bejalan dan penyimpangan dapat ditekan sekecil mungkin. Aturan main sebagai rujukan bersama tidak disusun sepihak tetapi bersama-sama, melibatkan tingkat manajemen dan karyawan. Dengan demikian, sampai batas tertentu, keadilan dapat diwujudkan.

Salah satu penyakit kronis yang merusak pers berbahasa Sunda adalah sering timbulnya konflik antara direksi dan karyawan akibat tidak terwujudnya keadilan. Misalnya saja distribusi pendapatan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan. Inilah diantaranya yang menyebabkan pers berbahasa Sunda yang telah hidup subur di tahun-tahun 60-an tidak bisa bertahan lama. Kalaupun ada yang bisa bertahan sulit berkembang dengan pesat bak peribahasa "Bagai kerakap tumbuh di batu, hidup tidak mati tak mau".

Manajemen terbuka dan partisipatif akan menjamin kepentingan semua pihak bertolak dari kesepakatan yang telah di susun bersama. Diperusahaan non pers kesepakatan seperti itu disebut KKB

(Kesepakatan Kerja Bersama) yang menjamin hak-hak dan kewajiban baik tingkat manajemen maupun karyawan. Mengingat karyawan pers bukan buruh tetapi pemegang saham, maka ketentuan pihak karyawan memiliki saham sebesar 20% hendaknya mendapat perhatian seksama baik dari pengelola perusahaan maupun dari pemerintah. Kelemahan dari ketentuan itu adalah sampai sekarang belum ada pegangan yang jelas. Meskipun demikian asal ada kemauan kuat dari tingkat manajemen dan serikat karyawan maka ketentuan itu bisa dilaksanakan. Dengan demikian, pihak karyawan akan ikut bersama-sama menentukan jalannya perusahaan. Semangat kerjapun akan timbul karena mereka tahu keuntungan tidak jatuh pada direksi atau pemilik saja tetapi sampai juga ketangan mereka.

Kesiapan Redaksional

Terlepas dari kekurangannya, mingguan tabloid *Detik* telah membuktikan bahwa kepekaan jajaran redaksi terhadap aspirasi yang sedang tumbuh di masyarakat dapat membuat media massa disukai masyarakat. Patut dicatat, mingguan *Detik* terbit disaat pemerintah sedang gencar melancarkan keterbukaan di segala bidang: politik, ekonomi, dan sebagainya. Di saat koran-koran lain ragu-ragu bagaimana mengisi ajakan keterbukaan itu, mingguan *Detik* secara gesit tampil dengan penyajian isi yang lugas dan menggigit. Penyajian isi seperti itulah yang disukai pembaca mengingat mereka telah sekian lama hanya disuguhi tulisan koran-koran yang terlalu hati-hati penyajiannya. Ternyata penyajian tulisan sekitar politik dapat menarik perhatian pembaca yang mungkin telah jenuh disuguhi tulisan hiburan sekitar gosip kehidupan artis.

Memang kemudian mingguan *Detik* tidak lama hidupnya karena larangan terbit dari pemerintah. Meskipun demikian, sebagai mana di bahas dalam tajuk rencana koran Kompas, kepekaan redaksi terhadap aspirasi pembacalah yang membuat mingguan tabloid itu disenangi pembaca. Kemampuan redaksi seperti inilah yang masih kurang dimiliki jajaran redaksi pers berbahasa Sunda. Isu-isu penting apakah yang menarik perhatian masyarakat Sunda? Bagaimanakah caranya isu-isu dituangkan dalam penulisan agar menarik untuk dibaca? Semua ini tetap merupakan permasalahan yang harus dijawab redaksi pers berbahasa Sunda.

Hal lain yang sangat penting tetapi kurang ditangani adalah penguasaan jajaran redaksi terhadap penggunaan bahasa. Masih sering timbul salah anggapan bahwa ragam bahasa jurnalistik seolah-olah bahasa yang tidak punya aturan. Dengan demikian tumbuh sikap menganggap enteng penguasaan bahasa. Padahal ragam bahasa jurnalistik tetap bertolak dari penggunaan bahasa yang baik dan benar.

Sebagaimana seorang sastrawan harus mampu menggali potensi bahasa agar dapat dituangkan menjadi karya sastra yang unggul, demikian pulalah wartawan harus mampu menggali potensi bahasa agar dapat disajikan menjadi karya jurnalistik yang unggul pula. Bagaimanakah penyajian tulisan dalam koran atau majalah bisa disenangi pembaca bila bahasa sebagai "bahan baku" tidak dikuasai penggunaannya?

Dalam penggunaan bahas Sunda memang ada masalah yaitu menyangkut penggunaan undak usuk bahasa. Masalah ini sungguh pelik bila dikaitkan dengan ragam bahasa jurnalistik. Di satu pihak bahasa pers menyaratkan demokratisasi penggunaan bahasa, karena tanpa itu tidak akan tercipta komunikasi yang komunikatif dan akrab, tetapi di pihak lain undak usuk bahas justru mensyaratkan ada tingkatan-tingkatan dalam pemakaian bahasa. Misalnya saja terhadap Bapak Gubernur, Bapak Bupati, mesti memakai kata *gumujeung* (artinya:tertawa), tetapi kata itu terlalu halus bila dipakai untuk tukang becak, misalnya. Nah, bagaimana jalan keluar dari pada permasalahan bahasa seperti itu?

Namun karena undak usuk bahasa telah menjadi kenyataan dalam penggunaan bahasa di masyarakat Sunda, maka tidak ada jalan lain dari pada tetap menggunakannya. Tentu saja dalam hal ini wartawan diminta dapat kreatif, artinya meskipun tetap menggunakan undak usuk bahasa tetapi harus mampu menyajikannya secara komunikatif dan akrab.

Kesiapan Finansial

Pengelolaan perusahaan pers secara profesional akan banyak membutuhkan dana baik untuk biaya peliputan tulisan maupun untuk membeli teknologi cetak. Penyajian tulisan yang lengkap dan akurat tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih lagi harus didukung tenaga wartawan yang jumlahnya memadai. Teknologi cetak juga selayaknya mengikuti jaman, oleh karena pembaca sekarang bukan saja menyenangi isi yang aktual tetapi juga lebih suka bila isi yang baik disertai dengan tata rupa yang indah.

Darimanakah dana dapat diperoleh?

Perusahaan pers yang statis umumnya hanya mengandalkan pemasukan dana dari penjualan produk penerbitannya dan tidak menggali dana yang baru. Kebijakan seperti ini akan menyulitkan bila oplag tetap saja tidak meningkat. Oleh karena itu, mestilah diterapkan kebijakan pendanaan yang dinamis. Artinya segala sumber dana harus digali. Misalnya saja melalui kredit bank, berbagai macam bentuk kerja sama (mengundang investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan) dan bantuan-bantuan lainnya. Semua kemungkinan ini

tentu saja harus digali dan jangan dilewatkan. Hanya manajemen yang dinamis dan mempunyai akses luas terhadap sumber dana bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Sekarang dan Masa yang Akan Datang

Bagaimanakah keadaan pers berbahasa Sunda sekarang?

Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, keadaan pers berbahasa Sunda masih banyak kekurangannya, baik dalam aspek permodalan, manajemen, maupun teknologi cetak. Dari semua kekurangan itu, langkanya sumber daya manusia yang unggul benar-benar merupakan penghalang.

Jadi perencanaan yang harus dimulai dari sekarang adalah mendidik sumber daya manusia yang akan mengelola perusahaan pers Sunda di masa yang akan datang. Sementara itu, pengelola yang sudah ada sekarang sudah barang tentu harus meningkatkan kecakapannya baik di bidang manajemen maupun redaksional. Namun yang lebih penting adalah menyiapkan regenerasi agar dalam waktu 10-20 tahun kedepan pers berbahasa Sunda mencapai kemantapannya.

Semua jalur hendaknya ditempuh. Pertama, menata perusahaan pers berbahasa Sunda itu sendiri. Kedua, menciptakan kondisi di masyarakat agar kehadiran pers Sunda mendapat sambutan yang baik. Rasa memiliki terhadap pers berbahasa Sunda hendaknya terus ditumbuhkan. Tokoh masyarakat baik secara informal maupun formal bisa diajak turut serta memajukan pers berbahasa Sunda.

Masyarakat dan pemerintah akan tumbuh perhatiannya terhadap pers Sunda bila pers itu sendiri giat menumbuhkan dirinya sendiri. Dengan demikian, pengelola pers berbahasa Sunda sudah seharusnya bekerja keras, tidak henti-hentinya bergumul meraih segala kemungkinan agar perusahaannya berkembang.

Rangkuman dan Saran-Saran

Masyarakat Sunda jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pendidikan serta kemakmurannya juga makin meningkat. Keadaan seperti ini merupakan lahan subur bagi perusahaan pers berbahasa Sunda untuk mengembangkan kegiatannya. Selain itu masih banyak peluang lain, seperti kuatnya kecintaan masyarakat Sunda terhadap budaya sendiri, kentalnya semangat paguyuban dan hasrat yang tidak pernah padam untuk memajukan etnis sendiri. Kongres Bahasa Sunda telah diadakan beberapa kali dan mendapat perhatian besar dari masyarakat serta pemerintah membuktikan dugaan di atas. Demikian juga sambutan positif dari tokoh-tokoh

masyarakat Sunda ketika mereka diajak membeli majalah **MANGLE** untuk disebarakan ke desa-desa tertinggal.

Namun peluang besar seperti itu belum dimanfaatkan secara maksimal mengingat pers berbahasa Sunda sampai sekarang masih dililit banyak kesulitan baik dalam aspek permodalan, manajemen maupun teknologi cetak. Dengan demikian pers berbahasa Sunda harus terus memantapkan dirinya sendiri agar siap di bidang manajemen redaksional dan finansial. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan, pertama menata perusahaan pers itu sendiri agar setiap komponen mencapai kemantapannya, kedua, menyiasati ke luar agar masyarakat mempunyai apresiasi yang baik terhadap kehadiran pers berbahasa Sunda.

Dari sekian faktor yang perlu diperbaiki, sumber daya manusia menempati kedudukan sentral. Hanya sumber daya manusia unggul yang akan mampu membawa pers berbahasa Sunda keluar dari kesulitan yang sedang dialami sekarang ini.

Beberapa saran di bawah ini perlu mendapat perhatian :

1. Pendidikan dan latihan bagi pengelola pers berbahasa Sunda baik di bidang manajemen, redaksional, pemasaran dan bidang lainnya perlu diselenggarakan secara sistematis dan kontunyu. SPS dan PWI hendaknya menaruh perhatian terhadap pendidikan dan pelatihan ini.
2. Kesejahteraan hidup karyawan pers sangat perlu diperhatikan dan terus diupayakan perbaikannya. Oleh karena itu, ketetapan bahwa karyawan pers mendapat bagian saham sebanyak 20% hendaknya dilaksanakan di setiap perusahaan pers.
3. Pers berbahasa Sunda hanya dapat hidup dengan pesat bila masyarakat Sunda mempunyai apresiasi yang baik terhadap kebudayaannya. Oleh karena itu, upaya memajukan kebudayaan Sunda perlu mendapat perhatian dan bantuan dari semua pihak khususnya dari pemerintah.
4. Upaya memberi motivasi seperti hadiah-hadiah untuk karya jurnalistik yang baik (hadiah jurnalistik Adinegoro dsb.) hendaknya diikuti juga di lingkungan pers berbahasa Sunda. Ada baiknya bila di Jawa Barat, PWI misalnya memberi hadiah jurnalistik Moh. Kurdi untuk jurnalistik berbahasa Sunda yang berkualitas.
5. Kegiatan Hari Pers Nasional selain membahas kehidupan pers nasional ada baiknya juga membahas kehidupan pers berbahasa daerah. Media massa berbahasa Sunda sangat baik sekali bila setiap bulan Februari bertepatan dengan Hari Pers Nasional mengadakan forum pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi pers berbahasa Sunda. Dalam pembahasan itu setiap

permasalahan dicari jalan keluarnya sehingga diharapkan permasalahan Sunda akan mencapai kemajuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Soebagio IN, *Sebelas Perintis Pers Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1976.
 2. Djuarsa Sendjaja, *Ekologi Media: Analisis dan Aplikasi Teori "Niche" dalam penelitian tentang Kompetisi Antar industri Media*, dalam *Jurnal Ikatan sarjana Komunikasi Indonesia*, Oktober, 1993.
- *) Pembicara adalah Wakil Pimpinan Redaksi Majalah *MANGLE*, Jl. Lodaya No. 19 Bandung.

HIMPUNAN PEMBINA BAHASA INDONESIA
Peluang dan Tantangan*

Sumardi*



HIMPUNAN PEMBINA BAHASA INDONESIA

Peluang dan Tantangan*



Sumardi[^].

1. Siapa

- HPBI lahir pada 21 Februari 1974 di Pacet, Sindanglaya, Jawa Barat
- Semula HPBI bernama Ikatan Guru Bahasa Indonesia (IGBI)
- Pada Munas I Tahun 1979 diputuskan IGBI diubah menjadi HPBI.
- Dewasa ini HPBI telah memiliki 40 cabang dengan jumlah anggota sekitar 15.000 orang.
- Sekretariat Pengurus Pusat HPBI adalah d.a. Pusat Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. 4750405 Faks. 4750407

2. Ciri

HPBI adalah lembaga swadaya masyarakat yang beranggota: ahli, profesional, dan atau pribadi yang menaruh perhatian terhadap usaha pengembangan dan pendayagunaan bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan pribadi, masyarakat, dan bangsa yang sejahtera lahir dan batin.

Keberagaman anggota (termasuk pengurus) HPBI itu menyebabkan organisasi ini bersifat inklusif, longgar, atau cair. Hal ini berbeda dengan organisasi profesi yang bersifat eksklusif, ketat. Sifat longgar ini mewarnai corak kegiatan dan perilaku anggota serta pengurus organisasi.

3. Visi

Menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana utama pengembangan pribadi, masyarakat, dan bangsa.

4. Misi

Membangun kesadaran dan kemampuan para anggota dan masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan:

- # iman, moral, dan mental;
- # kepribadian yang tangguh;
- # kemampuan memanfaatkan ilmu dan teknologi;



* Djsajikan dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII di Jakarta, 14 – 17 Oktober 2003.

[^] Sumardi. Sekretaris Umum HPBI periode 1999 – 2003.

- # potensi diri anggota dan masyarakat;
- # produktivitas dan kreativitas;
- # sosial dan berbangsa.

Misi ini baru dapat dijalankan apabila para operatornya, yaitu para anggota dan pengurus HPBI, telah fasih dan terampil berbahasa Indonesia, baik untuk ranah produktif maupun ranah reseptif.

5. Peluang

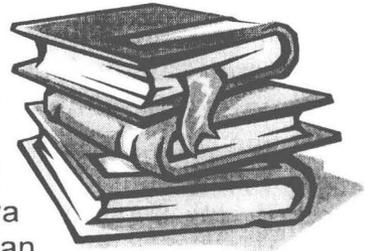
Berikut ini beberapa peluang atau kesempatan yang perlu dibaca, digarap, dan dimanfaatkan oleh HPBI.

- Simbiose mutualistis (yang wajar dan berimbang) antara pamrih pribadi dan organisasi adalah peluang yang menarik.
- Dengan berpikir positif kita melihat fakta bahwa peringkat SDMI pada posisi 112 di antara 170 bangsa yang diteliti UNDP tahun 2002 merupakan peluang bagi HPBI untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana utama untuk meningkatkan peringkat SDMI itu. Salah satu jalur untuk mengembangkan SDMI plus atau unggul itu adalah mengembangkan budaya baca di kalangan para anggota (terutama) dan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa.
- Mengembangkan berbagai inovasi seperti *Quantum Reading* (Hernowo: 2003) merupakan peluang-peluang yang menantang bagi HPBI. Banyak pakar yang berpendapat walau sekarang zaman Teknologi Informasi (IT), tetapi media tulis masih merupakan sumber informasi ilmu dan teknologi yang tetap handal.
- Jalur pengembangan SDMI unggul yang lain adalah budaya tulis. Jalur ini manfaatnya sangat jamak. Bagi penulis, dengan berkarya kemampuannya menulis dan kedalaman ilmunya semakin menukik, serta ketajaman penalaran dan kreativitasnya juga semakin tinggi. Bagi pembaca, karya para penulis itu memberi keuntungan waktu yang luar biasa. Misalnya, buku yang merupakan laporan penelitian puluhan tahun dapat dibaca dalam waktu 1 minggu oleh pembaca yang terampil. Karena budaya tulis ini masih tipis dalam masyarakat profesional di Indonesia, hal ini dapat dipandang sebagai peluang emas HPBI untuk menumbuhkannya. Inovasi di bidang tulis-menulis seperti yang ditawarkan dalam *Quantum Writing* (Hernowo: 2003) perlu digalakkan.
- Peluang ke dalam, mayoritas anggota HPBI adalah para pendidik. Beberapa di antara mereka belum memiliki budaya baca dan tulis. Ini juga peluang yang sangat strategis bagi HPBI untuk mengembangkan budaya baca tulis di kalangan anggotanya tersebut.

6. Tantangan

Banyak hambatan untuk melaksanakan beberapa misi dan atau memanfaatkan berbagai peluang yang telah disinggung di muka.

Langkah pertama untuk mengatasi berbagai hambatan itu adalah memandangnya dengan pikiran positif (*possitive thinking*) dan mengubahnya sebagai tantangan. (David J Schwartz: 1996).



Sibuk

"Aduh saya sibuk sekali!" "Maaf ya saya tidak dapat menghadiri rapat. Acara saya hari ini padat sekali!. Ucapan-ucapan apologis ini kadangkala terdengar di lingkungan HPBI. Ini dapat diubah menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas manajemen waktu. Ini tidak sulit. Buktinya banyak manajer yang cerdas mengelola waktu. Manajer cerdas itu juga dikaruniai waktu dan peluang yang sama, yaitu sehari semalam sama 24 jam.

Sumber Dana

Selama ini pembiayaan kegiatan–kegiatan penting di HPBI seperti seminar nasional dan munas mengandalkan bantuan-bantuan yang bersifat pratonis. Ini tidak buruk. Akan lebih bagus kalau hubungan subordinat (pemberi dan yang diberi) ini dapat ditingkatkan agar mencapai kesetaraan seperti dalam dunia usaha yang dikenal dengan istilah *sponsorship*. Dalam relasi antara sponsor dan yang disponsori biasanya muncul jargon 'sama-sama untung'.

Sumber pendanaan yang bersifat *sponsorship* ini dapat dikembangkan lebih luas dan kuat dengan syarat HPBI dengan sadar dan terencana membina pelobi dan jejaring relasi (*networking*).

Tim Kerja

Pat Williams, seorang manajer ulung Amerika dalam bukunya *The Magic of Team Work* (2000) menggarisbawahi pentingnya setiap anggota suatu organisasi melihat dan memfokuskan pada keunggulan anggota lain dan berusaha sekuat tenaga mensinergikannya. Cara pandang yang positif ini rasanya perlu ditumbuhkembangkan di kalangan HPBI. Ini tantangan yang perlu menjadi salah satu fokus HPBI.



Media

HPBI sudah punya majalah, yaitu *Tiara Bahasa*. Ini sebuah media yang sangat fungsional untuk mengembangkan budaya baca tulis serta mengembangkan kemampuan profesional kebahasaan dan kesastraan. Majalah ini mengalami kesulitan dalam pengumpulan naskah yang unggul dan kesulitan dalam pemasaran dan atau distribusi. Ini sebuah tantangan bagi anggota HPBI. Siapa yang memiliki potensi di kedua hal ini diundang untuk berpartisipasi.

KBK

Meningkatkan kepekaan membaca peluang adalah tantangan yang perlu diprioritaskan oleh para anggota dan organisasi. Bagi anggota dan organisasi HPBI, munculnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mesti dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan. Keberhasilan menjawab tantangan ini akan berpengaruh pada penguatan kemampuan profesional di bidang kebahasaan dan kesastraan serta imbalan kesejahteraan.

7. Undangan

Di muka telah dipaparkan mengenai apa dan siapa HPBI itu, apa visi dan misinya, peluang-peluang apa saja yang perlu dilihat dan direbut oleh organisasi dan anggotanya, serta tantangan-tantangan apa yang perlu dikritisi dan ditangani.



Semua itu menantang Anda, mengundang Anda terutama para anggota dan pengurus HPBI untuk menanganinya. Dengan peluang saling menguntungkan, semoga undangan ini singgah di hati Anda.

Makalah ini dilampiri sebuah artikel untuk remaja atau siswa SLTA sebagai salah satu model apresiasi sastra yang dikaitkan dengan pengembangan diri.



RUJUKAN

- Hernowo. 2003. *Quantum Reading*. Bandung: MLC
- _____. 2003. *Quantum Writing*. Bandung. MLC
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Schwartz, David J. 1996. *Berpikir dan Berjiwa Besar*. Cet ke-4. Jakarta: Binarupa aksara.

- Sumardi. 2000. *Buku Pelajaran Bahasa Indonesia SD; Sebagai Sarana Pengembangan Kepribadian, Penalaran, Kreativitas, dan Keterampilan Berkomunikasi Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Williams, Pat. 2000. *The Magic of Team Work: Kekuatan Magis Kerja Tim*. Jakarta: Grasindo.

Bagaimana Mengembangkan Diri Lewat Bacaan Fiksi?

Oleh : Sumardi

Hai, remaja! Bagaimana pendapatmu tentang judul tulisan di atas? Percayakah kalian bahwa bacaan fiksi merupakan sarana yang aduhai untuk mengembangkan diri? Jangan jawab dahulu! Bacalah lebih dahulu cerpen berikut ini.

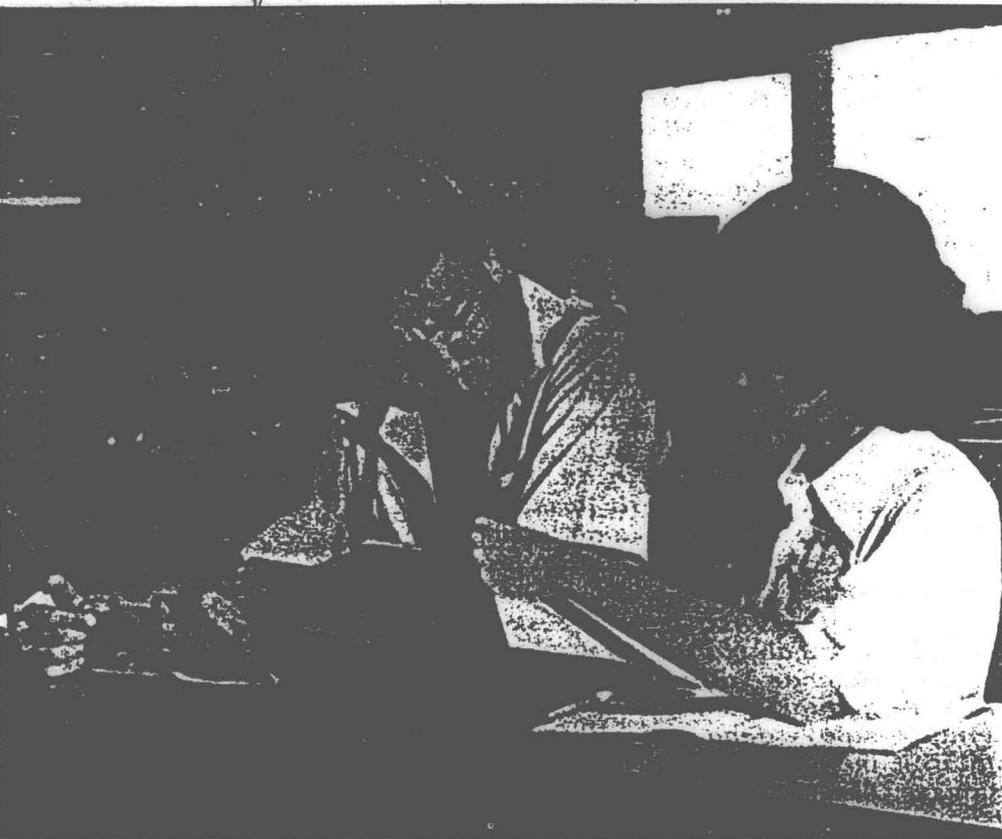
Di Luar Rencana

MALANG tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, kata orang. Aku sendiri tak tahu pasti apakah inipun termasuk nasib atau bukan. Yang jelas, laki-laki yang kucintai akhirnya justru kawin dengan mbak Asti, teman sekolah di Yogya dahulu.

Tentu saja aku merasa gondok sekali pada mulanya, tapi lama-lama akhirnya terbiasa juga. Apalagi karena keduanya selalu bersikap baik kepadaku, dan menganggap aku sebagai adik mereka.

Sering mbak Asti menulis surat kepadaku, menanyakan tentang kabar dan keadaanku. Selalu saja kujawab bahwa aku tambah menyala, lalu kusambung dengan cerita yang panjang tentang kota buaya. Mbak Asti membalasnya kembali dengan nada orang yang merasa kesal. Ada beberapa huruf yang dicoret dengan tebal, tanda serius. Katanya: Tetap saja engkau begitu. Selalu pura-pura tidak tahu. Maksudku sudah punya pacar? Bersama ini kuskirinkan selemba cek. Datanglah ke Jakarta minggu depan. Pakai kapal terbang saja, kujemput di sana. Kali ini tentu cocok dengan selera. Insinyur, muda dan hebat.

Ada rasa bosan naik di dada. Sudah beberapa kali dia mencoba menjodohkanku. Tidak satupun terkait di hati. Mungkin karena dia merasa punya andi dalam menyakiti hatiku waktu itu, maka



Dua remaja sedang mendiskusikan buku bacaan di perpustakaan

dia begitu berkobar-kobar untuk mencari gantinya buatku. Seingatku, sudah ada dua dokter dan dua insinyur yang dititipi surat untukku sebagai dalih. Padahal sebenarnya supaya mereka berkenalan dan bertemu denganku.

Semua serba sulit jadinya. Menolak sudah terlanjur kuterima ceknya. Berangkat, terus terang saja; tidak bergairah, muak malah, tidak lucu, seperti barang dagangan saja, diperagakan.

Lantas kubuat sebuah keputusan. Baiklah, kata hatiku. Akan kubuat dia jemu, supaya tak lagi dia berbuat seperti itu padaku. Baik, tunggu saja, aku akan datang ke Jakarta, memenuhi undangannya. Untuk yang terakhir kalinya. Lalu kususun sebuah rencana. Pasti yang meyakinkan hatiku.

Malam itu kukatakan kepada ibu, bahwa aku akan ke Jakarta minggu depan. Lalu kupinjam cincin kawin beliau. Kugosok cincin itu semalam suntuk sampai mengkilat seperti masih baru, dan kupasang di jari tangan kiriku. Habis sudah kegemaranmu, takkan bisa menjodohkan aku lagi sekarang.

Tadinya ada lima puluh nama telah kusiapkan untuk kuaku sebagai nama tunanganmu. Tetapi aku selalu merasa geli, merahasiakan nama tunanganmu! Toh mereka tidak mungkin merebut cincinku. Lagi pula cincin itu agak kekecilan untuk jariku, sukar dilepas.

Hari itu aku berangkat. Pesawat berangkat jam 08.10. Udara cerah. Dalam perjalanan seorang pramugari cantik menyajikan permen kepadaku. Kemudian ditawarkannya segebug koran dan majalah: Mau membaca, zus? tegunya ramah. Aku melongok sebentar: Life, ujarku, tertarik oleh jambar depan yang menyala. Jaqueline Kennedy yang menjadi Nyonya Onasis.

Hanya kubolak-balik saja pada mulanya. Kemudian kulihat tulisan yang menyolok di tengah-tengahnya. Dicitak dengan huruf-huruf besar, kapital semua: **INDONESIAN AGRICULTURE**, artikel tersebut kubaca habis. Kuulangi sekali lagi karena kagum. Dengan DC 9 dari Surabaya ke Jakarta cuma satu jam perjalanan, tak terasa habis hanya untuk membaca Indonesian Agriculture by Macaaksara.

Komentar hati kecilku: Luar biasa, orang ini. Tulisannya jelas dan gampang dimengerti. Digambarkannya keadaan pertanian di Indonesia secara terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Entah mengapa tiba-tiba saja aku merasa bangga. Tuan Macaaksara telah berhasil mengangkat derajat pertanian di Indonesia di mata Internasional.

Karena asyiknya aku, dengan artikelnya, sebelum roti dan keju GIA sempat kusentuh, pesawat sudah mendarat di Kemayoran.

Ternyata tiga orang sudah siap menjemputku di sana. Dari jauh tampak mbak Asti melambai-lambaikan tangannya bersama dua orang laki-laki. Yang seorang mas Bambang, dan satunya lagi tidak kukenal. Tapi jelas bukan sopir.

Begitu sampai di tanah, mbak Asti menyerbu dan menciumku. Mas Bambang cukup berjabat tangan saja. Ketika dilihatnya cincin melingkar di jariku dia berteriak heran: Sudah tunangan? Kok tidak mengundang kami?

Mbak Asti kulihat terkejut setengah mati. Sambil tertawa hambar katanya pelan, tapi gugup: Kenapa diam-diam saja? dengan sedikit nada menyalahkanku. Aku hanya bisa tertawa.

P.f. Dengan siapa? tiba-tiba lelaki yang belum kukenal itu mengulurkan tangannya. Kami berjabat tangan.

Macaaksara, kujawab tenang.

Ooo, yang menulis Indonesian Agriculture di Life? Lalu dia tertawa keras, terkekeh-kekeh.

Aku agak tidak enak hati mendengarnya.

Kukenal beliau. Teman bapakku. Simpatik memang. Maaf kepalanya botak, bukan? katanya menyambung kembali perkataannya.

Kulihat mbak Asti berpandangan-pandangan dengan suaminya. Aku sendiri terkejut setengah mati. Apa kata orang kalau betul Macaaksara itu teman bapaknya? Pasti akan kelihatan kebohonganku. Meski begitu, seperti biasanya, aku tidak mau kelihatan kalah moral. Kupaksa bersikap tenang dan kujawab sesopan mungkin: Betul. Anda benar!

Jangan tanya bagaimana perasaanku ketika itu. Bayangkan aku membohong, dan salah seorang dari kami mengetahui kebohongan itu! Mbak Asti berulang kali menyesali perbuatanku. Bertunangan dengan orang tua, teman ayah Ir. Haryono. Padahal maksud mereka justru Ir. Haryono itulah yang akan diperuntukkan bagiku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pura-pura menyesal. Kukatakan bahwa semua itu kehendak orang tua, bapak dan ibu.

Akhirnya seminggu di Jakarta persis seperti orang berlibur saja. Pagi hari berbelanja, naik turun Sarinah, Senen dan Cikini, dengan mbak Asti. Dan sore hari, dijemput oleh insinyur muda itu untuk bermain tennis. Selalu aku diganggunya dan macam-macam pula olok-oloknya.

Itulah sebabnya, kenapa Surabaya kalah waktu PON yang baru lalu. Dietlah, engkau terlalu gemuk. Aku cuma tertawa kecut, tidak bisa membela diri, karena fakta telah menempatkan aku pada tempat yang paling tolok dalam hal ini.

Malamnya kami selalu bermain kartu. Tetap saja aku tidak pernah menang. Untung dia menjadi pasanganku jadi sedikit terhindar dari olok-oloknya.

Sore itu kutantang dia bermain scrabble.

O.K. ujarnya angkuh, seperti orang yang merasa pasti akan menang.

Kami berempat siap di tempat. Pada mulanya memang benar dia yang selalu mendapat angka yang tinggi, dan aku longkol dibuatnya. Tapi ketika dia meletakkan huruf yang seliriu, kontan aku berteriak keras, membayar kekalahan selama ini: *What kind of English do you have Sir? Bikin malu, insinyur apaan tuh. Copot saja titelnya, taruh di meja! Mbak Asti menginjak kakiku, matanya nelotot tanda tidak setuju.*

Tapi dia ikut tertawa. Boleh juga..., jawabnya sabar.

Aku tambah jengkel dibuatnya. Kesabaran yang berpura-pura, mau ambil muka dia rupanya.

Sombong, pura-pura memuji! insinyur apaan tuh, nggak tahu bahasa Inggris, kataku tetap melanjutkan perang mulut.

Dia malah tertawa, kemudian menjawab: Memang bukan insinyur jurusan Inggris!

Mas Bambang tertawa terkekeh-kekeh. Ditepuknya punggung insinyur muda itu sambil berkata: Kalian cocok, pandai bercanda.

Sayang sudah tunangan, dengan tuan Macaaksara lagi, lemah ayahku. Aku tidak sanggup bersaing, jawabnya dengan cepat.

Aku sudah hampir naik bitam. Segera aku sabarkan diri. Percuma, rupanya dia senang menggoda. Lantas kujawab dengan angkuh: *Harus dong. Ngapain mengurus diri orang?*

Dia, tertawa keras, seolah-olah ada hal yang lucu.

Aku mengeluh di dalam hati: *Sialan, jangan-jangan dia tahu bahwa aku menipu.*

Pada malam keberangkatanku kembali ke Surabaya, kami hanya berdua saja, nonton Film Admiral Yamamoto di Megaria. Setelah pertunjukan habis, kami tidak segera pulang, tapi lewat jembatan Semanggi dulu sampai tiga kali. Aku diam saja, tidak ambil peduli, malas berbicara. Dia menepuk bahuku pelan: *Kok diam saja, ingat pada tuan Macaaksara?*

Kumaki dia dalam hati kecilku. Selalu dia menggangguku dengan soal itu. Tetapi aku tetap pura-pura tidak tahu. Aku heran, kamu masih muda, cantik, kenapa kamu mesti bertunangan dengan orang setua dia? Botak lagi. Apakah engkau tergila-gila kekayaannya? Atau mungkin karena kamu ingin bisa ke Amerika kapan saja kamu suka nantinya? katanya menyambung pembicaraannya.

Aku betul-betul tersinggung, kutatap wajahnya dengan tajam. Kalau bisa ingin dia kutelan saking bencinya. Sombongnya! Karena dia insinyur itukah dia menghina orang sekenanya? *Peduli apa tua, kalau betul Macaaksara itu tua? Apa dia kira semua orang harus jatuh cinta padanya karena dia insinyur muda, gagah? Huh, sombongnya!*

Dia melirik kepadaku dengan sinis, menunggu jawaban. Karena itu aku terpaksa berkata dengan suara yang melengking tinggi, kering, *sekering hatiku di waktu itu: Apa pedulimu, aku bisa mengatur diriku sendiri. Kalau aku mencintai seseorang, itu bukan karena gelar, pangkat atau kedudukannya. Gelar bukanlah jaminan bahwa dia orang baik. Apalagi jamar sekarang bohong dianggap soal yang mudah.*

Sopan memang, Tuan Macaaksara, teman ayahku. Pandai memikat hati perempuan. Bijaksana kelihatannya. Kukira engkau saja yang bersedia menjadi tunangannya.

Tiba-tiba saja aku malu pada diriku sendiri. Keterlaluannya. Kesemuanya membuatku ingat pada sesuatu yang paling tidak kusukai dalam hidup ini. Sekuat tenaga aku berusaha menahan diri, tapi toh ketahuan juga, bahwa aku mulai menangis.

Dia berkata pelan, tanpa emosi: *Maaf, aku mengatakan yang sebenarnya. Dan maaf, besok aku tidak bisa mengantarkan sampai di lapangan terbang.*

Sampai di rumah, kubanting pintu mobil keras-keras. Dia tidak aku persilakan mampir. Kami tidak saling berjabat tangan, apalagi mengucapkan salam perpisahan, atau terima kasih-terima kasih. Cukup sampai di situ saja, pikirku.

Paginya, dua orang saja yang mengatarkanku ke lapangan terbang. Sepi, kami saling malas berbicara. Berulang kali mbak Asti menepuk bahuku, kelihatannya berat melepaskanku.

Mas Bambang, kirim salam buat Tuan Macaaksara, katanya.

Waktu itu Jet Convair berangkat jam 06.05 pagi. Lagi-lagi pramugari yang cantik menawarkan bacaan buat penumpangannya.

Kompas, ujarku ogah-ogahan. Diberikannya satu padaku.

Ada sesuatu yang membuatku tersentak bangun dari sandaran kursi. Pada halaman pertama terpasang gambar insinyur Haryono. Judul berita jelas terbaca: *Insinyur Macaaksara, diundang Gubernur Jatim untuk memimpin proyek di Malang Selatan.*

Aku menjadi lemas seketika, tidak berdaya sama sekali. Bagaimana perasaanmu tidak bisa kutulis di sini. Cuma Tuhan yang tahu. Rupanya Macaaksara nama samarannya. Bagaimana mungkin? Aku tidak berani berpikir. Malu. Badanku menjadi panas dan dingin.

berganti-ganti. Aku tidak bisa bilang betapa tidak enakannya. Muka ini bercorak arang rasanya. Dan akupun bersumpah tidak akan ke Jakarta lagi. Malu oleh mbak Asti, malu oleh mas Bambang, terlebih-lebih oleh insinyur muda yang sudah kumaki-maki.

Sesudah pesawat mendarat di Waru, aku duduk di atas bangku panjang menunggu bagasi, murung. Seseorang menyapaku dari belakang: Mana kupon bagasimu, biar aku ambilkan. Ketika kutoleh, ternyata insinyur yang kucacimaki semalam.

Lho, ujarku hambar, sudah mencakup semua pengertian, merasa kalah dalam segala hal.

VIP, duduk di ruang penumpang, ujarnya angkuh.

Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kuberikan kupon bagasiku padanya.

Di dalam taxi, aku yang membuka pembicaraan. Pelan, seperti orang yang kalah perang.

Aku malu.

Dia pura-pura tidak mengerti: Malu sama siapa? Ujarnya tanpa rasa berdosa.

Malu sama insinyur. Tentu insinyur menertawakan sikapku selama ini, ujarku pelan. Lantas cincin ibu aku lepaskan. Tadinya hendak aku masukkan ke dalam tas maksudku, tapi insinyur muda itu merebutnya, lalu dimasukkannya ke dalam sakunya.

Akan kuganti dengan yang bagus, yang cocok untuk arimu, ujarnya tenang, tanpa emosi.



Remaja mencari bacaan fiksi sebagai sarana hiburan

Ternyata kamu lebih baik daripada aku, sabar dan dewasa, kataku, teringat kembali bagaimana aku memaki-makinya selama ini.

Mas Bambang yang memberitahukan padaku, bagaimana watak dan kelakuanmu.

O, mas Bambang sudah tahu? seruku kaget.

Dia guruku, orang seperti kamu memang harus dibikin jera. Sombongnya luar biasa. Satu hal yang mengherankanku: kenapa kau pilih Macaaksara?

Di luar rencana, jawabku pelan, kubaca namamu di Pesawat, waktu aku berangkat. Aku suka pada orang-orang yang cemerlang. Ketika aku harus menjawab tunanganku yang memang tidak ada, kuambil saja nama itu, tanpa prasangka. Bagaimana dengan mbak Asti?

Ini berita besar buatnya. Dia berjanji, kalau aku berhasil

menundukkanmu, berarti aku yang menang dalam perlombaan. Dan dia yang akan merayakan pesta dan pestamu...

(Toetilowati S., *Cinta-Sekolah Rakyat*)

Apa kesanmu?

Apa kesanmu? Bagaimana perasaanmu setelah membaca cerpen "Di Luar Rencana" tadi? Senang atau biasa-biasa saja?

Beruntunglah kalian yang merasa senang setelah selesai membaca cerpen itu. Ini bukti bahwa kalian memiliki pikiran yang tajam dan perasaan yang peka dan halus. Hanya remaja atau orang yang tajam pikirannya dan peka serta halus perasaannya yang mampu memperoleh rasa senang ketika membaca cerpen atau novel yang bagus. Hal ini sejalan dengan fungsi pertama bacaan fiksi, di sini cerpen, adalah "menghibur" atau *dulce*.

Selain menghibur, bacaan fiksi sebenarnya juga memiliki

manfaat lain, yaitu mampu mengasah ketajaman pikiran dan perasaan kalian. Dalam kehidupan sehari-hari banyak bukti, banyak remaja atau orang dewasa yang sukses karena tajam pikiran dan peka perasaannya.

"Pintar dia!"

"Tajam naluri bisnisnya!"

Adalah contoh ucapan atau ungkapan untuk remaja atau orang dewasa yang tajam pikirannya dan peka perasaan atau nalurinya.

Yang menarik ketajaman pikiran dan kepekaan perasaan itu dapat dilatih atau ditingkatkan lewat cerpen atau bacaan fiksi. Kalian tidak percaya? Berikut ini jawabannya.

Menggodanya rasa ingin tahunya

Bagaimana perasaanmu setelah membaca judul cerpen "Di Luar Rencana" tadi? Barangkali kalian merasa penasaran dan bertanya, "apa maksudnya?" Halaman demi halaman telah kalian baca dan pertanyaan ini belum terjawab. Kalian bertambah penasaran. Kalian semakin ingin tahu apa yang dimaksudkan judul cerpen itu. Kalian terus membaca. Dan, baru di bagian akhir cerpen itu rasa penasaran terjawab.

"Di luar rencana," jawabku pelan, "kubaca namamu di pesawat, waktu aku berangkat. Aku suka pada orang-orang yang cemerlang. Ketika harus menjawab tunanganku yang memang tidak ada, kuambil saja nama itu, tanpa prasangka..." Begitu ucapan tokoh utama cerpen ini.

Apa manfaat atau hikmah yang kalian peroleh setelah rasa penasaran atau rasa ingin tahu kalian berhasil "dikerjain" oleh judul dan keseluruhan cerpen "Di Luar Rencana tadi." Jelas, rasa penasaran atau keingintahuanmu semakin terarah. Semakin berkembang.

Sejarah membuktikan banyak orang besar berkembang karena rasa ingin tahunya yang kuat. Pada Abad 14 (?), Columbus berlayar mengelilingi dunia dan berhasil menemukan Benua Amerika karena memiliki rasa ingin tahu yang besar. Pada Abad 16, Copernicus tahan setiap malam dalam waktu yang lama mengamati gerakan planet-planet di langit karena rasa ingin tahunya yang kuat. Dia akhirnya menemukan teori baru bahwa planet bumi itu mengelilingi matahari. Ini membalikkan kebenaran teori yang sudah dianut beberapa abad sebelumnya yang mengakui bahwa matahari mengelilingi planet bumi.

Jelasnya, kalau rasa ingin tahu semakin terarah, semakin kuat, kalian akan menemukan kesenangan dalam belajar. Sebab, belajar itu akan dapat memuaskan keingintahuan kalian itu. Kalau sudah begitu, belajar tidak perlu disuruh-suruh oleh ORTU. Enak kan?

Mengasah kepekaanmu

Pada bagian tengah cerpen, ada dialog antara tokoh Aku dengan Ir Haryono seperti berikut.

"Apa pedulimu, aku bisa mengatur diriku sendiri. Kalau aku mencintai seseorang, itu bukan karena gelar, pangkat atau kedudukannya. Gelar bukanlah jaminan bahwa dia orang baik. Apa lagi jaman sekarang bohong dianggap soal yang mudah."

Dia tenang-tenang saja. Senyum-senyum malah, sama sekali tidak menunjukkan sakit hati.

"Sopan memang, Tuan Macaaksara, teman ayahku. Pandai memikat hati perempuan. Bijaksana kelihatannya. Kukira engkau saja yang bersedia menjadi tunangannya."

Kalian pasti tahu, bahwa alinea terakhir yang diucapkan

Ir. Haryono itu mengandung arti sebaliknya. Tokoh Macaaksara digambarkan sebagai orang baik, tetapi ada lanjutan "engkau saja yang bersedia bertunangan dengannya." Ini sebuah sindiran.

Sindiran kadang-kadang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan menangkap sindiran sering menentukan keberhasilan dalam pergaulan. Orang yang tidak peka menangkap sindiran sering mendapat julukan "Muka tembok."

Membaca cerpen atau bacaan fiksi dapat meningkatkan kepekaan kalian dalam memahami sindiran dan maksud yang tersirat atau tersembunyi dari suatu ucapan. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam pergaulan.

Apakah kalian ingin dikenal sebagai remaja yang pandai bergaul di antara teman-teman? Apakah kalian ingin dijuluki sebagai remaja yang pandai menempatkan diri di kalangan orang dewasa seperti kalangan guru? Kalau jawab kalian "ya," kepekaan kalian dalam berkomunikasi ditantang untuk ditingkatkan. Dan, itu dapat diasah lewat bacaan fiksi.

Mengembangkan imajinasimu

Imajinasi atau "kemampuan membayangkan" bukanlah monopoli seniman seperti pengarang atau penulis. Seorang arsitek ketika menggambar rencana bangunan gedung juga harus mampu membayangkan gedungnya seolah-olah sudah jadi. Dengan bayangan gedung yang sudah jadi itu dapat dibuat gambar rencana yang pas.

Dengan imajinasi yang kaya seorang arsitek dapat membuat rencana bangunan yang baik sehingga lahir bangunan yang megah seperti Candi Prambanan (Abad ke-9), Istana Taj Mahal di India (Abad ke-13), dan Gedung MPR di Jakarta.

Sebaliknya, orang yang imajinasinya miskin sering hanya dapat mengerjakan sesuatu sesuai petunjuk yang rinci dari orang lain. Di dalam masyarakat, kalian sering mendengar ungkapan, "Mohon petunjuk" atau "Sesuai petunjuk". Orang yang sering menggunakan ungkapan ini besar kemungkinan memang miskin imajinasinya.

Apakah kalian ingin menjadi orang yang miskin imajinasi? Jawabnya tentu tidak. Nah, membaca karya fiksi adalah cara yang paling mudah untuk mengembangkan imajinasi kalian. Penjelasan begini.

Ketika kalian membaca cerpen "Di Luar Rencana", kalian bayangkan dan merasa hadir dalam cerita itu. Kalau kalian remaja putri, barangkali kalian membayangkan menjadi tokoh Mbak Asti atau "Aku". Kalau kalian remaja putra, barangkali kalian membayangkan menjadi tokoh Mas Bambang atau Ir. Haryono. Dengan membayangkan menjadi salah seorang tokoh itu, kalian dapat hadir dan mengikuti jalan cerita dengan mudah, menarik, bahkan ikut terkejut ketika kebohongan tokoh "Aku" terbongkar.

Kalau kalian sudah mampu ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, bahkan keterkejutan dalam cerita "Di Luar Rencana", itu tandanya imajinasi kalian sudah bagus. Dan imajinasi kalian akan berkembang lebih bagus lagi kalau kalian biasakan membaca cerpen dan novel-novel yang bermutu.

Menggelitik keterbukaanmu

Dalam cerpen "Di Luar Rencana" itu, tokoh "Aku" dilukiskan sebagai seorang gadis yang sudah berumur yang SOMBONG. Kesombongannya yang membuatnya selalu

menolak ketika Mbak Asti dan Mas Bambang berusaha mencarikan jodohnya. Kesombongannya yang menjadikan ia berani BERBOHONG.

Celakanya, kesombongan dan kebohongan tokoh Aku itu ketemu batunya. Kesombongan dan keras kepalanya sudah dikenal betul oleh Mas Bambang. Kebhongannya dengan jitu diketahui oleh Ir. Haryono. Akibatnya, tokoh Aku selalu hanya memperoleh perasaan kesal, jengkel, malu, dan tangis.

Untunglah, cerita berakhir dengan *happy end*, seperti terbaca pada kutipan berikut.

"Ternyata kamu lebih baik daripada aku, sabar dan dewasa," kataku, teringat kembali bagaimana aku memaki-makinya selama ini.

"Mas Bambang yang memberitahukan padaku, bagaimana watak dan kelakuanmu."

"O, Mas Bambang sudah tahu?" seruku kaget.

"Dia guruku, orang seperti kamu memang harus dibikin jera. Sombongnya luar biasa..."

Untung yang dihadapi tokoh Aku adalah Ir. Haryono yang *naksir* dia. Coba, dalam kehidupan sehari-hari kalian sombong dan membonghingi seseorang yang tidak *naksir* kalian. Bisa-bisa kalian digebuk.

Nasihat atau pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah si tokoh "Aku"? Jelas, SOMBONG dan BOHONG itu sikap dan tindakan yang dapat merugikan seseorang. Dengan ketajaman pikiran dan perasaan yang sudah terlatih, kalian pasti dapat memetik nasihat atau nilai-nilai kehidupan seperti ini.

Sesungguhnya, aneka macam nilai kehidupan yang positif dapat ditawarkan oleh berbagai bacaan fiksi yang bermutu, yang paling menarik nilai-nilai itu DITAWARKAN secara DEMOKRATIS. Nah, semuanya tergantung pada sikap terbuka kalian. Kalian

suka, ambil! Kalian tidak suka lewati demokratis ini juga ada pada ortumu ketika member nasihat?

Masih banyak lho!

Sebenarnya masih banyak lho hal-hal positif yang dapat digali dari cerpen "Di Luar Rencana", seperti contoh pemakaian bahasa yang hidup lincah, dan menarik, nilai-nilai persahabatan, dan teknik teknik bergaul para tokoh cerita yang gesit dan menyenangkan.

Akan tetapi, sekarang zamannya reformasi. Kita perlu bersikap lebih demokratis. Tidak semua pembicaraan tentang cerpen "Di Luar Rencana" ini Kakak monopoli. Masih tersedia ruang luas untuk kalian. Keluarkan pendapat kalian tentang cerpen itu. Pendapat kalian boleh berbeda dengan pendapat Kakak yang telah dikemukakan di muka. Tulis pendapat kalian dan kirimkan kepada: Kak Sumardi, Kompleks IKIP-H.100 Duren Sawit, Jakarta Timur 13440. Ini alamat sungguhan lho. Insya Allah, tulisanmu akan sampai. Kita dapat berbagi pengalaman atau pendapat.

Kalau kalian mau menuliskan pendapat kalian tentang cerpen "Di Luar Rencana", kemampuan penalaran dan menalar kalian akan meningkat pesat. Dan, yang lebih penting lagi kebenaran judul tulisan ini akan kalian rasakan.

Selamat menerima tantangan ini!

Cherio!

Jakarta, 13 Agustus 1998

FUNGSI BAHASA ETNIK UNTUK MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN¹

Robert Sibarani²

Pengantar

Mencermati kekurangtepatan penggunaan istilah budaya atau kebudayaan seperti istilah *budaya korupsi*, *budaya KKN*, *budaya malas*, dan *budaya kekerasan* serta memperhatikan kekurangpahaman sebagian masyarakat tentang kebudayaan seperti kebudayaan selalu dianggap “membebani” masyarakat atau kebudayaan hanya dianggap sebagai “tontonan” belaka, maka perlu mempertegas definisi kebudayaan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hakikat kebudayaan.

Pertanyaan yang harus dijawab oleh para ahli budaya berkenaan dengan definisi kebudayaan adalah untuk apakah kebudayaan bagi masyarakatnya atau mengapa masyarakat perlu mempertahankan kebudayaannya. Secara pragmatis, kebudayaan adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bermanfaat untuk mempertahankan dan mengembangkan cara hidupnya. Oleh karena itu, kebudayaan yang merupakan kebiasaan hidup suatu masyarakat harus membawa masyarakat lebih sejahtera dan/atau lebih bahagia. Kemungkinan kebudayaan hanya dapat membahagiakan masyarakatnya tanpa ada hubungan dengan peningkatan kesejahteraan mereka atau kadang-kadang hanya menonjol pada peningkatan kesejahteraannya tanpa secara langsung memperlihatkan kedamaian pada diri mereka.

Bahasa sebagai bagian kebudayaan dan sekaligus bahasa yang berperan untuk pengembangan kebudayaan juga harus mendapat perhatian dalam perumusan kebudayaan kita. Peranan bahasa etnik, bahasa Indonesia, dan bahasa asing perlu mendapat perhatian dalam keontek kebudayaan di Indonesia.

¹ Makalah untuk Kongres Bahasa Indonesia yang diadakan pada tanggal 14 s.d. 17 Oktober 2003 di Jakarta.

² Guru Besar Tetap di Universitas Sumatera Utara dan Rektor Universitas Darma Agung Medan.

Tipe Kebudayaan Indonesia

Kebudayaan harus dapat menjadikan masyarakatnya lebih damai dan lebih sejahtera, bukan sebaliknya menjadi beban terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, semua kebudayaan yang tidak bermanfaat untuk kedamaian (kebahagiaan) dan kesejahteraan manusia akan punah secara alamiah. Dengan demikian, kebudayaan dapat didefinisikan sebagai berikut. *Kebudayaan adalah keseluruhan kebiasaan manusia yang tercermin dalam pengetahuan, tindakan, dan hasil karyanya sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya untuk mencapai kedamaian dan/atau kesejahteraan hidupnya.*

Dalam kenyataan kemajemukan budaya bangsa kita dewasa ini, paling tidak ada tiga tipe kebudayaan yang perlu mendapat perhatian di Indonesia, yakni (1) kebudayaan etnik, (2) kebudayaan baru yang berakar pada kebudayaan etnik atau kebudayaan Baru-Etnik, dan (3) kebudayaan baru yang berorientasi pada kebudayaan asing atau kebudayaan Baru-Asing.

Kebudayaan tipe pertama, yakni kebudayaan etnik masih mudah kita temukan karena semua kebudayaan suku bangsa yang masih dipelihara oleh masyarakatnya termasuk kebudayaan etnik. Oleh karena penghitungan etnik dan penghitungan kebudayaan sering paralel dengan jumlah bahasa etnik, maka etnik di Indonesia kurang lebih 706 etnik karena bahasa etnik yang ada di Indonesia ada sekitar 706. Dalam hal bahasa, sebagai bagian kebudayaan, bahasa etnik adalah bahasa suku bangsa yang dipergunakan oleh masyarakat etnik di Indonesia seperti bahasa Batak Toba, bahasa Melayu, bahasa Batak Karo, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Semua unsur kebudayaan yang masih mengandung kebiasaan etnik tergolong ke dalam kebudayaan etnik seperti pelaksanaan adat dan pola bercocok tanam, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kebudayaan etnik ini makin lama makin menipis.

Kebudayaan tipe kedua, yakni kebudayaan baru yang berakar dari kebudayaan etnik adalah semua kebudayaan baru yang terlihat unsur atau akar budaya etniknya. Kebudayaan ini dapat disingkat dengan kebudayaan *Baru-Etnik* untuk menunjukkan bahwa kebudayaan ini adalah kebudayaan yang baru dikenal bangsa kita, tetapi masih memiliki nuansa tradisi etnik. Dalam hal bahasa, bahasa Indonesia merupakan kebudayaan tipe kedua ini karena bahasa Indonesia sudah

menjadi kebudayaan baru yang jelas-jelas berakar dari kebudayaan etnik. Akar utamanya adalah bahasa Melayu, tetapi sudah mendapat penambahan kosa kata baru yang bukan hanya berasal dari kebudayaan etnik. Dalam hal kesenian, semua lagu-lagu dan musik pop yang masih nampak tradisi etniknya tergolong dalam kebudayaan tipe kedua ini.

Kebudayaan tipe ketiga, yakni kebudayaan baru yang berorientasi pada kebudayaan asing tampak jelas pada pola kehidupan generasi kita sekarang ini. Untuk singkatnya, kebudayaan ini disebut dengan kebudayaan *Baru-Asing*. Pola makan anak-anak kita, cara berpakaian kita, dan pola hidup generasi muda kita sudah mengarah pada kebudayaan asing, yang sering kita anggap kebudayaan "modern". Hampir tidak ada beda kita dari bangsa lain jika kita memiliki kebudayaan tipe ketiga ini. Seandainya, bahasa Indonesia kita berorientasi pada kebudayaan asing, misalnya dengan menerima begitu banyak kosa kata dari bahasa Inggris seperti bahasa Melayu di Malaysia, baka bahasa itu termasuk kebudayaan tipe ketiga. Mungkin ada tipe keempat kebudayaan seperti kebudayaan etnik yang langsung berorientasi pada kebudayaan asing (etnik-asing), tetapi paling tidak ketiga jenis kebudayaan di atas yang tampak jelas sekarang ini dalam kebudayaan kita.

Ketiga tipe kebudayaan itu adalah kebudayaan bangsa atau kebudayaan Indonesia. Istilah kebudayaan nasional sebaiknya dihilangkan dalam terminologi kebudayaan kita karena maknanya mengandung hubungan subordinasi-superordinasi apalagi "puncak-puncak" kebudayaan daerah dianggap sebagai kebudayaan nasional. Padahal, kebudayaan tidak dapat dinilai dengan makna yang mengandung hubungan subordinasi-superordinasi seperti itu.

Bagaimana perlakuan kita terhadap ketiga tipe kebudayaan itu? Dalam penguatan identitas budaya kita, usaha revitalisasi kebudayaan harus difokuskan pada pemberdayaan kebudayaan etnik (tipe pertama) atau paling tidak pada kebudayaan baru yang berakar pada tradisi etnik (tipe kedua). Dengan membudayakan atau membiasakan diri dengan kebudayaan etnik dan kebudayaan baru-etnik, bangsa kita akan lebih menghargai kebudayaan kita sendiri dan akan lebih bermanfaat baik untuk identitas bangsa kita maupun untuk perbaikan ekonomi kita. Apabila bangsa kita membiasakan diri dengan kebudayaan baru-etnik, identitas budaya bangsa kita akan lebih jelas berbeda dengan budaya bangsa lain dan akan membutuhkan kreativitas baru yang dapat memanfaatkan tradisi

etnik. Secara ekonomi pun, hal itu akan lebih bermanfaat karena semakin banyak permintaan (*demand*) terhadap sumber-sumber atau bahan-bahan etnik, maka semakin menguntungkan pada masyarakat kita. Agar budaya bangsa kita lebih maju, pemanfaatan terhadap sumber-sumber etnik harus digalakkan dengan kreativitas dan ciptaan baru karena menguntungkan secara ekonomis dan pada gilirannya akan memperkuat identitas budaya politik bangsa kita sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

Bahasa Etnik

Sebelum dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berasal dari bahasa Melayu Riau, semua etnik di nusantara ini menggunakan bahasa etnik sebagai alat komunikasi sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, kelestarian dan pemertahanan bahasa etnik tampaknya semakin mengkhawatirkan karena adanya sikap bahasa masyarakat kita yang berat sebelah. Padahal, kedudukan setiap bahasa sama atau sederajat berdasarkan sudut pandang linguistik. Tidak ada bahasa yang disebut primitif. Betapapun miskinnya kehidupan suatu masyarakat, mereka tetap kaya akan bahasa sebagai alat komunikasi; bagaimanapun rendahnya sistem pengetahuan suatu masyarakat, mereka pasti memiliki sistem komunikasi simbolis yang memadai; betapapun primitifnya suatu masyarakat jika ditinjau dari sudut pandang lain, mereka memiliki bahasa yang sangat berkembang; betapapun sedikitnya jumlah penutur suatu bahasa, mereka pasti mempunyai kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan konsep pikiran mereka. Peranan bahasa yang sangat penting dalam kebudayaan suatu masyarakat dapat membuktikan bahwa bahasa mereka akan selalu berkembang. Bahasa yang mereka pergunakan mempunyai perbendaharaan kata dan gramatika yang memadai, yang tidak lebih rendah daripada perbendaharaan kata dan gramatika bahasa lain. Dengan demikian, meskipun bahasa etnik tertentu memiliki masyarakat penutur yang lebih sedikit daripada penutur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bahasa etnik itu secara linguistis mempunyai kedudukan yang sama dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yakni sama-sama berfungsi sebagai alat komunikasi masyarakat penuturnya. Bahasa-bahasa itu mempunyai tingkat kepadan perbendaharaan kata dan gramatika yang sama untuk mengungkapkan konsep pikiran penuturnya.

Sebagai alat komunikasi, setiap bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau amanat dari penyapa (pengirim) kepada pesapa (penerima). Komunikasi melalui bahasa dapat dikatakan berhasil apabila amanat atau pesan yang disampaikan penyapa dapat diterima pesapa seperti apa yang dimaksudkan penyapa. Interaksi masyarakat yang sangat beragam, sistem komunikasi yang luas, perkembangan teknologi yang canggih, dan kebijakan pemerintah menyebabkan bahasa etnik kadang-kadang tidak lagi digunakan untuk mengungkapkan konsep pikiran dan budaya etnik itu secara bebas, tetapi telah digantikan oleh bahasa Indonesia. Seolah-olah ada perintah untuk tidak berbahasa etnik di depan umum meskipun peserta komunikasi itu berasal dan lebih fasih berbahasa etnik. Bahkan, yang lebih menyedihkan, ada sementara orang yang merasa "malu" berbahasa etnik jika didengar orang dari etnik lain. Sebaliknya, ada orang yang merasa tidak enak/senang jika dia mendengar orang berbahasa etnik.

Padahal, pada kenyataannya, sebagai alat komunikasi yang harus dapat digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dunia modern, bahasa etnik terus diperkaya dengan cara menerima kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kontak bahasa semacam itu mengakibatkan bahwa bahasa etnik tidak lagi hanya bahasa yang memperkaya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa yang diperkaya bahasa Indonesia.

Jika ditinjau persentase saling pengaruh antara keduanya, pengaruh bahasa Indonesia ke dalam bahasa etnik lebih besar daripada pengaruh bahasa etnik ke dalam bahasa Indonesia terutama di bidang pengembangan kosakata. Bahkan, kadang-kadang kata-kata dalam bahasa Indonesia lebih sering muncul ketika berkomunikasi secara resmi meskipun terdapat padanan kata-kata itu dalam bahasa etnik.

Kasus bahasa etnik yang saya maksudkan di sini lebih saya fokuskan pada bahasa etnik di Sumatera Utara yakni bahasa Nias dan bahasa-bahasa Batak seperti bahasa Batak Toba, bahasa Batak Karo, bahasa Batak Simalungun, bahasa Batak Pakpak-Dairi, dan bahasa Batak Angkola-Mandailing. Bahasa Melayu di Sumatera Utara tidak begitu bermasalah karena memiliki persamaan dengan bahasa Indonesia.

Situasi Kebahasaan di Indonesia

Ada tiga masalah bahasa yang mesti mendapat perhatian di Indonesia yakni bahasa etnik, bahasa nasional, dan bahasa asing. Di samping sebagai alat komunikasi antarpenutur pada setiap bahasa itu, bahasa etnik sangat penting terutama dalam pelestarian kebudayaan dan pengetahuan etnik, bahasa nasional sangat penting terutama dalam persatuan bangsa dan penyebaran pengetahuan, dan bahasa asing sangat penting terutama dalam penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dari dunia yang berbahasa asing. Dengan demikian, masyarakat Indonesia seharusnya dituntut sebagai masyarakat yang multilingual yakni masyarakat yang sedikitnya menguasai satu bahasa etnik, bahasa nasional, dan bahasa asing. Jika dilihat hasil sensus penduduk tahun 1990, 107.066.316 orang (67,80 %) penduduk Indonesia tergolong masyarakat bilingual (dapat berbahasa Indonesia di samping menguasai salah satu bahasa etnik); 23.802.520 orang (15,07 %) penduduk Indonesia tergolong masyarakat monolingual berbahasa Indonesia dan 27.055.488 orang (17,13%) penduduk Indonesia tergolong masyarakat monolingual berbahasa etnik.

Sudah pasti, hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menguasai bahasa asing di samping menguasai bahasa etnik dan bahasa nasional (Indonesia). Jika data itu masih bisa dipercaya, itu berarti bahwa terdapat 84,93 % masyarakat Indonesia yang dapat berbahasa etnik empat belas tahun yang lalu meskipun persentase itu pasti sudah semakin berkurang.

Jika penanganan kebahasaan di Indonesia berjalan seperti sekarang ini dalam waktu yang cukup lama, tampaknya situasi kebahasaan kita pada waktu mendatang akan mengarah pada masyarakat monolingual berbahasa Indonesia dan masyarakat bilingual berbahasa Indonesia dan berbahasa asing. Kalaupun terdapat masyarakat multilingual, masyarakat itu menguasai bahasa Indonesia dan beberapa bahasa asing. Itu berarti bahwa masa depan bahasa etnik akan terancam. Ada beberapa faktor penyebabnya terutama situasi kebahasaan di Sumatera Utara. Pertama, generasi muda memiliki kecenderungan pergi ke kota atau merantau ke tempat lain. Oleh karena situasi dan tuntutan interaksi masyarakat di kota, mereka cenderung berbahasa Indonesia. Anak-anak mereka pun kemudian akan menjadi penutur bahasa Indonesia dan tidak dapat lagi menguasai bahasa etnik. Penghuni etnik asal adalah orang-orang tua yang disebabkan keterbatasan usianya tidak mungkin meneruskan pelestarian bahasa etniknya. Kedua,

masyarakat ekonomi/berpendidikan menengah ke atas cenderung lebih senang berbahasa Indonesia daripada berbahasa etnik meskipun mereka sama-sama berbahasa ibu yang sama. Faktor penyebab yang mengakibatkan mereka cenderung berbahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, mereka sudah terbiasa dalam pergaulan dengan masyarakat dari etnik lain sehingga terbawa-bawa dan lebih terlatih dalam komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dialami seseorang ketika dia diminta berbicara dalam bahasa etnik pada acara umum: meskipun dia penutur bahasa etnik tertentu, dia lebih fasih berbicara secara resmi dalam bahasa Indonesia. Kedua, mereka malu berbahasa etnik. Ini mungkin yang lebih "berbahaya" dalam pelestarian bahasa etnik. Hal ini dialami terutama oleh generasi muda atau mahasiswa di kota-kota. Mereka, terutama sekali wanita, malu berbahasa etnik kalau didengar masyarakat dari suku lain sehingga mereka kadang-kadang berbicara sangat pelan supaya tidak didengar orang di sekeliling mereka. Kondisi ini pun akan merugikan dalam pelestarian bahasa etnik jika hal itu terus berlangsung. Sebaiknya, kita perlu tahu bahwa tidaklah salah jika kita berbahasa etnik sepanjang peserta komunikasi yang terlibat itu mengerti bahasa etnik itu atau orang yang di sekeliling yang berbicara itu tidak terlibat dalam komunikasi itu. Bila perlu, peserta komunikasi itu dapat menerjemahkannya kepada orang yang tidak mengerti bahasa etnik itu. Bahasa etnik adalah kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan pelestarian bahasa etnik secara efektif hanyalah dengan memakainya sebagai alat komunikasi. Secara sosiolinguistik dan secara antropinguistik, situasi komunikasi seperti itu sangat dimungkinkan.

Sebenarnya, pemerintah telah menetapkan landasan hak hidup dan pelestarian bahasa etnik dalam beberapa momen penting. Pertama, rumusan butir ketiga Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tidaklah mengabaikan bahasa-bahasa etnik, tetapi hanya mengatakan bahwa suku-suku bangsa di Indonesia perlu menjunjung satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia tanpa menghilangkan bahasa etnik. Kedua, penjelasan Pasal 36 UUD 1945 dengan jelas menyiratkan bahwa bahasa-bahasa etnik tetap digunakan oleh penuturnya dan dipelihara oleh negara. Ketiga, pelestarian bahasa etnik telah mendapat perhatian dalam GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, dan GBHN 1993 baik dalam kaitannya dengan pengembangan bahasa Indonesia maupun

dalam rangka pengembangan bahasa etnik itu. Akan tetapi, meskipun hal itu dituliskan dalam dokumen penting, pelaksanaannya atau realisasinya hampir tidak pernah berjalan.

Harus diakui juga bahwa selama ini telah banyak dilakukan penelitian terhadap bahasa-bahasa etnik di Indonesia terutama oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi penelitian itu lebih difokuskan pada penginventarisasian dan pendeskripsian bahasa-bahasa etnik itu dan kurang memperhitungkan masyarakat penutur dan masa depan bahasa-bahasa etnik itu. Padahal, walaupun semua bahasa-bahasa etnik itu diinventarisasi dan dideskripsikan, hal itu kurang berarti tanpa mengikutsertakan masyarakat penutur bahasa-bahasa etnik itu. Kecenderungan yang terjadi sekarang adalah kurangnya penutur bahasa etnik dan lunturnya penghargaan dan sikap bahasa masyarakat terhadap bahasa etnik. Pada masa mendatang, mungkin perlu kajian ulang terhadap penelitian bahasa-bahasa etnik yakni lebih memfokuskan pada usaha peningkatan pemakaian bahasa etnik dan peningkatan sikap masyarakat terhadap bahasa etnik.

Peranan Bahasa Sebagai Perekat Budaya

Kata *perekat* dalam tulisan ini diartikan sebagai 'pemersatu', 'sesuatu yang membuat jadi dekat', dan/atau 'sesuatu yang mempereratkan'. Atas dasar pengertian itu, peranan bahasa sebagai perekat budaya dalam kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengimplikasikan tiga pengertian besar sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

Pertama, bahasa berfungsi untuk merekatkan suatu kebudayaan yang terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing terpisah menjadi satu kebudayaan yang utuh dan berkomplementer sebagai satu identitas budaya. Bahasa pada fungsi pertama ini adalah bahasa etnik atau bahasa daerah yang berperan sebagai alat berpikir dan alat berasa (emosi) masyarakat lokal atau etnik tertentu, baik yang terwujud dalam gagasan, tindakan berpola maupun hasil karya masyarakat etnik itu sesuai dengan wujud kebudayaan.

Sebagai alat berpikir lokal, bahasa dimanfaatkan sebagai media mengembangkan pola kehidupan masyarakat etnik dari zaman sebelum mengenal bahasa Indonesia sampai setelah masyarakat dapat berbahasa Indonesia. Bahkan, sampai sekarang bahasa etnik masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat etnik untuk berhitung atau untuk memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupannya. Penutur yang bahasa

pertamanya bahasa etnik pada umumnya menggunakan bahasa etnik ketika berbicara dalam dirinya atau berpikir internal. Di tingkat SD pada beberapa sekolah di daerah kabupaten, bahasa etnik juga masih digunakan sebagai bahasa pengantar. Sebagai alat beresasa lokal, bahasa etnik (terutama bagi masyarakat yang bahasa pertamanya bahasa etnik) masih lebih cocok sebagai penyampai daya emosinya, baik berupa emosi positif seperti rasa senang, rasa bangga, rasa aman, rasa cinta, rasa damai, rasa adil, rasa lega, rasa terharu, rasa kasihan, dan rasa percaya maupun emosi negatif seperti rasa kecewa, rasa frustrasi, rasa iri, rasa cemburu, rasa curiga, rasa sepi, rasa susah, rasa sedih, rasa takut, rasa malu, rasa marah, dan rasa benci. Penutur yang bahasa pertamanya bahasa etnik pada umumnya lebih sering menggunakan bahasa etnik itu ketika menjerit atau meratap.

Emosi dan pikiran lokal ini juga tampak pada kecenderungan seseorang merasa dekat pada suatu budaya etnik tertentu apabila dia mengetahui bahasa etnik itu. Apabila orang Jawa tahu bahasa Toba, dia akan merasa dekat pada budaya Toba dan orang Toba akan menerima orang Jawa itu sebagai bagian dari masyarakat Toba. Lihatlah betapa banyak orang Tionghoa di daerah Toba-Samosir dan Tapanuli Utara yang telah diangkat menjadi orang Toba dengan penabalan *marga*. Sebaliknya, kalau ada dua orang Karo, satu dapat berbahasa Karo dan satu lagi tidak dapat berbahasa Karo, saya yakin orang yang dapat berbahasa Karo itu akan lebih dekat perasaannya pada budaya Karo daripada orang yang tidak dapat berbahasa Karo itu. Cara berpikir orang yang dapat berbahasa etnik itu pun - terutama tentang kehidupan etnik - akan lebih luas daripada orang yang tidak dapat berbahasa etnik.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, perasaan seperti ini sering terjadi. Masyarakat disatukan oleh karena mereka dapat saling berkomunikasi. Seseorang akan merasa terasing jika dia tidak dapat mengerti bahasa etnik suatu kelompok masyarakat ketika terjadi tindak komunikasi dengan menggunakan bahasa etnik itu. Di samping itu, suatu bahasa etnik sekaligus kita gunakan untuk mengidentifikasi suku dan kebudayaan etnik. Penghitungan jumlah bahasa tampaknya sama dengan penghitungan jumlah suku dan kebudayaan etnik. Sekedar penemabah inforamsi bahwa ada sekitar 706 bahasa di Indonesia meskipun sekitar 240 di antaranya berada di Irian Jaya. Dengan demikian, jelaslah bahasa etnik mempererat,

mempersatukan, dan merekatkan pikiran dan emosi etnik sebagai identitas etnik.

Atas dasar itu, dalam konteks otonomi daerah, bahasa etnik sangat penting dalam rangka penguatan identitas kebudayaan etnik dengan penggalian potensi budaya melalui pemanfaatan bahasa etnik. Kebudayaan etnik dan kebudayaan baru-etnik, sebagaimana tipe kebudayaan I dan II di atas, akan dapat dipertahankan, direvitalisasi, dipahami dengan bantuan bahasa.

Kedua, bahasa berfungsi untuk merekatkan kebudayaan-kebudayaan etnik menjadi satu keluarga yang rukun, saling menghargai, dan saling mendukung menjadi satu identitas kekayaan bersama. Sebagaimana yang disebutkan di atas, ada sekitar 706 bahasa etnik di Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa betapa sulitnya seorang pejabat seperti presiden berkomunikasi dengan rakyatnya seandainya tidak ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa nasional kita. Akan tetapi, hal itu tidak dialami bangsa kita karena bahasa Indonesia dapat mempersatukan bangsa kita yang terdiri atas beratus-ratus etnik dengan bahasa etniknya masing-masing. Cara pandang, cara berpikir, dan cara mengekspresikan emosi masyarakat etnik dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia meskipun pada mulanya agak sulit dan janggal.

Di samping peranannya yang mempersatukan budaya etnik, bahasa Indonesia juga telah mempersatukan sebagian besar masyarakat Indonesia yang lahir dan dibesarkan di kota-kota. Pada umumnya, bahasa pertama mereka adalah bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa etnik meskipun orang tua mereka masih berbahasa etnik. Mereka, pada umumnya generasi muda, dipersatukan oleh bahasa Indonesia.

Kehadiran bahasa Indonesia di negara kita memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya sangat jelas karena kita dapat berkomunikasi, saling mengerti, saling memahami, dan mudah mendapatkan pengetahuan karena bantuan bahasa Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain, sudah muncul generasi baru kita yang tidak dapat lagi berbahasa etnik sehingga dia dengan sendirinya akan kehilangan identitas budaya etniknya. Pengembangan dan pengajaran bahasa Indonesia yang "terlalu" maju tanpa menghiraukan bahasa etnik mengakibatkan dampak negatif pada masa depan bahasa etnik di negara kita ini. Kita lupa bahwa salah satu cara mematikan suatu bahasa adalah mengajarkan bahasa lain pada penutur

bahasa itu dengan menyuntikkan “martabat” yang lebih besar pada bahasa yang diajarkan dan melemahkan “muruah” bahasa yang dimiliki.

Bahasa Indonesia, sebagaimana bahasa etnik, juga merupakan alat berpikir dan beresasa masyarakat, tetapi lebih berfokus pada pikiran dan emosi nasional. Pikiran dan emosi nasional mengarah pada suatu tingkatan yang sudah keluar menjangkau etnik-etnik lain. Apa yang dipikirkan, dikembangkan, diterapkan, dirasakan, dipersepsikan, dan dikhayalkan bukan lagi hanya untuk kepentingan kelompok etniknya, tetapi untuk kepentingan etnik lain atau sedikitnya tidak merugikan etnik atau kelompok lain.

Pikiran dan emosi nasional yang disampaikan oleh bahasa itu menjadi pembeda kita dari masyarakat lain. Singkatnya, bahasa Indonesia di sini berfungsi sebagai alat berpikir dan menyampaikan emosi secara nasional untuk menjadi identitas budaya nasional kita. Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama berbahasa “Melayu”, kita tetap dapat membedakan identitas budaya keduanya karena bahasa Melayu di Indonesia (bahasa Indonesia) dan bahasa Melayu di Malaysia (bahasa Malaysia) sudah berbeda.

Bahasa memang penting untuk mempererat atau memperintim hubungan emosional masyarakat penuturnya. Andaikanlah ada dua pasang orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Pasangan pertama sama-sama dapat berbahasa Indonesia, tetapi satu orang dari pasangan kedua tidak dapat berbahasa Indonesia, hubungan emosional mereka terutama perasaan keindonesiaan mereka akan berbeda. Hubungan emosional pasangan pertama lebih erat daripada hubungan emosional pasangan kedua.

Suatu ketika, ada dua orang sedang makan pada meja yang berbeda di sebuah kantin di Hamburg, Jerman. Yang satu mengira bahwa orang yang di hadapannya adalah orang Amerika Latin, demikian juga sebaliknya. Setiap kali mereka bertepatan makan pada kantin yang sama, mereka saling mencurigai, bahkan beranggapan saling melotot seperti “mencari musuh”. Pada waktu berikutnya, seorang di antaranya mendengar orang yang satu lagi berbahasa Indonesia dengan sesama orang Indonesia, serta merta muncul hubungan emosionalnya dengan mengatakan, “Rupanya Anda orang Indonesia”.

Hubungan bahasa dengan kebudayaan yang terakhir ini perlu juga dibuktikan dengan pergi ke Berastagi untuk membeli

jeruk dengan menggunakan bahasa Karo dan bahasa Inggris. Mungkin, harga jeruk itu lebih murah dengan menggunakan bahasa Karo dan lebih mahal dengan menggunakan bahasa Inggris.

Ketiga, bahasa berfungsi untuk merekatkan kebudayaan-kebudayaan negara yang berbeda menjadi satu wawasan bersama untuk saling mengerti dan saling menghargai. Banyak orang yang sudah merasa dekat pada kebudayaan Amerika, Inggris, Australia atau penutur asli bahasa Inggris karena dia tahu bahasa Inggris. Meskipun masih dalam tahap “merasa”, ini adalah bukti betapa bahasa asing dapat mendekatkan orang terhadap budaya asing itu.

Orang asing yang dapat berbahasa Indonesia akan dapat mengawinkan pola berpikir dan beresanya menurut budaya asing dan budaya Indonesia sehingga dia dapat menerapkan bahasa dan budaya yang sesuai apabila dia berinteraksi di lingkungan masyarakat. Rasa kedekatan atau keamatan kita pada orang yang dapat berbahasa Indonesia itu pun akan segera muncul.

Wawasan intelektual dan wawasan emosional seseorang akan lebih mengglobal apabila dia dapat berbahasa asing, dalam hal ini, bahasa internasional. Hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun peranan penerjemah dapat mengatasi ketidakpahaman suatu bahasa asing, hal itu hanya dapat mengalihkan wawasan intelektual, tetapi tidak dapat mengalihkan wawasan emosional.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa bahasa - baik bahasa etnik, bahasa Indonesia maupun bahasa asing - berfungsi untuk mempersatukan, mempererat, dan merekatkan budaya-budaya yang berbeda menjadi satu keluarga besar budaya.

Fungsi bahasa sebagai perekat budaya sebagaimana yang disinggung di atas lebih difokuskan pada *covert culture* atau *untouchable culture* (budaya ide) sebagaimana yang ditonjolkan oleh paradigma kognitif. Budaya yang direkatkan oleh bahasa dalam diri manusia adalah kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya. Dengan kata lain, bahasa dapat mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional³.

Melalui pelambangan sebagai salah satu sifat hakiki bahasa, orang dapat berpikir abstrak atau berpikir objektif tanpa

³ Baca Tampubolon dalam “Peran Bahasa dalam Memajukan Bangsa” (2001).

kehadiran objek itu di hadapannya dan orang dapat berpikir sistematis yang memungkinkan proses berpikir berlangsung dengan efektif dan efisien.

Bahasa berperan untuk melakukan kategorisasi logis dalam mengidentifikasi dan mencirikan objek-objek serta membuat proposisi yang mengandung logika dan daya kritis. Tanpa kemampuan kategorisasi logis dan proposisi, orang tidak akan dapat berpikir kritis dan mengembangkan kecerdasan intelektualnya.

Bahasa juga berperan penting untuk mengembangkan kecerdasan intelektual melalui sumber-sumber informasi seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah ilmiah, media massa cetak dan elektronik. Semua sumber informasi itu menggunakan bahasa sebagai medianya. Sumber informasi intelektualitas ini akan mendorong perkembangan daya nalar analitis, sintesis, selektif, inovatif, dan kreatif serta mengembangkan wawasan masyarakat. Sumber informasi emosi dapat diperoleh dari karya-karya sastra, buku-buku budaya, dan buku-buku teologi.

Kecerdasan emosional juga akan terbangun lewat kategorisasi emotif seperti pengidentifikasian dan pencirian hal-hal yang berkenaan dengan segala seluk-beluk emosi seperti pengidentifikasian perbedaan antara rasa senang dan rasa bahagia. Intonasi yang sesuai dan gaya bahasa yang bagus juga akan dapat menggugah emosi sehingga lawan bicara akan terpengaruh terhadap pesan bahasa kita atau akan terdapat daya perlokusi secara pragmatik.

Aspek bahasa yang sangat penting dalam pengembangan kecerdasan emosional adalah masalah kesantunan bahasa. Kesantunan (kesopansantunan) sama dengan tata krama atau etiket. Kesantunan atau etiket adalah tata cara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi persyaratan yang disepakati dalam perilaku sosial.

Apabila kita memperhatikan pengertiannya, kesantunan dapat dilihat dari berbagai segi dalam pergaulan sehari-hari. Pertama, kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan sehari-hari. Ketika orang dikatakan santun, maka dalam diri seseorang itu tergambar nilai sopan santun atau nilai etiket yang berlaku

secara baik dalam masyarakat tempat seseorang itu mengambil bagian sebagai anggota masyarakat. Ketika dia dikatakan santun, kita memberikan nilai kepadanya, baik yang dievaluasi dalam seketika maupun yang dievaluasi secara konvensional dan melalui proses yang panjang dalam pergaulan sehari-hari. Sudah tentu, evaluasi dalam proses yang panjang akan lebih mengekalkan nilai yang diberikan kepadanya. Kedua, kesantunan sangat kontekstual, yakni berlaku dalam suatu masyarakat, tempat atau situasi tertentu, tetapi belum tentu berlaku bagi masyarakat, tempat atau situasi lain. Ketika orang bertemu teman dekat, boleh saja kita menggunakan kata yang agak kasar dengan suara yang keras, tetapi hal itu tidaklah santun apabila ditujukan kepada tamu yang baru kita kenal. Ketiga, kesantunan selalu bipolar, yakni memiliki hubungan dua kutub seperti antara anak dengan orang tua; antara orang yang masih muda dengan orang yang lebih tua; antara tuan rumah dengan tamu; antara pria dengan wanita; antara seorang pembaca dengan pemberi informasi. Keempat, kesantunan tercermin dalam cara bertutur kata (berbahasa), cara berbuat (bertindak), dan cara berpakaian.

Kesantunan bahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Di dalam tindak komunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan norma-norma budaya yang hidup dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka dia tidak jarang dituduh orang yang aneh, egois, sombong, acuh, tidak beradab atau bahkan tidak berbudaya.

Kesantunan bahasa sangat penting diperhatikan para peserta komunikasi demi lancarnya komunikasi. Oleh karena itu, masalah kesantunan bahasa harus mendapat perhatian terutama dalam berkomunikasi. Dengan mengetahui kesantunan bahasa, sebagai bagian tata cara berbahasa, diharapkan agar orang lebih cepat memahami pesan yang disampaikan dalam komunikasi karena tata cara berbahasa bertujuan mengatur:

1. Apa yang sebaiknya kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu,
2. Ragam bahasa apa yang sewajarnya kita pakai dalam situasi tertentu,
3. Kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara kita dan menyela pembicaraan orang lain,

4. Bagaimana kita mengatur kenyaringan suara ketika berbicara,
5. Bagaimana sikap dan gerak-gerik kita ketika berbicara, dan juga
6. Kapan kita harus diam atau jangan berbicara.

Tata cara berbahasa seseorang dipengaruhi norma-norma budaya suku bangsa atau kelompok masyarakat tertentu. Tata cara berbahasa orang Inggris berbeda dengan tata cara berbahasa orang Amerika meskipun mereka sama-sama berbahasa Inggris. Tata cara berbahasa orang Jawa juga berbeda dengan tata cara berbahasa orang Aceh meskipun mereka sama-sama berbahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan yang sudah mendarah daging sangat berpengaruh pada komunikasi seseorang. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari atau memahami norma-norma budaya dalam berbahasa atau berkomunikasi. Namun, tata cara berbahasa yang mengikuti norma-norma budaya akan menghasilkan kesantunan bahasa atau kesantunan komunikasi.

Bagaimanakah pembentukan kesantunan bahasa itu? Kesantunan bahasa, sebagaimana yang disinggung sebelumnya, menggambarkan kesantunan atau kesopansantunan penuturnya. Kesantunan berbahasa sedikitnya dapat dilakukan dengan lima cara. Pertama, kita perlu menerapkan prinsip kesopanan (*politeness principle*) dalam berbahasa, yakni sebuah prinsip yang berusaha untuk memaksimalkan kesenangan atau kearifan, keuntungan, rasa salut atau yang mengutamakan keuntungan untuk orang lain dan kerugian untuk diri sendiri, maksim kemurahan yang mengutamakan kesalutan/rasa hormat pada orang lain dan rasa kurang hormat pada diri sendiri, maksim kerendahan hati yang mengutamakan pujian pada orang lain dan rasa rendah hati pada diri sendiri, maksim kecocokan yang mengutamakan kecocokan kepada orang lain, dan maksim kesimpatikan yang mengutamakan rasa simpati pada orang lain. Dengan menerapkan prinsip kesopanan ini, orang tidak lagi menggunakan ungkapan-ungkapan yang merendahkan orang lain seperti, "Ah, kalau begitu semua orang tahu", "Rupanya itu saja yang dia tahu", dan sebagainya.

Kedua, kesantunan berbahasa harus menghindarkan kata-kata tabu (*taboo*) dalam berkomunikasi. Pada kebanyakan masyarakat, kata-kata yang berbau seks, kata-kata yang merujuk pada organ-organ tubuh yang lazim ditutupi pakaian, kata-kata yang merujuk pada sesuatu benda yang menjijikkan,

nama-nama hewan yang digunakan untuk menyapa orang, dan kata-kata “kotor” atau “kasar” termasuk kata-kata yang tabu atau yang tidak lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari kecuali untuk tujuan tertentu.

Ketiga, sehubungan dengan penghindaran kata-kata tabu itu, penggunaan eufemisme (ungkapan yang halus sebagai pengganti segala yang tabu) perlu dilakukan agar bahasa kita terjaga dan sopan. Namun, bahasa itu akan menjadi tidak santun apabila menggunakan eufemisme yang berlebihan atau apabila bahasa itu terlalu eufemistis. Jika eufemisme itu telah menggeser pengertian suatu kata, bukan untuk memperhalus kata-kata yang tabu, maka eufemisme itu mengakibatkan ketidaksantunan suatu bahasa seperti orang ‘miskin’ diganti menjadi orang ‘prasejahtera’. Di sini telah terjadi kebohongan publik. Kebohongan itu merupakan bagian dari ketidaksantunan bahasa.

Keempat, kesantunan juga dapat tercapai dengan menggunakan pilihan kata yang *honorifik*, yaitu ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Kata-kata sapaan yang halus dan kata-kata kelas tinggi pada suatu tingkatan bahasa seperti ragam *kromo inggil* dalam bahasa Jawa perlu digunakan kepada orang yang tingkat sosial dan usianya lebih tinggi daripada pembicara atau kepada orang yang kita hormati. Meskipun kata *Engkau*, *Anda*, *Saudara*, dan *Bapak/Ibu* secara denotatif sama maknanya, tetapi efek kesantunannya berbeda. Bahkan, percakapan yang tidak menggunakan kata sapaan pun dapat mengakibatkan kekurangantunan.

Kelima, kesantunan dapat juga tercapai dengan menerapkan tindak tutur tidak langsung (*indirect speech act*), yaitu jenis ujaran yang disampaikan dengan menggunakan modus kalimat yang berbeda dari maksud kalimatnya. Berdasarkan modusnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif) yang digunakan untuk memberitakan atau menginformasikan sesuatu, kalimat tanya (interogatif) yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah (imperatif) yang digunakan untuk menyatakan perintah, ajakan, permintaan atau permohonan. Apabila kalimat berita digunakan untuk memberitakan, kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat perintah untuk memerintah seperti fungsinya secara konvensional, maka tindak tutur yang dihasilkan adalah tindak tutur langsung (*direct speech act*). Akan tetapi, apabila kalimat berita atau kalimat tanya digunakan untuk menyuruh, maka

tindak tutur yang dihasilkan adalah tindak tutur tidak langsung. Dalam berbahasa, tindak tutur tidak langsung biasanya lebih sopan daripada tindak tutur langsung seperti terlihat di bawah ini:

(1) Pangkaslah rambut Bapak!

(2) Rambut Bapak sudah panjang.

Kalimat (2), tindak tutur tidak langsung, lebih sopan daripada kalimat (1), tindak tutur langsung, meskipun makna atau maksud kedua kalimat itu sama. Kemungkinan besar, efek komunikasi kalimat pertama lebih baik daripada efek kalimat pertama.

Namun, karena berbahasa bukan bersifat absolut, melainkan kontekstual, maka tindak tutur tidak langsung ini pun harus disesuaikan dengan konteks situasi komunikasi sehingga maksud kalimat yang digunakan tidak kabur. Sepanjang maksud kalimat itu sama, maka penutur diperbolehkan menggunakan tindak tutur tidak langsung, tetapi kalau berubah, maka sebaiknya menggunakan tindak tutur langsung.

Keenam, kesantunan bahasa dapat dibentuk dengan menerapkan aspek-aspek nonlinguistik yang sesuai. Oleh karena tata cara berbahasa selalu dikaitkan dengan penggunaan bahasa sebagai sistem komunikasi, maka jenis-jenis tanda lain yang turut ambil bagian dalam komunikasi seperti unsur paralinguistik, kinetik, dan proksemika perlu diperhatikan untuk mencapai kesantunan bahasa.

Tujuan utama kesantunan bahasa adalah memperlancar komunikasi sehingga bahasa yang sengaja dibelit-belitkan, yang tidak tepat sasaran atau tidak menyatakan yang sebenarnya karena enggan kepada orang yang lebih tua seperti yang sering ditudingkan kepada masyarakat Melayu/Indonesia justru merupakan ketidaksantunan bahasa. Singkatnya, apabila bahasa yang digunakan seseorang sengaja mengaburkan komunikasi, maka bahasa yang digunakannya menjadi tidak santun. Oleh karena itu, bahasa yang sengaja mengaburkan berita kebenaran termasuk dalam ketidaksantunan.

Dengan demikian, kesantunan bahasa sebagai ciri khas masyarakat Melayu/Indonesia harus dipertahankan sebagai bagian dari peradaban masyarakat Melayu/Indonesia, tetapi kesantunan bahasa tidak boleh disalahgunakan untuk menghambat kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan kebenaran. Kesantunan bahasa juga tidak boleh terlalu eufemistis sehingga menjadi kebohongan. Dengan menerapkan kesantunan bahasa ini, ketersinggungan akan dapat dihindari

yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik di masyarakat.

Penutup

Kenyataan menunjukkan bahwa di satu sisi, perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita semakin meningkat, tetapi di sisi lain, masa depan bahasa etnik semakin terancam. Semua kita pasti sepakat bahwa kita menginginkan kedua-duanya berjalan beriring ke arah perkembangannya yang wajar dan hal itu tidak mustahil dapat terjadi. Kunci utama adalah niat, rasa bangga, sikap bahasa, dan kesadaran kita semua untuk meningkatkan kedua-duanya. Kita harus menanamkan dalam diri kita terutama dalam diri generasi muda bahwa penguasaan bahasa etnik merupakan kebanggaan. Di samping pemer kaya bahasa Indonesia, bahasa etnik merupakan identitas bangsa. Janganlah kita menganggap bahwa "pemer kaya" itu berarti posisi subordinasi.

Peran para orang tua di kota sangat penting dalam pelestarian bahasa etnik. Jika orang tua (terutama orang tua yang menguasai satu bahasa etnik) menggunakan bahasa etnik ketika berkomunikasi dengan anak-anaknya di rumah, si anak dengan sendirinya akan mendapat dasar pengetahuan bahasa etnik. Para orang tua perlu mengetahui bahwa semakin banyak si anak mengetahui bahasa, maka semakin luas wawasan berpikirnya dan semakin mudah mengetahui bahasa-bahasa lain. Tidaklah sebaliknya bahwa semakin banyak bahasa dikuasai si anak, maka semakin terbatas kemampuannya untuk menguasai pengetahuan lain.

Penggunaan bahasa etnik di tempat umum oleh masyarakat penutur bahasa etnik tidak perlu dicurigai atau dianggap sebagai "kesalahan", tetapi bahkan harus dihargai sepanjang tidak mengganggu orang lain. Kecurigaan itu tidak perlu. Di samping itu, penguatan bahasa etnik sebagai identitas etnik tidak perlu dikhawatirkan karena tidak akan mengganggu persatuan bangsa jika identitas etnik itu diterima dan dihargai sebagai kekayaan bangsa. Bahkan, jika identitas etnik sebagai kekayaan bangsa itu "ditutupi" atau dicoba untuk dihapuskan, maka akan mengganggu persatuan bangsa. Dengan demikian, kita perlu melakukan reorientasi atau kajian ulang terhadap fungsi dan kedudukan bahasa etnik yang dilakukan selama ini.

Berkenaan dengan kebudayaan etnik, "nyawa" kebudayaan etnik sangat tergantung pada kehidupan bahasa

etnik yang menjadi wahana dan mediana. Oleh karena itu, untuk kita orang Indonesia, bahasa etnik, bahasa Indonesia, dan bahasa asing adalah tiga bahasa yang memiliki kedudukan dan peranan yang masing-masing penting dalam era globalisasi mendatang. Dengan demikian, janganlah malu berbahasa etnik, pupuklah bahasa nasional, dan kuasailah bahasa asing!

Daftar Pustaka

Alisyahbana, Sutan Takdir

1979 *Arti Bahasa, Pikiran, dan Kebudayaan dalam Hubungan Sumpah Pemuda 1928* (Pidato Sambutan Sutan Takdir Alisyahbana pada Upacara Penyerahan Gelar Doctor Honoris Causa pada tanggal 27 Oktober 1979 oleh Universitas Indonesia). Jakarta: PT Dian Rakyat.

Beratha, Ni Luh Sutjiati

1998 "Materi Linguistik Kebudayaan" dalam *Linguistika Tahun V Edisi 9*, September 1998. Denpasar: Program Magister (S2) Linguistik, Universitas Udayana.

Crystal, David

1980 *A First Dictionary of Linguistics and Phonetics*. London: Andre Deutsch.

1989 *The Cambridge Encyclopedia of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dashefsky, Arnold. (Ed.)

1975 *Ethnic Identity in Society*. Connecticut: Rand McNally College Publishing Company.

De Jong, P.E. De Josselin dan Erik Schwimmer

1982 *Symbolic Anthropology in The Netherlands*. Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff.

Duranti, Alessandro (ed.)

1997 *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.

2001 *Linguistic Anthropology*. Massachusetts: Blackwell Publishers

Edward, John.

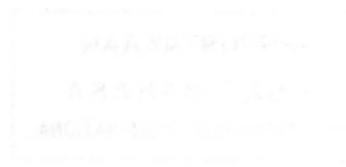
1985 *Language, Society and Identity*. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Foley, William A.

1997 *Anthropological Linguistics: An Introduction*. Massachusetts: Blackwell Publishers.

- Foster, Mary LeCron and Lucy Jayne Botscharow
1990 *The Life of Symbols*. Colorado: Westview Press.
- Gordon, George, N.
1969 *The Languages of Communication*. New York: Hasting House.
- Hutchinson, John and Anthony D. Smith. (Ed.)
1996 *Ethnicity*. Oxford: Oxford University Press.
- Koentjaraningrat
1980 *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kottak, Conrad Philip
1991 *Anthropology*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Levi-Strauss, Claude
1972 *Structural Antropology*. Great Britain: Penguin Books.
- Light, Donald, dkk.
1989 *Sociology*. New York: Alfred A. Knopf
- Manners, Robert A. and David Kaplan, ed.
1968 *Theory in Anthropology*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- McManis, Carolyn, dkk.
1988 *Language Files*. Ohio: The Ohio State University.
- Nababan, P.W.J.
1986 *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Royce, Anya Peterson.
1982 *Ethnic Identity: Strategies of Diversity*. Bloomington. Indiana University Press.
- Sibarani, Robert
1992 *Hakikat Bahasa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
1998 *Makna Nama dalam Masyarakat Batak Toba*. Medan: Lembaga Penelitian USU.
2002 *Antropolinguistik sebagai Penaung Hubungan Bahasa dengan Kebudayaan*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar tanggal 19 Januari 2002). Medan: USU Press.
- Sibarani, Robert dan Henry Guntur Tarigan (Peny. dan Pen.)
1993 *Makna Nama dalam Bahasa Nusantara: Sebuah Kajian Antropolinguistik*. Bandung: Penerbit Bumi Siliwangi.
- Tampubolon, Daulat P.
2001 "Peran Bahasa dalam Memajukan Bangsa" dalam *Linguistik Indonesia*. Tahun 19, No.1
- Wardhaugh, Ronald.

- 1986 *An Introduction to Sociolinguistics*. New York: Basil Blackwell.
- Zanden, James W. Vander
- 1988 *The Social Experience: An Introduction to Sociology*. New York: Random House.
- 1990 *Sociology: The Core*. New York: McGraw-Hill, Inc.



11-0248

PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

49